

**PARTISIPASI PETANI DALAM PROGRAM TEBU RAKYAT
KEMITRAAN (TRK) DAN FAKTOR-FAKTOR SOSIAL
EKONOMI YANG MEMPENGARUHINYA
(Kasus di Kelompok Tani Usaha Jaya Kelurahan Burengan
Kecamatan Pesantren Kota Kediri)**

SKRIPSI

Oleh :

**LENI SULIS TYOWATI
02104500038-45**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN

MALANG

2009

**PARTISIPASI PETANI DALAM PROGRAM TEBU RAKYAT
KEMITRAAN (TRK) DAN FAKTOR-FAKTOR SOSIAL
EKONOMI YANG MEMPENGARUHINYA
(Kasus di Kelompok Tani Usaha Jaya Kelurahan Burengan
Kecamatan Pesantren Kota Kediri)**

RINGKASAN

Oleh :

**LENI SULIS TYOWATI
02104500038-45**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Partisipasi Petani dalam Program Tebu Rakyat Kemitraan (TRK) dan Faktor-faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya. (Kasus di Kelompok Tani Usaha Jaya Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri)

Nama : Leni Sulistyowati

NIM : 0210450038 – 45

Program Studi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Menyetujui : Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Prof.Dr. Ir. Sugiyanto, MS
NIP. 130 873 497

Dosen Pembimbing II

Ir. Edi Dwi Cahyono. M.Agr.Sc
NIP. 131 586 565

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Universitas Brawijaya
Malang

Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS
NIP. 130 936 227



*Karya ini Aku Persembahkan Kepada :
Bapak dan Ibu Tercinta Terima Kasih Atas Kasih Sayangmu
Kakakku Tercinta (Sunarti, Suwarti, Moch.Zainudin,
Siti Khotimah & Tatiah)Terima Kasih Atas Dukungan & Kasih Sayangnya .
Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku.*

RINGKASAN

Leni Sulistyowati (0210450038-45). Partisipasi Petani dalam Program Tebu Rakyat Kemitraan (TRK) dan Faktor-faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya (Kasus di Kelompok Tani Usaha Jaya Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri). Di bawah bimbingan Prof. Dr.Ir.H.Sugiyanto,MS dan Ir.Edi Dwi Cahyono,M.Agr. Sc.

Pembangunan pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai tujuan taraf hidup masyarakat yang lebih berkualitas. Masyarakat Indonesia sebagian besar hidup disektor pertanian dan banyak diusahakan adalah tanaman perkebunan yaitu tanaman tebu. Tanaman tebu merupakan bahan baku utama dan kebutuhan pokok manusia. Di dalam berusaha tani tebu petani menghadapi permasalahan yaitu kurangnya modal, teknologi yang sederhana dan pemasaran dan permasalahan yang dihadapi pabrik gula yaitu pasokan bahan baku mahal, terbatasnya lahan produksi, harga pokok produksi tinggi dan persaingan antar pabrik gula semakin ketat. Dengan adanya permasalahan yang timbul maka penerapan kemitraan sangat diperlukan sekali untuk meningkatkan produksi tebu dan meningkatkan pendapatan petani.

Perumusan masalah penelitian sebagai berikut :1)Bagaimanakah proses Kemitraan (TRK) di Kelompok Tani Usaha Jaya Di Kelurahan Burengan Kota Kediri? 2)Bagaimanakah partisipasi petani dalam program Tebu Rakyat Kemitraan (TRK) dengan PG Pesantren Baru di Kelompok Tani Usaha Jaya di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri? 3)Bagaimana hubungan antara partisipasi petani dalam program TRK dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhinya?

Tujuan penelitian ini adalah : 1)Mendiskripsikan proses kemitraan di Kelompok Tani Usaha Jaya di Kelurahan Burengan Kota Kediri 2)Mendiskripsikan partisipasi petani dalam program Tebu Rakyat Kemitraan (TRK) dengan PG Pesantren Baru di Kelompok Tani Usaha Jaya di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri 3)Menganalisis hubungan antara partisipasi petani dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi program TRK.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan tipe penelitian *explanatory research* (penelitian penjelasan), sedangkan untuk jenisnya yaitu dengan metode sensus.Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja *purposive* di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Responden dalam penelitian sejumlah 22 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan partisipasi petani di daerah penelitian dengan skala likert. Untuk menganalisis hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan partisipasi petani dengan *Analisis Tabel*.

Dari hasil penelitian diperoleh :

1. Prosedur proses kemitraan Tebu Rakyat Kemitraan di PG. Pesantren Baru yaitu : (1) Mendaftar petani, (2) Permohonan kontrak tebu rakyat diketahui KUD, (3) Diajukan ke PG, (4) Pemeriksaan lahan, (5) Rekomendasi PG dan (6) Realisasi kredit.

2. Partisipasi petani dalam program TRK di Kelompok Tani Usaha Jaya Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren meliputi merencanakan kegiatan TRK, pelaksanaan kegiatan teknis dan evaluasi kegiatan. Berdasarkan hasil yang ada diketahui bahwa partisipasi petani dalam program TRK tergolong tinggi yang mana hal ini menunjukkan bahwa petani di daerah penelitian sepenuhnya aktif dalam mengikuti kegiatan program TRK.
3. Terdapat hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan partisipasi petani dalam program TRK diartikan bahwa responden dapat menerima program-program dari pemerintah selama hal tersebut menguntungkan petani.

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Perlu adanya pengawasan terhadap proses kegiatan kemitraan oleh PG Pesantren Baru agar proses dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Partisipasi petani yang tinggi dalam menerima suatu program harus tetap dipertahankan, dalam hal ini yaitu selalu melibatkan petani mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Selain itu peranan penyuluh terus ditingkatkan sehingga pengetahuan petani terus berkembang dengan baik dalam menerima suatu teknologi baru.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan partisipasi petani terhadap program TRK, sehingga dapat dirumuskannya kebijakan pemerintah yang lebih baik dalam bidang pertanian terutama terkait dengan program TRK.



SUMMARY

Leni Sulistyowati (0210450038-45). Farmer Participation Peoples Sugar Cane Partnership (TRK) Program and Social Economic Factors Case In Usaha Jaya Farmers Group Burengan Village, Pesantren Subdistrict, Kediri City. Under guidance Prof.Dr.Ir.H.Sugiyanto, MS dan Ir.Edi Dwi Cahyono, M.Agr. Sc.

The development mainly comes to consider more qualified public life standard achievement. Most Indonesia citizen live in agriculture sector through cultivating some kinds of crop while one of them consider sugarcane. Sugarcane refers to main raw material as well human staple demand. Farmers often challenges with problems in sugarcane farming, such as limited capital and simplified technology and marketing. Sugar Factory (PG) also deals with problems such as expensive raw material supply, limited production land, higher production and farmer revenue.

Research problem determination remains such follows : 1) How is the partnership process in Usaha Jaya farmers group in Burengan Village, Kediri city? 2) How is farmer participation level in people sugar cane partnership program (TRK) between with PG Pesantren Baru in Usaha Jaya Farmers group in Burengan Village, Kediri City?: 3) How is the relation between the farmers participation in TRK program implementation and the economic factor of TRK program?

Research aims at : 1) To describe the partnership process in Usaha Jaya Farmers group in Burengan Vilage, Kediri City ; 2) To describe the farmers level in people sugar cane partnership program (TRK) between with PG Pesantren Baru in Usaha Jaya farmers group in Burengan Village, Kediri City ; 3) To analyze the relation between the farmer participation in TRK program implementation and the economic factors of TRK program.

Research method is using the type of research explanatory research, while the method of research is sensus. Determintion of research Area is purposive in Burengan village, Pesantren district, Kediri City. Responder in research are 22 farmers. Data collecting method by interview, observation and documentation.

Data analyze method for descript the participation farmer with the descriptive analyze and likert scale. To analyze the correlation the social economic factor with the farmer participation with the table Analysis.

The research's result are:

1. Process Producedure of TRK partnership at PG. Pesantren Baru involves : (a) registering the farmer, (b) colleting contractual pubilic sugarcane proposal (c) submitting the proposal to PG (d) checking the land ,(e) giving recomendation to PG and (f) realizing the credit.
2. Farmer participation in the TRK Program at Farmer Group of Usaha Jaya of Burengan Village, Pesantren Sub District include (1) planning the TRK activities, (2) technical activities implementation, and (3) activities evaluation. Based on the results, it is known that farmer participation in the studied area showed that the farmer fully active in following the TRK program activities.

3. There are correlation of social economic factors with farmers participation in TRK program mean that responden can receive the programs from the government as long as that favour the farmers.

The sugestion of this research are: (1) need the existence of observation at execution process by PG. Pesantren Baru to walk good and to with by prosedur. (2) High farmer participation in accepting a program must be considered, by always involving farmers early from planning to arrive evaluation. The extension worker role must be improved to develop farmer knowledge to accept new technology. (3) Need research about farmer participation at TRK program, with different condition of socio economic, and than can formulated good government ability in agriculture especially TRK program.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin saya ucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul **Partisipasi Petani dalam Program Tebu Rakyat Kemitraan dan Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya (Kasus di Kelompok Tani Usaha Jaya Di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri)**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Sugiyanto. MS, selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Ir. Edi Dwi Cahyono, M.Agr, selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah memberikan banyak arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
3. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Usaha Jaya yang telah membantu penulis selama penelitian di lapang.
4. Sembah bakti kepada kedua orang tuaku Bapak H. Ahmad Dani dan Ibu Hj. Siti Romsiatun , saudaraku serta semua keluarga tercinta, dengan tulus ikhlas yang telah memberikan doa, dorongan dan restunya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Teman-teman PKP 02,PKP 03, PKP 04 terima kasih atas kebersamaan kalian semua aku akan tetap mengingat kalian semua.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan demi kelancaran dunia pendidikan.

Malang, Oktober 2008

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Leni Sulis Tyowati, lahir di Kediri pada tanggal 17 Juli 1985 dari pasangan Bapak H. Ahmad Dhani dan Ibu Hj. Siti Romsiatun anak ke-enam dari enam bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN Ngreco Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan lulus pada tahun 1996. kemudian melanjutkan ke MTSN 2 Ngronggo Kota Kediri dan lulus tahun 1999 dan melanjutkan ke MAN Tambak Beras Jombang dan lulus tahun 2002. Penulis kemudian melanjutkan ke program sarjana (SI) di Universitas Brawijaya dan mengambil Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian melalui jalur SPMB.



DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
I. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Telaah Penelitian Terdahulu	8
2.2. Tinjauan Tentang Partisipasi	11
2.2.1. Pengertian Partisipasi dan Syarat Tumbuh Partisipasi.....	11
2.2.2. Bentuk dan Jenis Partisipasi.....	14
2.2.3. Tahap-tahap dalam Partisipasi	16
2.2.4. Tingkatan dalam Partisipasi	18
2.2.5. Syarat dalam Pelaksanaan Partisipasi	19
2.2.6. Hambatan dalam Melakukan Partisipasi	19
2.2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.....	21
2.3 Tinjauan Kemitraan Usaha.....	22
2.3.1. Pengertian Kemitraan	22
2.3.2. Jenis-jenis Kemitraan.....	24
2.3.3. Manfaat dan Tujuan Kemitraan Usaha	29
2.3.4. Prinsip Kemitraan	30
2.3.5. Kategori Kemitraan.....	31
2.4. Kemitraan dalam Industri Gula Nasional.....	32
2.4.1. Kemitraan dalam Tebu Rakyat	37
2.4.2. Tinjauan Tentang Tebu Rakyat Kemitraan.....	39
2.4.3. Perumusan Hak dan Kewajiban Dalam Tebu Rakyat Kemitraan.....	42
2.4.4. Bagi Hasil Gula dalam Tebu Rakyat Kemitraan.....	44
2.4.5. Mekanisme Perencanaan Kemitraan	45
2.4.6. Pelaksanaan Kemitraan	45
2.4.7. Evaluasi Kemitraan	46
2.5 Tinjauan Tentang Faktor Sosial Ekonomi.....	47

III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Konsep	53
3.2. Batasan Masalah	59
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	59
3.3.1. Definisi Operasional.....	59
3.3.2. Pengukuran Variabel	61

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian.....	64
4.2. Metode Penelitian	64
4.3. Tempat dan Waktu penelitian	64
4.4. Metode Penentuan Responden.....	65
4.5. Metode Pengumpulan Data.....	65
4.5.1. Data Primer	61
4.6. Metode Analisis Data.....	63

V. KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN

5.1. Keadaan Geografis	71
5.2. Keadaan Penduduk.....	72
5.2.1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur	72
5.2.2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	73
5.2.3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	73
5.2.4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	75
5.3. Keadaan Pertanian.....	76
5.3.1. Distribusi Lahan Pertanian.....	76
5.3.2. Jenis Komoditi dan Produksi Tanaman Pertanian	77
5.4. Kelembagaan Pendukung Usaha Pertanian.....	78
5.4.1. Keadaan Sosial	78
5.4.2. Kelembagaan Ekonomi	79

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Deskripsi Faktor Sosial Ekonomi di Daerah Penelitian	80
6.1.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	80
6.1.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	81
6.1.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Luas Lahan.....	82
6.1.4. Deskripsi Responden Berdasarkan Motivasi	84
6.1.5. Deskripsi Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan.....	85
6.1.6. Deskripsi Responden Berdasarkan Kontak dengan Penyuluh.....	86
6.2. Proses Kemitraan Program TRK di PG. Pesantren Baru	88
6.3. Deskripsi Partisipasi Petani dalam Program TRK	94
6.3.1. Partisipasi Petani Dalam Perencanaan Program TRK.....	94
6.3.2. Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program TRK.....	96
6.3.3. Partisipasi Petani Dalam Evaluasi Program TRK.....	98

6.4. Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Dengan Partisipasi Dalam Program TRK.....102

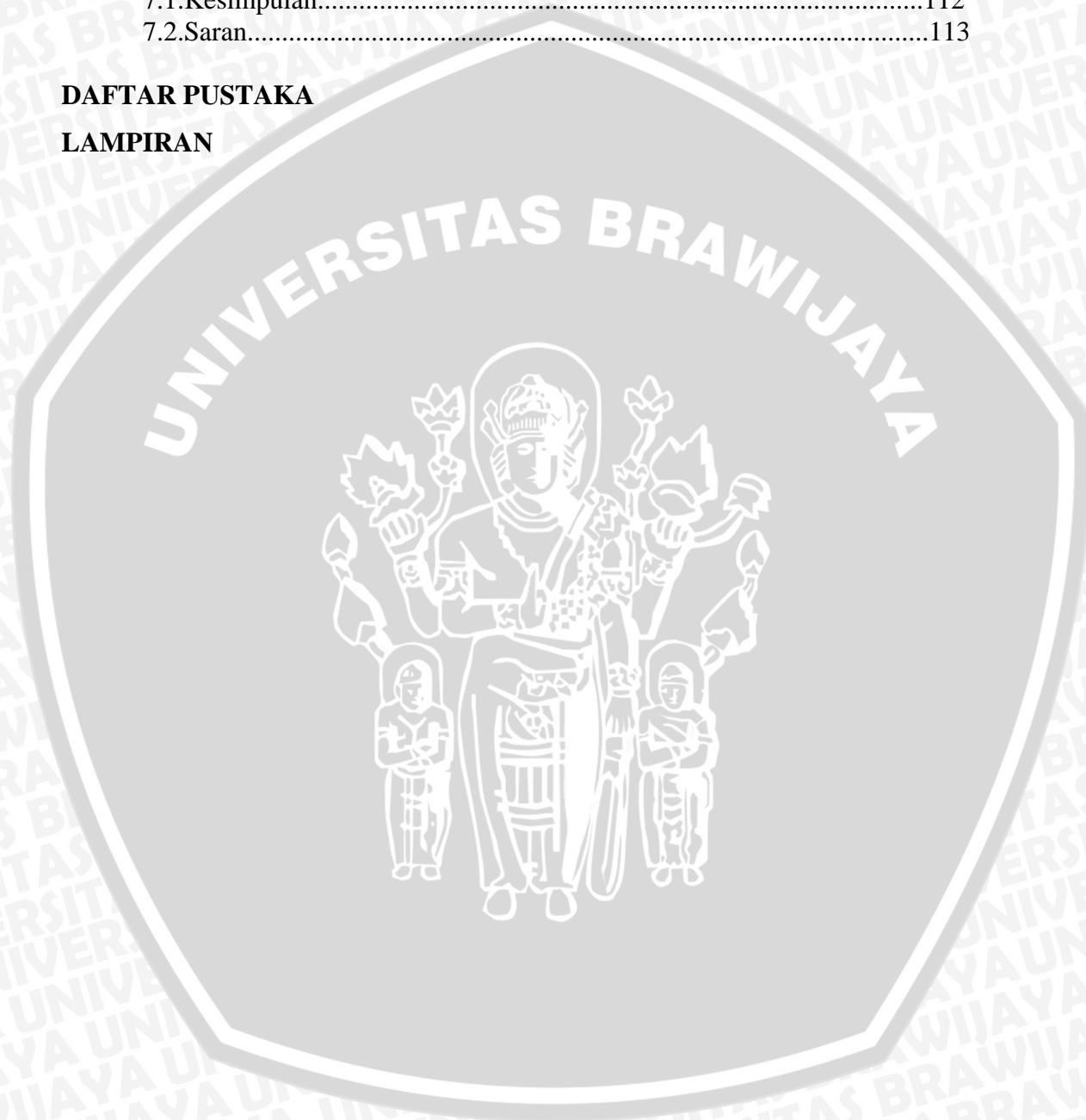
VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan.....112

7.2. Saran.....113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



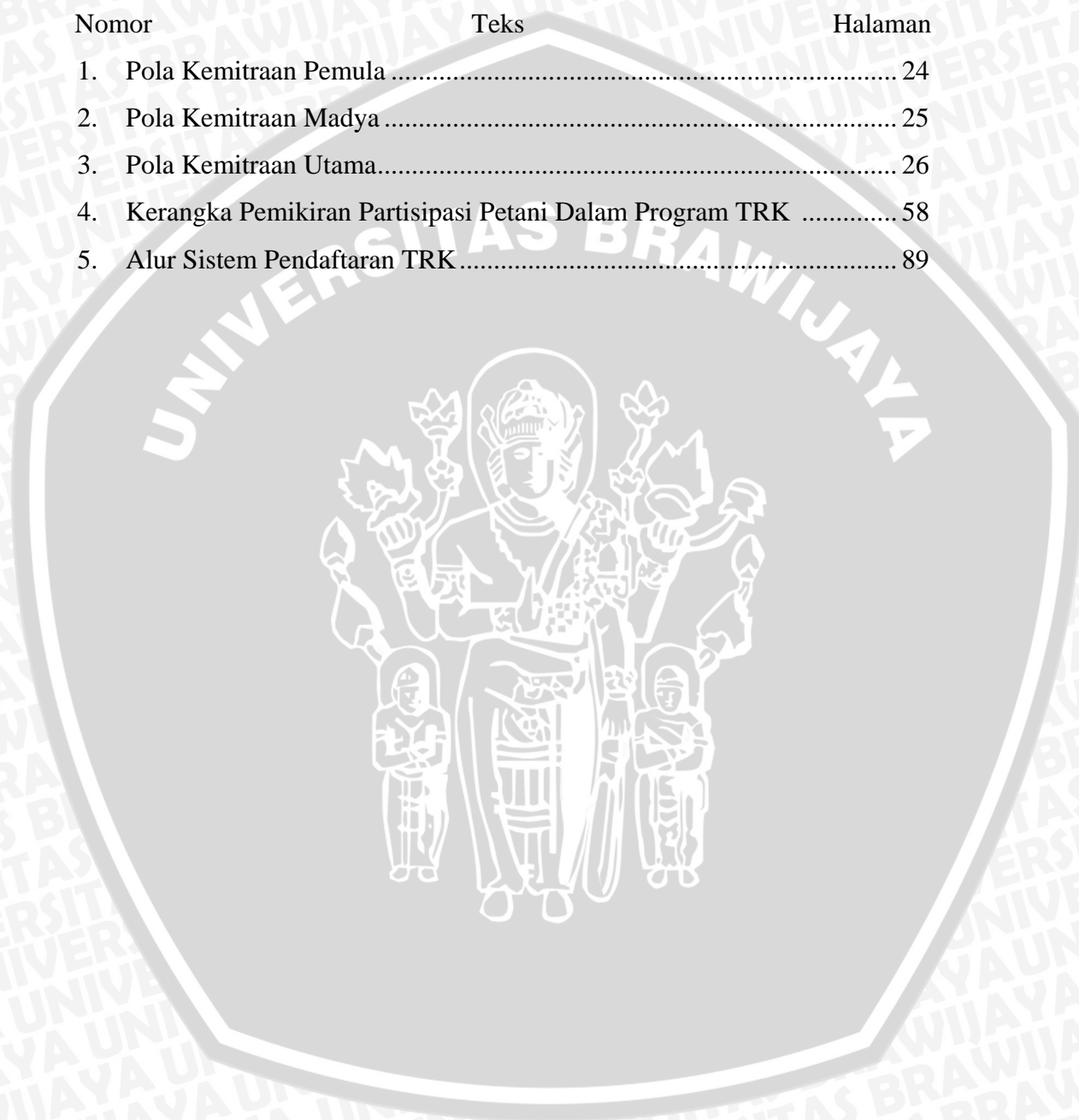
DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Indikator dan Skor Faktor Sosial Ekonomi	60
2.	Indikator dan Skor Partisipasi Petani Tebu	62
3.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur	73
4.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	74
5.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan	74
6.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	75
7.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Lahan Pertanian	76
8.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Produksi Tanaman Pertanian.....	77
9.	Deskripsi Responden Berdasarkan umur.....	80
10.	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan	81
11.	Deskripsi Responden Berdasarkan Luas Lahan	83
12.	Deskripsi Responden Berdasarkan Motivasi.....	84
13.	Deskripsi Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan.....	86
14.	Deskripsi Responden Berdasarkan Kontak Dengan Penyuluh.....	87
15.	Persentase Partisipasi Dalam Program TRK	94
16.	Persentase Partisipasi Dalam Perencanaan Program TRK	96
17.	Persentase Partisipasi Dalam Pelaksanaan Program TRK	98
18.	Persentase Partisipasi Dalam Evaluasi Program TRK.....	100
19.	Hubungan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi dalam Program TRK	104
20.	Hubungan antara umur dengan partisipasi dalam Program TRK.....	105
21.	Hubungan antara luas lahan dengan partisipasi dalam Program TRK ..	106
22.	Hubungan antara motivasi dengan partisipasi dalam Program TRK.....	107
23.	Hubungan antara status kepemilikan lahan dengan partisipasi dalam Program TRK	108
24.	Hubungan antara kontak dengan penyuluh dengan partisipasi dalam Program TRK	110



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Pola Kemitraan Pemula	24
2.	Pola Kemitraan Madya	25
3.	Pola Kemitraan Utama.....	26
4.	Kerangka Pemikiran Partisipasi Petani Dalam Program TRK	58
5.	Alur Sistem Pendaftaran TRK.....	89





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai tujuan taraf hidup masyarakat yang lebih berkualitas sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Sebelum adanya penjajahan di Indonesia masyarakat telah mempunyai tatanan kehidupan agraris yang menjadi tumpuan kehidupan ekonomi mereka, sehingga hampir seluruh penduduk Indonesia hidup dari sektor pertanian.

Masyarakat Indonesia yang hidup di sektor pertanian banyak mengusahakan berbagai jenis tanaman, Salah satu jenis tanaman yang saat ini banyak diusahakan adalah tanaman perkebunan yaitu tanaman tebu. Usaha tani tebu sudah dikenal sejak zaman kolonial. Di Pulau Jawa tanaman tebu telah diusahakan melalui sistem tanam paksa selama kurang lebih satu abad.

Sistem tanam paksa dilakukan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1830 cara yang dilakukan yaitu dengan memaksa para petani untuk mengusahakan tanaman tebu yang dikelola oleh Pabrik Gula dengan sistem sewa. Sistem ini berjalan sejak awal abad 19 sampai dengan Indonesia merdeka dan berakhir pada tahun 1975.

Setelah Indonesia merdeka, industri gula dipegang oleh pemerintah Indonesia dengan sistem yang sama. Akan tetapi dengan adanya sistem sewa tersebut semakin lama mengalami penurunan produksi karena merosotnya luas areal dan kualitas tebu. Padahal kebutuhan areal tanaman tebu bagi pabrik gula dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh

pertambahan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat untuk mengkonsumsi gula serta semakin banyaknya industri yang membutuhkan tebu sebagai bahan baku.

Melihat penurunan produksi gula yang terus dialami industri maka pada tahun 1975 pemerintah mengeluarkan kebijakan Inpres No 9 Tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Tujuan dari program TRI ini adalah agar petani mengusahakan tanaman tebu sendiri meningkatkan penghasilan petani tebu menjamin pemantapan dan peningkatan produksi gula.

Program TRI meliputi : penyuluhan yang disertai dengan kegiatan penyediaan sarana produksi, kegiatan pemberian fasilitas kredit, kegiatan pengaturan tebu, pemasaran dan kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan program TRI. Dalam program TRI ini terdapat hubungan kerja antar petani dengan pabrik gula yaitu petani berperan sebagai pengolah hasil. Hubungan kerja tersebut terlihat bahwa petani tergantung pada pabrik gula karena pabrik gula memegang dan menentukan proses tebang, giling dan bagi hasil gula. Kebijakan pengembangan sistem tebu rakyat ini juga menyebabkan kelangsungan industri gula dapat tergantung pada partisipasi petani dalam menyediakan bahan bakunya, yaitu ketersediannya mereka menanam tebu. Partisipasi aktif dari petani sangat dibutuhkan dalam pengembangan perindustrian gula. Dengan adanya rasa saling ketergantungan tersebut maka diperlukan adanya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak dengan demikian peningkatan perindustrian gula di Indonesia dapat meningkat.

Kegiatan pertanian di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh petani kecil yang terbatas dalam hal modal, saprodi, informasi maupun teknologi. Sehingga tidak mungkin petani kecil dapat memenuhinya secara mandiri mengingat kondisi petani sangat lemah dalam hal modal, saprodi, informasi dan teknologi maka diperlukan peran serta pengusaha besar (pemilik modal) untuk membantu mengembangkan usahatani petani kecil. Kemitraan usaha merupakan suatu bentuk kerjasama yang tepat untuk mengatasi permasalahan petani tersebut. Kemitraan dikembangkan atas dasar aspek ekonomis dan dengan pembinaan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang.

PG. Pesantren Baru merupakan perusahaan yang mengolah tebu menjadi gula kristal. Untuk mencukupi kebutuhan bahan bakunya, pabrik gula memperoleh dari tebu rakyat, Oleh karena itu, pabrik gula menjalin mitra dengan petani tebu. Bentuk kemitraan antara pabrik gula dengan petani tebu disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing daerah. Bentuk kemitraan pada wilayah kerja Pesantren Baru dengan petani tebu adalah Tebu Rakyat Kemitraan (TRK).

Keberhasilan kemitraan dapat tercapai apabila pelaku kemitraan harus menyadari adanya keterbatasan yang ada pada diri masing-masing dalam bidang sumberdaya, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dengan usaha tersebut diharapkan dapat memperbaiki diri serta saling mengisi dan melengkapi. Tujuan akhir yang hendak dicapai dengan adanya kemitraan antara petani TRK dengan PG. Pesantren Baru adalah peningkatan produktivitas tebu sehingga dapat memantapkan produksi gula nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari program TRK pihak pabrik berupaya untuk mengajak petani untuk mengikuti semua kegiatan yang ada dalam rangkaian pelaksanaan program TRK. Dengan demikian terbentuklah kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta petani untuk melaksanakan semua kegiatan dan perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama. Peran serta petani dalam program TRK terwujud dalam bentuk partisipasi aktif pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Partisipasi yang terjadi dalam program TRK tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor antara lain pendidikan, umur, luas lahan, status kepemilikan lahan, motivasi dan kontak dengan penyuluh karena faktor tersebut yang akan membuat petani mempertimbangkan untuk terlibat atau tidak dalam program TRK ini. Dengan melihat gambaran diatas maka diperlukan penelitian yang akan menganalisis partisipasi petani dalam program TRK sebagai upaya peningkatan produksi gula dan peningkatan kesejahteraan petani tebu.

1.2 Perumusan Masalah

Pelaksanaan program TRI resmi dilaksanakan pada tahun 1975 dengan tujuan untuk meningkatkan produksi gula ditingkat nasional dan meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas tanaman tebu yang diusahakan oleh petani. Pada tahun 1986 program ini diganti atau dilanjutkan dengan nama Tebu Rakyat Intensifikasi Khusus. Pada tahun 1999 nama program ini diganti lagi dengan Program Rakyat Kemitraan (TRK).

Sejak program TRK dibentuk berbagai permasalahan mulai muncul salah satunya adalah berkaitan dengan tanah dan permasalahan hasil tebu. Tebu sebagai bahan mentah industri gula dalam program TRK, proses tebang, pengolahan hasil dan pemasarannya terkait kontrak dengan pabrik gula melalui hubungan kerja bagi hasil. Keterkaitan tersebut berpengaruh terhadap keputusan untuk menanam tebu atau tidak. Mereka lebih memilih untuk menyewakan tanahnya kepada petani lain atau pengusaha tebu sehingga mereka langsung mendapatkan uang tunai dan dapat menyediakan tenaganya untuk bekerja diluar tanaman tebu.

Hubungan kerja yang terjadi antar pihak pabrik dengan petani akan mempengaruhi perindustrian gula. Hal ini dikarenakan semakin banyak petani yang berpartisipasi dalam menanam tebu maka produksi tebu akan meningkat dan produksi gula akan mengikuti. Selama ini petani tebu tertarik akan menanam tebu dikarenakan lahan mereka yang kebanyakan kering sehingga yang paling cocok adalah ditanami tanaman tebu. Setelah menanam tebu mereka akan kesulitan dalam hal pemasaran hasil tebunya maka dari itu dengan mengikuti kontrak program TRK pemasaran hasil tebu mereka sudah pasti.

Program TRK merupakan program dimana petani yang terikat kontrak akan mendapatkan pinjaman pupuk, bibit dan biaya garap serta pemasaran yang sudah pasti. Dalam program TRK yang merupakan hubungan kerja sehingga diharapkan muncul keinginan petani untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Masing-masing petani mempunyai kemampuan yang berbeda dalam berpartisipasi. Hal ini tidak lepas dari adanya faktor sosial ekonomi mempengaruhi partisipasi mereka terhadap program TRK. Dimana

faktor-faktor tersebut antara lain pendidikan, umur, luas lahan, motivasi, status kepemilikan lahan dan kontak dengan penyuluh.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu diadakan penelitian tentang tingkat partisipasi petani dalam mengikuti program TRK dan faktor sosial ekonomi yang berhubungan dengan tingkat partisipasi petani dalam program TRK sebagai upaya peningkatan perindustrian gula. Sehingga dalam penelitian ini diperoleh beberapa pertanyaan antara lain :

1. Bagaimanakah proses Kemitraan (TRK) di Kelompok Tani Usaha Jaya Di Kelurahan Burengan Kota Kediri ?
2. Bagaimanakah partisipasi petani dalam program Tebu Rakyat Kemitraan (TRK) dengan PG Pesantren Baru di Kelompok Tani Usaha Jaya di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
3. Bagaimana hubungan antara partisipasi petani dalam program TRK dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhinya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan proses kemitraan di Kelompok Tani Usaha Jaya Di Kelurahan Burengan Kota Kediri
2. Mendiskripsikan partisipasi petani dalam program Tebu Rakyat Kemitraan (TRK) dengan PG Pesantren Baru di Kelompok Tani Usaha Jaya di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri
3. Menganalisis hubungan antara partisipasi petani dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi program TRK.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi PG Pesantren Baru dalam menjalankan kemitraan dengan petani Tebu Rakyat Kemitraan (TRK) sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijaksanaan berikutnya.
2. Sebagai masukan bagi petani mengenai keuntungan menjadi peserta kemitraan dengan PG Pesantren Baru.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Asnah (2003), dengan skripsi berjudul “ Analisa Pola Kemitraan antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula dalam Bagi Hasil Gula di PG. Kebon Agung Malang” juga menarik kesimpulan bahwa:

1. Penetapan upah giling tebu dilakukan oleh PG. Kebon Agung berdasarkan hasil kesepakatan dari tiga pihak.
2. PG. Kebon Agung akan mendapat keuntungan maksimal jika menggilingkan tebu sejumlah 2.203.500 kuintal dengan upah giling sejumlah 37,70%.
3. Rata-rata produksi tebu per Ha lahan sawah adalah 811,54 kuintal dan lahan tegal adalah 76,56 kuintal. Usahatani tebu di lahan tegal lebih menguntungkan karena biaya usahatani di lahan sawah lebih mahal.
4. Deferensiasi produk jasa penggilingan tebu di PG. Kebon Agung secara umum telah mampu bersaing dengan produk jasa lainnya. Tetapi ada beberapa pelayanan PG. Kebon Agung yang tidak mendorong konsumen jasa penggilingan tebu (petani tebu) untuk meningkatkan produktivitas lahan tebu. Hal ini diantaranya: penerapan rendemen rata-rata, penilaian mutu tebu dan pelayanan kredit penanaman tebu.

Mokoginta (2002), dalam skripsi berjudul “Analisa Pengaruh Pola Kemitraan Terhadap Produksi dan Pendapatan Petani Tebu di Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang” menjelaskan bahwa program TRI

(Kemitraan Tebu) tidak memiliki pengaruh nyata dengan peningkatan produksi dan pendapatan petani tebu.

Midanto (2005), dalam skripsinya yang berjudul “Kemitraan Antara Petani Tebu Rakyat Kemitraan (TRK) dengan Pabrik Gula Krebet Baru di Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang” menarik kesimpulan bahwa :

1. Sebagian besar petani memperoleh informasi kemitraan dari ketua kelompok. Motivasi petani masuk menjadi anggota kemitraan adalah mendapatkan pinjaman pupuk dari PG. Krebet Baru, tetapi pada umumnya mereka tidak mengetahui syarat menjadi anggota kemitraan.
2. Petani belum mendapatkan hak sepenuhnya atas pinjaman bibit, modal berupa uang, jaminan pemasaran dan bimbingan teknis secara rutin. Sedangkan untuk pinjaman pupuk dan pembagian uang dan gula, petani telah mendapatkan haknya.
3. Petani telah melaksanakan kewajiban utama mereka dalam hal menanam tebu pada lahan TRK dan menggilingkan hasil tebunya pada PG. Krebet Baru. Sedangkan kewajiban dalam melaksanakan bimbingan dari pihak PG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
4. PG. Krebet Baru mendapatkan hak sepenuhnya atas tebu dengan standar “MBS”, memperoleh haknya dalam bagi hasil gula secara penuh, hak untuk memotong pendapatan petani TRK apabila tebu yang diperoleh tidak memenuhi standar. Sedangkan hak untuk melakukan pengawasan pada petani TRK kurang dimanfaatkan dengan baik, hanya sekitar 35% petani yang diawasi dan itupun hanya pada kegiatan terbang angkut saja.

5. PG. Krobot Baru tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam pinjaman bibit, pinjaman uang, pemberian bimbingan teknis. Sedangkan untuk pinjaman pupuk PG telah melaksanakannya secara 100%.

Prayogo (2008), dalam skripsinya yang berjudul peran sinder sebagai penyuluh lapang pada penerapan hasta usahatanu tebu dalam peningkatan pendapatan usahatanu melalui program tebu rakyat kemitraan (TRK) menarik kesimpulan bahwa :

1. Peran sinder sebagai penyuluh lapang dalam penerapan hasta usahatanu di Wilayah Kerja I PG. Djombang Baru Kecamatan Jombang meliputi: peran sinder sebagai pembimbing, sinder sebagai organisator dan dinamisator, sinder sebagai fasilitator, serta sinder sebagai agen penghubung. Dari empat sub variabel tersebut dapat diketahui bahwa peran sinder sebagai penyuluh lapang pada penerapan hasta usahatanu di Wilayah Kerja I PG. Djombang Baru Kecamatan Jombang termasuk dalam kategori tinggi dengan total skor rata-rata 23,39 atau sebesar 77,98% dari skor maksimal 30.
2. Penerapan hasta usahatanu tebu di Wilayah Kerja I PG. Djombang Baru Kecamatan Jombang meliputi: masa tanam optimal, penggunaan bibit unggul, pengolahan tanah, pemupukan berimbang, pengairan, perlindungan tanaman, tebang muat angkut, dan pemrosesan hasil. Dari sub variabel tersebut dapat diketahui bahwa penerapan hasta usahatanu tebu di Wilayah Kerja I PG. Djombang Baru Kecamatan Jombang termasuk dalam kategori tinggi dengan total skor rata-rata 28,39 atau sebesar 78,86 dari skor maksimal 36.
3. Di wilayah kerja I PG. Djombang Baru Kecamatan Jombang terdapat kecenderungan hubungan antara peran sinder sebagai penyuluh lapang dengan penerapan hasta usahatanu. Ditunjukkan dengan nilai persentase dominan

sebesar 64,71% pada peran sinder sebagai penyuluh lapang dalam kategori sedang dan penerapan hasta usahatani tebu dengan kategori sedang. Terdapatnya kecenderungan hubungan juga ditunjukkan dengan nilai persentase dominan sebesar 63,63% pada peran sinder sebagai penyuluh lapang dengan kategori tinggi dan penerapan hasta usahatani tebu dengan kategori tinggi.

4. Di wilayah kerja I PG. Djombang Baru terdapat kecenderungan hubungan antara penerapan hasta usahatani dengan tingkat pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai persentase dominan sebesar 73,33% yang terdapat pada penerapan hasta usahatani tebu dengan kategori sedang dan tingkat pendapatan dengan kategori sedang. Sedangkan nilai persentase dominan sebesar 69,23% terdapat pada penerapan hasta usahatani tebu dengan kategori tinggi dan tingkat pendapatan dengan kategori sedang.

2.2 Tinjauan Tentang Partisipasi

2.2.1 Pengertian Partisipasi dan Syarat Tumbuh Partisipasi

Partisipasi adalah tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi anggota sistem sosial dalam pembuatan keputusan berhubungan positif dengan kepuasan mereka terhadap keputusan inovasi kolektif. Ini berarti bahwa semakin tinggi partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tingkat kepuasan mereka terhadap keputusan. Hanafi (1986), juga mengemukakan alasan sistem sosial lebih puas dengan keputusan kolektif, alasannya adalah :

1. Dengan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, anggota itu mengetahui bahwa sebagian besar anggota dalam sistem juga ingin melaksanakan keputusan itu.
2. Keputusan untuk menerima atau menolak lebih sesuai dengan kebutuhan anggota sistem jika mereka ikut ambil bagian dalam membuat keputusan.
3. Partisipasi yang luas memungkinkan para pemuka pendapat di dalam sistem dapat menduga apa yang diinginkan oleh sebagian besar anggota terhadap keputusan yang akan diambil.

Menurut Sastropetro (1986), menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan keluarga untuk tujuan bersama. Keterlibatan spontan adalah meliputi keterlibatan fisik maupun pemikiran seseorang pada suatu kelompok dimana ia menjadi anggotanya untuk kepentingan bersama.

Menurut Van Den Ban dan Hawkins (1999), partisipasi memiliki konotasi yang berbeda-beda setiap orang, sebagaimana terumus dalam pokok-pokok berikut :

1. Sikap kerjasama petani dalam pelaksanaan program penyuluhan dengan cara menghadiri penyuluhan, mendemonstrasikan metode baru untuk usaha tani, mengajukan pertanyaan pada agen penyuluh dan sebagainya.
2. Pengorganisasian kegiatan penyuluhan oleh kelompok-kelompok petani seperti pertemuan-pertemuan tempat agen penyuluh memberikan ceramah, mengelola kursus-kursus demonstrasi, menerbitkan surat kabar tani yang ditulis oleh agen penyuluh dan peneliti untuk petani.

3. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk merencanakan program penyuluhan yang efektif.
4. Petani atau para wakilnya berpartisipasi dalam organisasi jasa penyuluhan dalam pengambilan keputusan mengenai tujuan, kelompok sasaran, pesan-pesan dan metode dalam evaluasi kegiatan.
5. Petani atau organisasinya membayar seluruh atau sebagian biaya yang dibutuhkan jasa penyuluh.
6. Supervisi agen penyuluhan oleh anggota dewan organisasi petani yang mempekerjakannya.

Menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Syamsi (1986), menyatakan bahwa partisipasi itu merupakan keterlibatan nyata seseorang dalam proses pembuatan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya, juga dapat diartikan sebagai keterlibatan mereka dalam menerima hasil.

Sedangkan menurut Slamet (1980), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, partisipasi adalah keterlibatan ikut serta masyarakat dalam pembangunan melalui kesadaran yang disertai dengan tanggung jawab untuk kepentingan bersama dalam rangka mencapai tujuan, selain memberikan input juga memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.

Menurut Slamet (1980), bahwa syarat tumbuhnya partisipasi meliputi 3 hal, yaitu

1. Kemauan untuk berpartisipasi

Secara psikologis, kemauan berpartisipasi dapat muncul karena adanya motif intrinsik maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan/tekanan dari luar).

2. Kemampuan untuk berpartisipasi

Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, ketrampilan dan juga sikap mental. Pengetahuan dan pengertian tentang pembangunan sesuatu sampai pada seluk beluk pelaksanaannya sangat perlu bagi masyarakat sehingga mereka dapat cepat tanggap terhadap kesempatan yang ada.

3. Kesempatan untuk berpartisipasi

Kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang menuju peningkatan kualitas hidup itu bermacam-macam bentuknya, antara lain adanya sumber-sumber daya alam yang dapat dikembangkan, adanya pasaran yang terbuka (prospek untuk mengembangkan sesuatu), tersedianya modal (uang, kredit), tersedianya sarana dan prasarana terbukanya lapangan kerja pembangunan dan lain sebagainya.

2.2.2 Bentuk dan Jenis Partisipasi

2.2.2.1 Bentuk Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun dalam suatu program dapat dibedakan bermacam-macam bentuknya. Menurut Keith Davis dalam Sastroetro (1988), bentuk partisipasi meliputi konsultasi (dalam bentuk jasa), sumbangan spontan berupa uang atau barang, mendirikan proyek yang sifatnya

berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada diluar lingkungan tertentu, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, sumbangan dalam bentuk kerja yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat, aksi massa, mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri, membangun proyek komunitas yang bersifat otonom. Pendapat tersebut didukung oleh Dussldorp dalam Mardikanto (1994), bahwa bentuk partisipasi sangat bermacam-macam antara lain menjadi anggota kelompok masyarakat, melibatkan diri dalam diskusi kelompok, melibatkan diri pada kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi, menggerakkan sumberdaya masyarakat, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, memanfaatkan hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

Menurut Margono (1985), partisipasi juga bisa berwujud ikut memberikan masukan, tidak menerima imbalan atas masukan yang diberikan tapi ikut memanfaatkan hasil pembangunan, ikut memberikan masukan, menerima imbalan dan masukan yang disumbangkan serta ikut memanfaatkan hasilnya, memberi masukan, menerima imbalan atas masukan yang diberikan tapi ikut memanfaatkan hasil pembangunan yang dilaksanakannya, ikut menerima dan menikmati hasil pembangunan tapi tidak turut memberikan masukan secara langsung, ikut memberikan masukan, meski tidak menerima imbalan atas masukan tersebut dan juga ikut menikmati manfaat hasil pembangunan yang dilakukan.

2.2.2.2 Jenis Partisipasi

Berdasarkan pengertian tentang partisipasi dalam pembangunan, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis yaitu :

1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut, dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut memberikan input dan menikmati hasilnya.
3. Ikut memberi input dan menerima imbalan, tanpa ikut menikmati hasil secara langsung.
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan, tanpa ikut memberi input.
5. Memberi input, tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya.

Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1988), ada beberapa jenis partisipasi yang ada pada masyarakat yaitu pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang, uang. Partisipasi menurut derajat kesukarelaannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi bebas artinya partisipasi yang dilakukan atas dasar kesukarelaannya tanpa paksaan untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi bebas ini dibedakan dalam partisipasi spontan dan partisipasi terinduksi karena adanya pengaruh, bujukan/penyuluhan dari pihak luar, sedangkan yang kedua adalah partisipasi paksaan/tertekan baik yang ditekan oleh adanya satu peraturan/hukum karena keadaan sosial ekonomi maupun tertekan oleh kebiasaan setempat.

2.2.3 Tahap-Tahap dalam Partisipasi

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya ikut menyumbangkan suatu input ke dalam proses pembangunan, tetapi termasuk juga ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Berikut tahapan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

1. Perencanaan

Menurut Sumohardjo dalam Margono (1986), mendefinisikan bahwa keikutsertaan warga masyarakat dalam merealisasikan aspirasinya, dengan jalan menyanggah pikiran, inisiatif dan kreatif dalam bentuk usul, saran dalam rapat resmi atau tidak. Merencanakan kegiatan merupakan suatu proses menetapkan tujuan dan bentuk kegiatan yang mungkin akan dikerjakan serta bagaimana melakukan kegiatan itu. Keterlibatan masyarakat dalam merencanakan akan menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap program dan proyek yang dilaksanakan. Dengan begitu secara moral masyarakat yang bersangkutan merasa memiliki pembangunan itu sebab mereka ikut berpartisipasi dalam menetapkannya

2. Pelaksanaan

Menurut Mosha dan Matte dalam Mandri (1984), menyebut fase ini sebagai "Participation Implementation" yang kegiatannya berupa sumbangan uang, tenaga, benda dan waktu. Dalam tahap ini yang dimaksud adalah partisipasi dalam memiliki beban program dan pertanggungjawaban pelaksanaan program.

Proses pelaksanaan partisipasi menurut Pajri (2001), adalah :

- a. Konsultasi yang biasanya dalam bentuk jasa
- b. Sumbangan dalam bentuk uang/barang.
- c. Mendirikan proyek dengan dana sendiri
- d. Sumbangan dalam bentuk kerja
- e. Aksi massa

3. Evaluasi

Menurut Margono (1986), evaluasi pada prinsipnya adalah tindakan pengawasan, penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan secara efektif dan efisien. Evaluasi bisa dilihat dari keaktifan kehadiran dan keaktifan bertanya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana petani merasa tertarik dan sejauh mana rasa keingintahuan mereka.

2.2.4 Tingkatan dalam Partisipasi

Untuk menumbuhkan adanya kegiatan partisipasi diperlukan adanya ketrampilan dan pengetahuan agar dapat mencapai berbagai tingkatannya. Dengan memperhatikan perbedaan tingkatan yang ada, maka pada dasarnya tampak adanya tiga tingkatan yaitu :

1. Tingkat saling mengerti

Tujuannya adalah untuk membantu para anggota kelompok agar memahami masing-masing fungsi dan sikap, sehingga dapat mengembangkan kerjasama yang lebih baik. Dengan demikian secara pribadi mereka akan menjadi lebih banyak terlibat, bersikap kreatif dan juga menjadi lebih bertanggung jawab.

2. Tingkat Penasihatatan Sugesti

Pada tingkatan ini di bangun atas dasar saling mengerti, oleh karena para anggota kelompok pada hakikatnya cenderung untuk siap memberikan usulan/saran setelah memahami suatu masalah.

3. Tingkat Otoritas

Pada dasarnya memberikan kepada kelompok suatu kewenangan untuk memantapkan keputusannya. Kewenangan demikian dapat bersifat resmi

kalau kelompok hanya memberikan kepada pimpinan konsep keputusan yang kemudian dapat diresmikan menjadi keputusan oleh si pemimpin (Sastropetro,1988).

2.2.5 Syarat dalam Pelaksanaan Partisipasi

Dalam melaksanakan partisipasi secara efektif ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar partisipasi tersebut dapat berjalan yaitu perlu waktu untuk berpartisipasi sebelum berlangsungnya suatu kegiatan hal itu dimaksudkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang menyangkut tindakan partisipasi yang akan dilakukan, subjek partisipasi perlu relevan dengan kepentingan manusianya/masyarakatnya, orang-orang yang berpartisipasi haruslah mempunyai kemampuan seperti halnya kecerdasan dan pengetahuan yang luas, memastikan bahwa tidak ada salah satu pihak pun yang bisa/merasa dirinya terganggu karena partisipasi tersebut, biaya kegiatan partisipasi tidak boleh melampaui nilai ekonomi atau sejenisnya. Partisipasi adalah memutuskan untuk melaksanakan kegiatan (Sastropetro, 1988).

2.2.6 Hambatan dalam Melakukan Partisipasi

Lustiadi (2001), menyatakan rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh :

1. Belum memahami makna yang sebenarnya dari konsep partisipasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan.
2. Lemahnya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi berakar dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

3. Reaksi balik dari masyarakat sebagai konsekuensi perlakuan pembangunan sebuah ideologi baru.

Sedangkan menurut Makarabhirom (2002), terdapat beberapa kendala partisipasi masyarakat yaitu :

1. Pemerintah mengutamakan kepentingan pengusaha dan pemusatan pengambilan keputusan pada tingkat nasional dengan kurang memahami kondisi lokal.
2. Pemerintah mendahulukan peraturan dan perundang-undangan yang ketat dari pada diplomasi.
3. Kurangnya pelatihan dalam konsep, strategi dan metode partisipasi
4. Kurangnya pendidikan partisipasi dengan megikutsertakan pegawai pemerintah dan masyarakat lokal.
5. Masyarakat tidak menerima manfaat/keuntungan yang pantas.

Menurut Kresh, Richart dan Egeton dikutip oleh Dasuki dalam Wahyuni (1992) “Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi disebabkan kurangnya komunikasi antar anggota, anggota dengan pengurus hal tersebut disebabkan adanya perbedaan karakteristik individu yang nyata antara anggota dengan pengurus yakni perbedaan umur, tingkat pendidikan, kemampuan, dorongan keberhasilan, tenggang rasa, status sosial”. Didalam setiap pengambilan keputusan mungkin saja para anggota yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan, tidak berani menentang anggotannya yang berkuasa. Hal tersebut menandakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat desa diantaranya

adalah tingkat pendidikan, status sosial yang ditunjukkan oleh adanya kekuasaan maupun tingkat perekonomian atau golongan masyarakat miskin.

Melakukan partisipasi tidak selamanya berjalan dengan sempurna dalam tengah perjalanan tidak menutup kemungkinan terdapat hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi proses melakukan partisipasi tersebut antara lain belum dipahami arti sebenarnya dan konsep partisipasi. Pihak perencanaan dan pelaksanaan reaksi balik dari masyarakat sebagai ideologi baru lamanya kemampuan rakyat untuk berpartisipasi berakar dari banyaknya peraturan dan perundang-undangan yang masih berlaku. Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yang sangat mendukung yaitu hambatan struktural yang menyangkut lingkungan kebijakan politik yang dijalankan oleh pemerintah dan hambatan administrasi sentralistik mengakibatkan keputusan ditingkat pemerintah, hambatan sosial berhubungan dengan struktur sosial seperti terdapatnya kelompok-kelompok elit desa yang berpengaruh pada pelaksanaan partisipasi dalam arti negatif. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku partisipasi harus memperoleh manfaat dari apa yang dilakukannya sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk selalu berpartisipasi tanpa menghiraukan segala hambatan-hambatan yang ada (Hawkins dan Van de Ban, 1995)

2.2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Darjono *dalam* Sastropetro, (1986) dalam berpartisipasi terhadap suatu program terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

1. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.
2. Penginterpretasian yang dangkal terhadap agama.
3. Kecenderungan untuk mengalah diartikan sebagai motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya terjadi di beberapa negara.
4. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan.

2.3 Tinjauan Tentang Kemitraan Usaha

2.3.1 Pengertian Kemitraan

Menurut Hafsah (1999), kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Bachriadi dalam Ernawati (2004), menjelaskan bahwa secara definitif *contract farming* diartikan sebagai usahatani yang didasari kontrak antara satu lembaga atau perusahaan yang berperan sebagai pengolah atau pemasar hasil pertanian dari petani-petani yang berperan sebagai produsen primer dari hasil pertanian tersebut. Dalam hubungan ini petani berperan sebagai produsen primer yang akan menjual sebagian atau seluruh produksinya kepada perusahaan. Perusahaan ini akan menjual, mengolah atau menjual kembali hasil produksi tadi.

Perusahaan yang membeli produk pertanian dapat menyediakan nasehat-nasehat teknis dan kredit sarana produksi. Kirk dalam Ernawati (2004), menyebut sistem ini dengan *core satellite mode* atau model inti satelit, dimana lembaga atau perusahaan menjadi inti dan petani produsen primer menjadi satelitnya. Pihak inti dibentuk sebagai *nucleus estate* yang mencakup sebuah produk perusahaan perkebunan yang dikelola sendiri dan unit pengelolaan dimana sejumlah petani disekitarnya menjanjikan akan menyediakan hasil pertaniannya kepada inti.

Model *contract farming* meliputi beberapa macam hubungan kerjasama antara petani kecil dan perusahaan besar yang bentuknya dirancang sendiri. Oleh karena itu, pihak yang menjadi inti dapat berbentuk badan-badan usaha yang dimiliki oleh negara atau lembaga-lembaga yang dibentuk khusus untuk kepentingan tersebut. Dapat berupa perusahaan-perusahaan swasta atau koperasi. Sedangkan kontrak yang terjadi antara pihak inti atau pemberi kontrak dengan petani-petani kecil dapat secara tertulis atau hanya berbentuk lisan.

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang menurut Marrioti dalam Hafsa (2000), dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, kemudian mulai membangun strategi, melaksanakan dan terus memonitor serta terus melakukan evaluasi hingga target yang diinginkan tercapai. Proses ini harus dicermati sejak awal sehingga permasalahan yang timbul dapat diketahui, baik dari besarnya masalah maupun langkah penyelesaian yang diambil. Disamping hal tersebut apabila ada perubahan dalam pasar yang timbul dapat segera diatasi sehingga tidak mempengaruhi target yang ingin dicapai. Rangkaian urutan proses pengembangan kemitraan merupakan

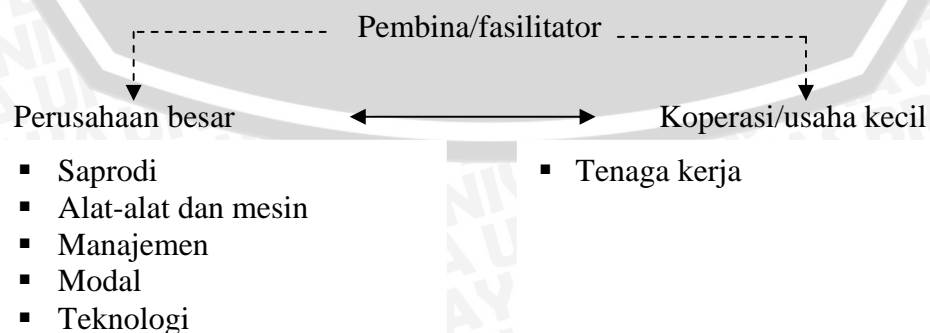
suatu urutan tangga yang ditapaki secara berurutan dan bertahap untuk mendapatkan hasil yang optimal. Proses ini dimulai dengan membangun hubungan dengan calon mitra, mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra, mengembangkan strategi dan menilai detail bisnis, mengembangkan program, melaksanakan program, memonitor dan mengevaluasi perkembangan.

2.3.2 Jenis-jenis Kemitraan

Pola kerjasama melalui kemitraan usaha yang berjalan di sektor tanaman pangan selama ini ada beberapa macam dan penerapannya disesuaikan dengan perusahaan, petani dan kondisi daerah setempat. Hafsa (2000), menyatakan secara umum pola kemitraan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pola Kemitraan Sederhana (Pemula)

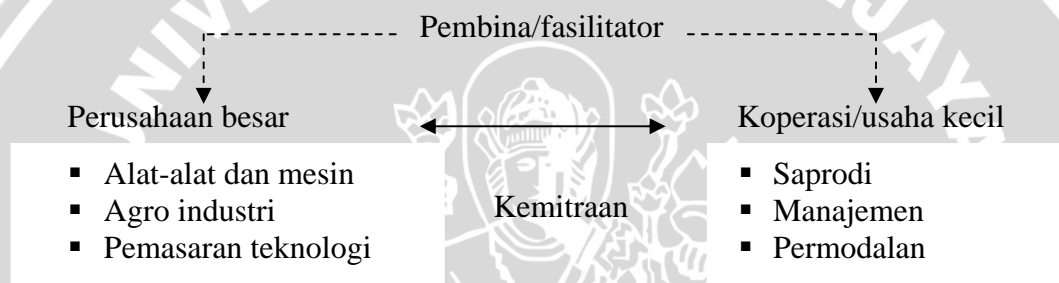
Pada pola kemitraan sederhana pengusaha besar mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha kecil dalam kemudahan memberikan permodalan untuk mengembangkan usaha, menyediakan saprodi yang dibutuhkan, menyediakan sumbangan alat (alat mesin) untuk meningkatkan produksi dan mutu produksi. Sedang bagi pengusaha kecil berkewajiban untuk memasok hasil produksi pada perusahaan besar.



Gambar 1: Pola Kemitraan Tingkat Pemula, (Hafsa, 2000).

2. Pola Kemitraan Tingkat Madya.

Merupakan pengembangan pola kemitraan sederhana dimana peran usaha besar terhadap usaha kecil semakin berkurang. Bantuan pembinaan usaha besar masih sangat diperlukan terutama dalam bantuan teknologi, alat mesin yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan mutu produksi, industri pengolahan (agroindustri) serta jaminan pemasaran. Pada kemitraan tingkat madya digambarkan sebagai berikut:

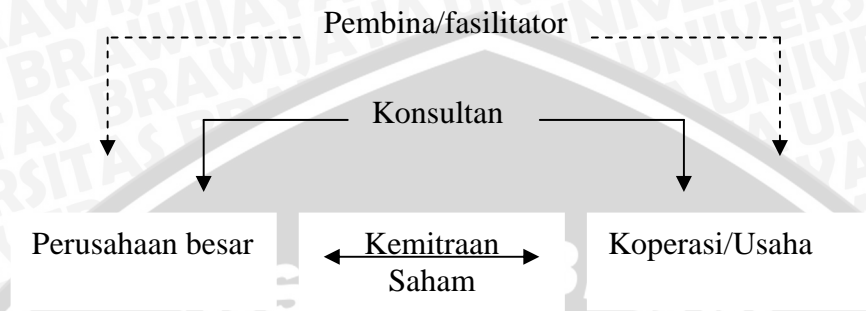


Gambar 2: Pola Kemitraan Tingkat Madya, (Hafsah, 2000).

3. Pola Kemitraan Tingkat Utama.

Merupakan pola kemitraan yang paling mudah dikembangkan tapi membutuhkan prasyarat yang cukup berat bagi pihak yang bermitra khususnya pihak usaha kecil, karena pola ini membutuhkan kemampuan penguasaan manajerial usaha yang memadai serta pengetahuan bisnis yang luas. Dalam pola ini pengusaha kecil secara bersama-sama berbagi modal dalam menanamkan modal pada perusahaan besar mitranya. Kepemilikan saham pada perusahaan besar ini memungkinkan adanya rasa saling memiliki terhadap perkembangan usaha perusahaan besar mitranya, demikian pula perusahaan besar mempunyai tanggungjawab yang besar dalam

mengembangkan perusahaan agar dapat maju dengan cepat. Adapun gambar dari pola kemitraan tingkat utama adalah sebagai berikut :



Gambar 3: Pola Kemitraan Tingkat Utama, (Hafsah, 2000)

Berdasarkan sumber pengaturan permodalan Linton dalam Hafsah (2000) membedakan pola kemitraan menjadi:

1. Kerjasama Dengan Sistem Bagi Hasil

Merupakan kerjasama antar dua pihak yaitu petani atau koperasi dengan perusahaan pembimbing dengan perhitungan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sumber permodalan dalam kerjasama ini berasal dari perusahaan pembimbing yang berupa saprodi pertanian berupa pupuk, bibit dan obat-obatan atau kadang ditambah dengan biaya pengolahan tanah, pemeliharaan hingga panen.

2. Kerjasama Dengan Sistem Kredit Koperasi

Dalam kerjasama sistem kredit koperasi, diperlukan kerjasama antara tiga pihak. Perusahaan, koperasi dan perbankan. Sistem ini hanya bisa dilakukan dalam ikatan koperasi dengan ketentuan bahwa koperasi mampu bertindak sebagai koordinator dan telah terbebas dari kredit lamanya.

3. Kerjasama Sistem Komersial

Dalam pola ini terdapat kerjasama antara tiga pihak, yaitu perusahaan, petani dan koperasi. Dalam hal ini perusahaan dengan koperasi bekerjasama dalam hal pemasaran hasil produksi dan pembinaan teknis.

4. Kerjasama Melalui Laba BUMN

Petani menjadi anggota koperasi sebagai golongan ekonomi lemah berhak mendapatkan bimbingan dalam hal peningkatan modal kerja dan peningkatan hasil. Koperasi atas nama petani, dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk sarana produksi dari BUMN. Kerjasama terjadi antara pihak petani atau koperasi dengan perusahaan BUMN dan perusahaan pembimbing. Adapun tugas dari perusahaan pembimbing adalah melayani saprodi yang dibutuhkan oleh petani, memberikan bimbingan teknis usahatani serta menampung hasil produksi petani.

Berdasarkan jangka waktunya pola kemitraan dapat dibedakan menjadi:

1. Kemitraan Insidental

Adalah bentuk kemitraan yang didasari atas kepentingan ekonomi bersama dalam jangka pendek dan akan dihentikan jika kegiatan yang bersangkutan telah selesai. Kemitraan jenis ini dijalin dengan atau tanpa kesepakatan kerja dan kontrak kerja.

2. Kemitraan Jangka Menengah

Adalah bentuk kemitraan berdasarkan motif ekonomi dalam jangka menengah atau musim produksi tertentu. Kemitraan seperti ini dapat dilakukan dengan

atau tanpa perjanjian tertulis. Contoh dari kemitraan ini adalah Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

3. Kemitraan Jangka Panjang dan Terus Menerus

Kemitraan jenis ini dilakukan dalam jangka panjang dan terus menerus dalam skala besar dengan perjanjian tertulis. Kemitraan didasari saling ketergantungan dalam hal pengadaan bahan baku, permodalan, manajemen dan yang lainnya. Contoh dari kemitraan model ini adalah Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI).

Berdasarkan jalinan kerjasamanya kemitraan dapat dibagi dalam :

1. Model kontrak kerja dalam model ini petani/koperasi dan perusahaan agribisnis menjalin hubungan kerjasama dengan melakukan kontrak kerja baik dalam penyediaan sarana produksi dari perusahaan maupun jaminan pemasaran hasil produksi petani dan perusahaan. Dengan demikian kegiatan perusahaan terbatas hanya pada proses pengolahan dan pemasaran komoditas yang dihasilkan.
2. Model kontrak manajemen bentuk kemitraan ini berupa bantuan manajemen usahatani seperti koperasi jasa.
3. Model unit pelaksanaan proyek merupakan proyek pemerintah yang diterapkan kepada petani dalam hal pembentukan usaha agribisnis.
4. Model perusahaan inti rakyat, yaitu model kemitraan yang menyertakan petani sebagai plasma dan perkebunan/perusahaan besar sebagai penyedia sarana produksi pengolahan lahan pemasaran dan pelayanan teknis.

5. Model perusahaan petani merupakan hubungan kerjasama yang terjadi karena adanya kesulitan permodalan.
6. Model petani terpadu model ini hampir sama dengan model perusahaan petani tapi pihak perusahaan tetap mempunyai saham diperusahaan tersebut (Anonymous, 1995)

2.3.3 Manfaat dan Tujuan Kemitraan Usaha

2.3.3.1 Manfaat

Pola kemitraan yang dilakukan harus dapat mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya pada :

1. Petani : Dalam hal tertentu petani dapat diperlukan dari segi permodalan, saprodi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha taninya selain itu ada usaha jaminan pemasaran hasil yang pasti dengan harga yang layak sesuai dengan kesepakatan.
2. Perusahaan : tersedianya bahan baku yang relatif cukup dari sumber para petani mitra usahanya, selain itu dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya maka efisiensi perusahaan dapat ditingkatkan yang produktivitas keuntungan perusahaan dapat meningkat juga.
3. Pemerintah : dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pedesaan dengan berkembangnya usaha tani dan perusahaan baik usaha budidaya maupun agroindustri, selain itu juga dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai dampak dari pendapatan baik dari usahatani maupun dari perusahaan pertanian (Anonymous, 1995).

2.3.3.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pola kemitraan antara perusahaan besar dan petani adalah:

1. Membantu meningkatkan produksi dalam program swasembada pangan.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta memperluas kesempatan kerja.
3. Memberi kepastian pada petani dalam membesarkan produksinya dengan jaminan harga yang wajar.
4. Mempercepat alih teknologi maju perusahaan besar pada petani dan meningkatkan efisiensi perusahaan pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya.
5. Mengikutsertakan modal swasta dalam pembangunan pertanian.

2.3.4 Prinsip Kemitraan

Kemitraan akan dapat berjalan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan jika memperhatikan beberapa dasar kemitraan, yaitu:

1. Adanya pelaku-pelaku kemitraan. Yang dimaksud pelaku kemitraan adalah petani, kelembagaan petani (kelompok tani), pengusaha, perusahaan dan pemerintah. Sebagai pelaku utama adalah petani dan perusahaan pertanian yang akan melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha sedangkan pemerintah berfungsi sebagai pembina.
2. Adanya kebutuhan dan kepentingan bersama. Motivasi kemitraan adalah adanya kebutuhan dan kepentingan bersama dari pelaku-pelaku bisnis yang dilandasi kepentingan bisnis.

3. Adanya keterkaitan dan kerjasama yang seimbang, wajar, serasi dan harmonis yang saling menguntungkan antara pelaku agribisnis dalam pengadaan saprodi, produksi, pengolahan dan pemasaran serta faktor-faktor penunjang usaha. Hal ini bertujuan untuk memperkuat struktur usaha, proses tawar menawar dan kesamaan visi. (Anonymous dalam Rusdiana 2003).

2.3.5 Kategori Kemitraan

1. Baik : Apabila posisi petani seimbang menghadapi mitra usaha dan pola bapak angkat dilaksanakan dengan baik, yaitu pembinaan, penyediaan input, sampai pemasaran hasil, hak dan kewajiban jelas dilaksanakan dan para petani dengan koordinasi kelompok tani atau koperasi melaksanakan keterkaitan usaha.
2. Cukup: Apabila posisi petani lemah menghadapi mitra usaha dan pola bapak angkat tidak utuh dilaksanakan, hak dan kewajiban jelas tetapi tidak untuk dilaksanakan dan para petani tidak disertai koordinasi dengan kelompok tani atau koperasi.
3. Kurang : apabila posisi petani sangat lemah menghadapi mitra usaha dan pola bapak angkat tidak utuh dilaksanakan, hak dan kewajiban tidak jelas serta petani tidak disertai dengan koordinasi dengan kelompok tani atau koperasi (Anonymous dalam Rusdiana 2003).

2.4 Kemitraan dalam Industri Gula Nasional

Sejak abad 15 dimana tanaman tebu diusahakan di Pulau Jawa dan tebu ditanam pada lahan petani dengan sistem yang berbeda-beda. Tidak semua perusahaan berhasil memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) sehingga perusahaan harus menyewa lahan milik petani dan hal ini terus berlangsung hingga kemerdekaan 1945.

Dilihat dari produksinya, sistem sewa ini cukup memberikan keuntungan. antara lain pengolahan tanaman tebu yang sepenuhnya ditangani oleh pabrik gula memungkinkan penerapan teknik budaya secara optimal sehingga peluang untuk mencapai hasil panen yang tinggi lebih besar. Tetapi dilain pihak, petani tidak merasakan manfaatnya karena harga sewa telah ditetapkan dan petani tidak berkesempatan mengelola lahan mereka dalam waktu yang lama sehingga berkesan hanya sebagai buruh tani pada lahan mereka sendiri.

Oleh karena itu sejak tahun 1975 kerjasama itu dirubah dari sistem sewa tanah menjadi kerjasama dengan asas manfaat. Inpres No.5 tahun 1975 tersebut bertujuan (1) mengalihkan pengusahaan tanaman tebu dari sistem sewa oleh pabrik gula menjadi petani tuan rumah ditanah milik sendiri (2) meningkatkan produksi dan produktivitas lahan dengan menerapkan intensifikasi pada tebu rakyat yang pelaksanaannya dikelola sebagai sistem BIMAS (3) menetapkan tugas dan peran pabrik gula sebagai pimpinan kerja lapang dalam pelaksanaan alih teknologi budidaya tebu kepada petani guna mencapai produktivitas tinggi disertai pelayanan saprodi yang tepat.

Tujuan dari Inpres No.9/1975 adalah menjadikan industri gula sebagai bagian integral pembangunan nasional dengan memberikan dampak terhadap peningkatan produksi menuju swasembada gula nasional, tetapi juga sekaligus meningkatkan harkat dan martabat petani menjadi mitra kerja/mitra usaha yang sepadan dan serasi bagi pabrik gula, guna secara lebih nyata dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan pendapatan sekalipun pada masa itu kerjasama tersebut dapat populer sebagai kemitraan usaha. Inpres ini hakekatnya titik awal dari penerapan konsepsi kemitraan usaha.

Dengan Inpres tersebut sempat memacu peningkatan produksi gula dari 1,0 juta ton pada tahun 1975 meningkat menjadi 1,7 ton di tahun 1985 dan 2,5 juta ton pada tahun 1984. Sekalipun sebetulnya produksi gula nasional pernah meningkat relatif cepat dalam periode 1980-an, akan tetapi sempat terjadi peningkatan yang lambat sekali dalam periode awal 1990-an, bahkan produksi gula cenderung terus menurun setelah tahun 1994. Peningkatan produksi gula yang terjadi selama ini adalah berasal dari perluasan areal tebu, bukan dari peningkatan produktivitas. Areal tebu cenderung meningkat sampai tahun 1994 dan menurun setelahnya.

Setelah 23 tahun pelaksanaan TRI masih saja muncul permasalahan yang menyangkut kredit, lahan, kultur teknis dan saprodi. Petani baik perorangan maupun kelompok masih belum mempunyai kemauan keras untuk mengelola usaha mereka dengan baik dan menggunakan kultur teknis yang tepat untuk meningkatkan kualitas tebu dan rendemen karena sebelumnya petani tidak pernah menanam tebu sehingga alih teknologi dari pabrik gula ke petani belum tercapai.

Produktivitas tebu menjadi semakin merosot demikian halnya dengan kualitas rendemennya. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan dari program TRI semakin sulit dicapai. Disamping itu timbul masalah baru berupa semakin menyempinya areal tanaman tebu TRI.

Pada awal era reformasi pemerintah mengeluarkan paket kebijaksanaan dengan diterbitkannya Inpres No. 5/1997 dan Inpres No. 5/1998 yang dapat menggantikan Inpres No. 9/1975 dengan dilandasi Undang-undang No. 12/1992 dimana petani diberi kebebasan memilih komoditi yang akan diusahakannya. Pengembangan TRI yang selama Inpres No. 5/1998 diganti dengan sistem kemitraan. Pelaku ekonomi inti dalam industri gula adalah petani, koperasi tani dengan pabrik gula dalam bentuk usaha kemitraan dengan *win-win solution*, yang didukung oleh fasilitasi pemerintah dalam bentuk kebijaksanaan pendanaan dan fiksial. Fasilitasi pemerintah tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi gula nasional melalui peningkatan produktivitas yang efisien di tingkat *on farm* maupun *off farm* atau dari hulu ke hilir dengan menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing tinggi, berkerakyatan, berkesinambungan dan dilaksanakan dengan desentralisasi sehingga dapat bersaing dengan gula di pasar internasional.

Bentuk kemitraan antara petani dengan pabrik gula disesuaikan dengan kondidi masing-masing daerah, pada umumnya terdapat empat kategori sebagai berikut :

1. Kerjasama Usahatani Tebu Rakyat (KSU-TR) adalah kerjasama saling menguntungkan dalam melaksanakan usahatani tebu rakyat antara petani/kelompok tani, koperasi dan pabrik gula yang dilaksanakan pada

kondisi tertentu guna menunjang keberhasilan program, dengan memanfaatkan KKP-TR kemitraan.

2. Tebu Rakyat Murni yaitu tebu rakyat yang dikembangkan oleh petani dengan memanfaatkan KKP-TR Murni, dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasil oleh perusahaan mitra.
3. Tebu Rakyat Mandiri yaitu tebu rakyat yang dikembangkan oleh petani tebu secara swadaya dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasilnya oleh perusahaan mitra.
4. Sewa lahan adalah kesepakatan bahwa petani pemilik lahan menyewa lahannya pada pabrik gula untuk ditanami tebu dalam jangka waktu dan persyaratan tertentu.

Ditinjau dari hakekat kemitraan maka kategori yang tergolong kerjasama usahatani tebu rakyat, tebu rakyat murni dan tebu rakyat mandiri yang dapat dikategorikan berada dalam bentuk kemitraan. Sedangkan yang termasuk sewa lahan sesungguhnya bukan untuk kemitraan, melainkan hanya merupakan hubungan sewa menyewa. Kategori kerjasama usaha tebu rakyat, ditinjau dari tata hubungan kerjanya pinjaman pabrik gula berada pada posisi peralihan dari perusahaan pengelola menjadi perusahaan penghela, karena fasilitas kredit disediakan oleh pihak bank atau jaminan pabrik gula. Sedangkan pada kategori tebu rakyat murni dan tebu rakyat mandiri, posisi pabrik gula adalah sebagai perusahaan penghela.

Petani yang dikategorikan sebagai petani tebu mandiri, adalah petani yang memiliki lahan luas, punya kemampuan dari segi permodalan, berpendidikan

formal cukup, berjiwa *interpremanship* mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam menjalin hubungan kerjasama (kemitraan) dengan pabrik gula, mempunyai akses terhadap penggilingan gula merah, gula tumbuk dan lain-lain di pedesaan. Bila demikian adanya, produktivitas tebu dan rendemen akan tercapai serta penggunaan alat dan mesin pertanian ke arah pengembangan tebu ke lahan kering akan besar. Golongan ini adalah para penyewa lahan, atau petani berlahan sempit yang bergabung dalam kelompok kolektif dan *coporate farming*.

Petani yang dikategorikan sebagai petani tebu murni, tidak terikat kuat dengan pabrik gula tergambar dalam upaya memperoleh kredit dari pihak bank, tumbuh sebagai kelompok koperatif juga merupakan pemasok tebu bagi pabrik gula merah, gula tebu dan lain-lain di pedesaan, mempergunakan fasilitas kredit dari pihak bank dengan akses penjualan tebu berdasarkan pasar, terkecuali pabrik gula mampu menempatkan diri sebagai penghela. Dengan terbukanya akses penjualan tebu ke berbagai jenis pabrik gula, pengembalian kredit bagi kelompok ini membutuhkan pendekatan yang tersendiri, kelompok ini berpotensi sebagai penunggak kredit. Karena itu pula metode penyuluhan pada golongan ini lebih dititikberatkan pada pendekatan partisipatif, serta peranan koperasi, baik koperasi primer dan sekunder akan sangat diharapkan guna mendorong tumbuh dan berkembangnya golongan ini.

Petani dari kategori kerjasama usah tani tebu rakyat, pada saat ini golongan petani ini lemah dalam segi permodalan dan sangat tergantung penjualan tebunya pada pabrik gula. Golongan petani tersebut ini berada dalam golongan terbesar dari pengembangan tebu rakyat. Dan kelompok ini yang

memerlukan kredit murah dan kalau pabrik gula diperlukan sebagai avalist, maka kelompok ini relatif kecil menjadi penugggak pengembalian kredit.

2.4.1 Kemitraan dalam Tebu Rakyat

Industri gula Di Indonesia dimulai pada abad ketujuh belas ketika VOC mengusahakan kira-kira 100 perkebunan gula disekitar Batavia ketika VOC dibubarkan pada akhir abad 18 Pemerintah Hindia Belanda selanjutnya bersama hal-hal yang lain serupa untuk meningkatkan penanaman tebu dan mengekspor gula dalam rangka Cultur Stelsel. Dengan Cultur Stelsel ini petani diharuskan untuk menanam tebu atau tanaman perdagangan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah diatas tanah mereka. Tahun 1882 didirikan NHM (Nederland Handels Matshepijs) untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha gula yang kemudian pada tahun 1830 Jenderal Van Der Bosch menerapkan tanam paksa, dimasa rakyat Indonesia harus menyerahkan 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanam tanaman yang laku dipasaran Eropa termasuk tanaman tebu. Dalam undang-undang sewa tanah pada tahun 1919 sewaan dibayar oleh pabrik gula untuk masa padi dan salah satu musim palawija. Peraturan 1919 tetap berlaku juga setelah Indonesia merdeka dengan mengalami perubahan yang dibuat sebagai Undang-undang darurat tahun 1925 untuk menghapuskan apa yang berbau kolonialisme. Periode penyewaan 25 tahun dihapus diganti dengan sewa tahunan atau musiman dan penyewaan minimum yang ditinjau kembali 5 tahun dengan rangkaian penyewaan yang ditetapkan tiap tahun atas persetujuan menteri pertanian. Kesulitan dari sistem ini adalah :

1. Inflasi, bahkan sewaan yang ditetapkan pada permulaan periode 16 bulan masih diperbaiki.
2. Tekanan kepadatan penduduk atas tanah yang makin mendesak yang berarti meningkatkan jumlah beras dan makanan lainnya yang dibutuhkan oleh petani (Mubyarto, 1984).

Sejak adanya Inpres No. 9 tahun 1975 maka telah terjadi perubahan dalam industri gula di Indonesia dimana terjadi pemisahan pengelolaan antara kegiatan produksi tebu dan sistem pengelolaan. Dalam kegiatan produksi tebu sepenuhnya oleh petani dan sistem pengelolaan antara kegiatan produksi tebu dan sistem pengelolaan tebu menjadi gula dilakukan oleh pabrik gula sehingga terbentuklah sistem TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi). Hal ini berarti bahwa dengan dilaksanakannya Program TRI juga menyebabkan perubahan struktur penguasaan tebu dari pengelola yang sepenuhnya oleh pabrik gula yang berskala besar menjadi usahatani yang berskala kecil dikelola oleh ratusan petani. Pada saat ini pemerintah masih ikut campur dengan program tersebut salah satunya dengan memberikan bantuan dana sejak zaman reformasi pada tahun 1999 program tersebut diganti nama TRK terikat kontrak kerja antara petani KUD dan PG untuk perusahaan keuangannya diusahakan oleh PG dengan peminjaman kredit pada bank sistem ini berlangsung sampai saat ini.

Berdasarkan penelitian Prasetyani (2004) petani dari kategori tebu rakyat, pada saat ini petani dari golongan ini lemah dalam segi permodalan dan sangat tergantung penjualan tebunya pada pabrik gula. Sehingga petani ini memerlukan kredit murah dan pabrik gula bertindak sebagai *avalist* (penjamin kredit).

Pabrik Gula (PG) Pesantren Baru merupakan penghasil gula kristal putih yang terletak di Kediri. Sejak tahun 1964 PG. Pesantren Baru telah sepenuhnya menggiling tebu rakyat dengan menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan kedua pihak. Hubungan pabrik gula dengan petani diwakili oleh sebuah badan yaitu KUD atau koperasi yang bekerjasama atas dasar kepentingan bersama. Tebu Rakyat Kemitraan (TRK) adalah bentuk kerjasama antara PG. Pesantren Baru dengan petani dalam rangka meningkatkan produktivitas usahatani tebu dengan menerapkan teknologi sehingga meningkatkan produksi gula dan pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja, penghematan dan peningkatan devisa serta mempertahankan kelestarian sumberdaya alam.

2.4.2 Tinjauan Tentang Tebu Rakyat Kemitraan

Kemitraan antara rakyat dengan swasta dibidang pertanian sangat efisien, dimana rakyat menjadi produsen yang produksinya ditampung dan diolah pihak swasta menjadi produk yang sempurna sehingga dapat dipasarkan. Modernisasi pertanian rakyat akan mudah maju apabila kerjasama petani dengan swasta diperluas sehingga pihak swasta tidak hanya menampung dan mengolah hasil tanaman rakyat tetapi juga menyediakan input kredit dan bantuan lain yang dapat meningkatkan usahatani.

Kemitraan adalah hubungan bisnis antara petani dengan pengusaha yang saling menguntungkan dengan membentuk kerjasama sistem kontrak atau perjanjian tertulis tertentu yang telah disepakati bersama. Unsur-unsur yang bermitra adalah (1) petani sebagai mitra tani yang menghasilkan produk pertanian (2) lembaga formal seperti KUD, BUMN dan swasta (3) industri pengolah dan

usaha pemasaran yang menampung hasil dari mitra, (Syafi'i dalam Lestari 2002). Wilson dalam Sukei (2002) menjelaskan bahwa tebu rakyat merupakan suatu system pertanian kontrak (*contract farming*), hal ini merupakan penerobosan pola kapitalisme dalam bidang pertanian. Dalam sistem pertanian kontrak, terdapat kesepakatan antara pihak pengontrak dengan petani yang dikontrak dibawah perjanjian yang telah disepakati bersama. Pengontrak membutuhkan faktor produksi berupa tanah dan tenaga kerja, sedangkan petani kontrak mendapatkan kemudahan dalam memperoleh input produksi dan pemasarannya.

PG. Pesantren Baru merupakan suatu perusahaan yang mengelola tebu menjadi kristal gula. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tebu, PG. Pesantren Baru mendapatkan dari petani tebu, sedangkan petani juga membutuhkan pabrik untuk menggiling tebu mereka. Berawal dari hal inilah maka terjalin kerjasama antara PG. Pesantren dengan petani yang berupa TRK (Tebu Rakyat Kemitraan). Tujuan dari TRK yaitu:

1. Mengalihkan pengusahaan tanaman tebu untuk produksi gula dari sistem sewa menjadi petani sebagai tuan tanah dilahan sendiri.
2. Meningkatkan produksi gula nasional.
3. Meningkatkan pendapatan para petani anggota TRK.

Tidak semua petani yang ada diwilayah kerja PG. Pesantren Baru dapat menjadi anggota TRK. Petani tebu dapat menjadi anggota TRK apabila petani tersebut menjadi anggota salah satu kelompok tani. Prasetyani (2004), menyatakan bahwa salah satu syarat petani dapat menjadi anggota TRK adalah wajib mengajukan daftar nominatif dan biaya kebun TRK atau yang lebih dikenal

dengan RDKK (Rencana Definitif Kerja Kelompok). RDKK ini dilakukan secara kolektif dan dikoordinir melalui ketua kelompok taninya masing-masing.

Peran kelompok tani sangat penting dalam TRK yaitu dalam mempercepat transfer teknologi maupun penyaluran kredit dan sarana produksi. Tetapi pada umumnya, para petani masuk kedalam kelompok tani dengan pertimbangan utama kemudahan memperoleh kredit daripada kemudahan dalam adopsi teknologi.

Anonymous (1987) mengungkapkan syarat petani tebu menjadi peserta kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanah yang mengusahakan tanaman tebu pada tanah milik sendiri.
2. Pemegang hak garap atau tanah jabatan *bengkok* yang mengusahakan tebu.
3. Penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik tanah atau pemegang hak garap atas tanah, jabatan garapan termasuk tanah sendiri, dan tidak lebih dari 2 ha.

Dengan tergabungnya petani tebu dalam suatu kelompok tani maka akan mempermudah dalam melakukan koordinasi dengan pabrik gula maupun dengan koperasi atau KUD.

Sedangkan menurut Manurung dan Rahmat dalam Prasetyani (2004) menyatakan bahwa (1) para petani tebu sering berpindah kelompok untuk memperoleh kemudahan kredit daripada tujuan lain misal mendapatkan transfer teknologi, pada tebu tanaman pertama mereka masuk kelompok kolektif karena pekerjaan lebih berat dan biaya lebih mahal, kemudian pada tanaman keprasaan (adalah sistem pergantian tanam tebu dengan jalan tidak membongkar sisa tebang

dan memelihara tunas-tunas yang tumbuh) mereka beralih ke kelompok kooperatif, karena pada umumnya biaya usahatani keprasan lebih murah dan mudah pengelolaannya termasuk kebebasan dalam menjual tebuinya (2) kelompok individu lebih dominan jumlahnya yaitu mencapai 46% pada tahun 1992/1993 yang memberi indikasi bahwa petani lebih senang mengelola tebuinya sendiri karena bebas dalam menjual tebuinya.

2.4.3 Perumusan Hak dan Kewajiban Dalam Tebu Rakyat Kemitraan

Kemitraan yang terjalin antara pabrik gula dan petani tebu mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pabrik Gula Pesantren Baru
 - a. Hak Pabrik Gula Pesantren Baru
 1. Melakukan pengawasan pada petani binaan.
 2. Menentukan waktu panen.
 3. Mendapatkan tebu sesuai standar kualitas.
 4. Mendapatkan bagi hasil gula.
 5. Memotong pendapatan petani.
 - b. Kewajiban Pabrik Gula Pesantren Baru
 1. Menyediakan fasilitas berupa saprodi.
 2. Memberikan penyuluhan kepada para petani.
 3. Menggilingkan tebu petani.
2. Petani Tebu
 - a. Hak petani tebu
 1. Mendapatkan fasilitas saprodi dengan mudah.

2. Mendapatkan pembinaan dengan baik.
 3. Mendapatkan uang hasil panen dengan jumlah yang disepakati dan tepat waktu.
 4. Petani mendapatkan jaminan pemasaran.
- b. Kewajiban petani tebu
1. Menyediakan lahan.
 2. Melaksanakan semua bimbingan teknis.
 3. Hanya menggilingkan tebu hasil panennya ke PG. Pesantren Baru.
 4. Mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama.

Sukei (2002) mengungkapkan bahwa dalam hubungan kerjasama yang terjadi antara petani tebu dengan pabrik gula adalah petani tebu bertugas menyediakan bahan baku produksi gula dan bertanggung jawab mulai dari penanaman sampai dengan tebang. Disisi lain petani berhak memperoleh kredit produksi, bimbingan teknis dari pabrik gula, tebang angkut dan penggilingan serta menerima uang pembayaran dari pabrik gula. Sedangkan pabrik gula adalah pihak yang mempunyai fungsi pengolahan tebu menjadi gula. Karena kemampuan teknis pabrik gula dalam pengusahaan tebu sejak belum ada TRI, maka pabrik gula juga mempunyai kewajiban (1) menyediakan bibit unggul (2) memberikan rekomendasi pengajuan kredit, penyaluran saprodi dan pelayanan kredit (3) membimbing petani dalam pelaksanaan tanam mulai awal hingga tebang giling (4) menentukan jadwal tebang giling (5) melakukan penimbunan tebu dan menentukan rendemen (6) menyalurkan gula ke Bulog dan membayarkan uang bagian gula petani melalui KUD/Koperasi.

2.4.4 Bagi Hasil Gula Dalam Tebu Rakyat Kemitraan

Anonymous dalam Midanto (1995) mengungkapkan bahwa hasil gula dipengaruhi oleh rendemen tebu. Perhitungan rendemen tebu didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian/ Ketua Badan Pengendali Bimas No. 013/ SK Mentan/ BPB/ 3/ 1976 dan No. 126/ Kpts/ Um/ 3/ 1980. Perhitungan rendemen didasarkan pada 2 tahap, yaitu:

1. Tahap pertama adalah rendemen belum terkoreksi yang diumumkan pada pemilik tebu sebagai rendemen sementara, yaitu langsung pada saat pemasukan tebu kedalam Pabrik Gula.
2. Tahap kedua adalah rendemen terkoreksi yang diumumkan kepada pemilik tebu sebagai rendemen yang sebenarnya.

Ketentuan bagi hasil gula tebu ditetapkan sebagaimana seperti yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. 017/ SK I/ Mentan/ BPB/ 1987 Juncto No. 05/ SK Mentan/ Bimas/ IV/ 1990.

Dalam bagi hasil gula tebu antara Pabrik Gula Pesantren Baru dan Petani Tebu Rakyat Kemitraan menggunakan perbandingan 66% : 34% untuk rendemen 6 dan kurang dari 6. Perbandingan 70% : 30% untuk rendemen lebih dari 6. Maka pembagian hasil dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Gula bagian petani} = \frac{66}{100} \times 6 \times \text{kwt tebu} \times \text{harga gula}$$

$$\text{Gula bagian pabrik gula} = \frac{34}{100} \times 6 \times \text{kwt tebu} \times \text{harga gula}$$

Apabila rendemen diatas 6 maka digunakan pembagian sebagai berikut:

$$\text{Gula bagian petani} = \frac{70}{100} \times (\text{rendemen}-6) \times \text{kwf tebu} \\ \times \text{harga gula}$$

$$\text{Gula bagian pabrik gula} = \frac{30}{100} \times (\text{rendemen}-6) \times \text{kwf tebu} \\ \times \text{harga gula}$$

2.4.5 Mekanisme Perencanaan Kemitraan

Tahap perencanaan dalam program Tebu rakyat Kemitraan meliputi merencanakan isi dari kredit TRK pada kontrak antara petani dengan PG Pesantren Baru yaitu perjanjian (antara KUD petani dan PG), menyerahkan Rencana Defenitif Kelompok, pemeriksaan lahan oleh PG, pencairan pupuk pada petani, PG melakukan pengawasan pemupukan, mencairkan dana, dan penebangan.

2.4.6 Mekanisme Pelaksanaan kemitraan

Tahap pelaksanaan meliputi pengolahan lahan, penanaman tebu, pemupukan pemeliharaan tanaman tebu terhadap hama, penyuluhan tentang tebu, penebangan dan pengangkutan, penggilingan. Petani Tebu Rakyat Kemitraan dalam kegiatan teknis budidaya budidaya taman tebu bertindak sebagai pengelola atas usahatani tebu mereka dengan mendapatkan bimbingan teknis dan pengawasan dari petugas lapang pabrik gula. Pihak pabrik gula melalui petugas lapangnya mengadakan pemantauan secara rutin pada petani TRK sehingga dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan budidaya tanaman tebu. Penyuluhan atau

bimbingan teknis diadakan secara rutin sesuai wilayah kerayonan. Bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas lapang tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengarahan kepada petani mengenai teknis budidaya dan sebagai transfer teknologi seperti pengenalan bibit unggul varietas baru atau demo tentang pestisida baru.

2.4.7 Mekanisme Evaluasi Kemitraan

Menentukan tujuan akhir suatu program merupakan suatu proses yang terdiri dari tahapan-tahapan. Dengan adanya pentahapan tersebut mungkin dalam kurun waktu tertentu proses yang dimaksud berhenti. Adapun yang menjadi objek evaluasi adalah hasil yang dicapai pada suatu tahapan. Tujuannya adalah sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut apakah proses perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya atau berhenti sampai disitu saja.

Mardikanto dalam Asmiati (2002), mengungkapkan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran dan penilaian atas suatu keadaan peristiwa atau kegiatan yang sedang diamati, dimana evaluasi tersebut didasarkan atas kebenaran data dan fakta serta berpedoman pada kriteria atau tolak ukur. Lebih lanjut Arikunto dalam Asmiati (2002) menjelaskan evaluasi adalah rangkaian kegiatan mengukur dan menilai yang dilakukan secara sengaja untuk berpendapat evaluasi dilakukan untuk menilai sejauhmana usaha-usaha yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan program yang telah ditetapkan atau tidak.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi dalam pelaksanaan kemitraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penilaian apakah kemitraan tersebut sudah dapat mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, disamping itu untuk memberi penilaian apakah hak dan kewajiban antara petani dan pabrik gula sudah dilaksanakan secara seimbang.

Dalam kegiatan akan ditemukan 1 dari 3 bentuk temuan yaitu (a) hasil yang dicapai melebihi harapan dan target (b) hasil sama dengan target (c) hasil yang dididapai kurang dari harapan dan target.

Menurut Soedarmanto (1985) berdasarkan waktunya evaluasi dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Evaluasi formatif : yaitu mengukur perkembangan dan kemampuan seseorang sepanjang berlangsungnya suatu unit pelajaran.
- b. Evaluasi sumatif : merupakan penjumlahan pengukuran keberhasilan seorang dalam mengikuti suatu unit pelajaran dan dilaksanakan pada akhir pelajaran.

2.5 Tinjauan Tentang Faktor-Faktor Sosial Ekonomi

Suatu program pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dengan fasilitator dari pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dalam implementasinya kadang tidak selancar yang diharapkan.

Suatu teknologi baru tidak langsung dapat diterima oleh petani. Dalam mengambil keputusan, petani mengambil resiko jika langsung memutuskan mengambil atau tidak suatu teknologi baru yang diberikan oleh penyuluh. Maka perlu adanya suatu proses dimana suatu ide baru menyebar dari sumber penemunya atau ciptaannya kepada pemakainya yang terakhir atau orang-orang yang mengadopsi biasanya disebut dengan proses difusi (Soekartawi, 1988).

Difusi berarti menyebarkan inovasi dari seseorang yang telah mengadopsi inovasi tersebut kepada orang-orang lain dalam masyarakat.

Menurut Rogers dalam Soekartawi (1988), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi inovasi yaitu terdiri dari:

A. Faktor Sosial

- a. Anggota keluarga sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menerima suatu inovasi.
- b. Tetangga banyak berperan dalam proses difusi inovasi. Belajar dari tetangga biasanya lebih berhasil baik daripada belajar pada orang lain (sumber informasi) yang tempat tinggalnya berjauhan.
- c. Klik sosial adalah sebagian atau sejumlah kecil orang yang mau menerima sebuah inovasi dalam menjalin kebersamaan.
- d. Kelompok referensi adalah kelompok yang dijadikan contoh oleh orang atau kelompok lain dalam pembentukan penilaian, perilaku, keputusan terhadap suatu inovasi.
- e. Kelompok formal ialah kelompok orang-orang yang mempunyai peraturan yang tegas, yang mengatur hubungan semua anggotanya. Kelompok ini dapat berperan untuk mengorganisasi penyebaran inovasi.
- f. Status sosial yang sama akan mempengaruhi kecepatan difusi inovasi karena komunikasi yang terjadi pada orang-orang yang status sosialnya sama biasanya lebih efektif.

B. Faktor Kebudayaan

Unsur kebudayaan sangat berpengaruh dalam proses difusi inovasi. Kebudayaan yang terbuka terhadap pengaruh budaya lain yang dalam hal ini adalah masuknya inovasi dapat mempercepat proses difusi inovasi.

C. Faktor Personal

- a. Umur, petani yang lebih tua tampaknya cenderung kurang melakukan difusi inovasi. Pertimbangan-pertimbangan seperti kesehatan dan kekuatan yang sudah menurun dan ingin menikmati masa tua, mungkin memaksa mereka untuk tidak melakukan difusi inovasi. Sedangkan petani yang masih dalam usia muda biasanya ingin membuat perubahan di dalam bidang usahatani.
- b. Pendidikan dapat menciptakan suatu dorongan mental untuk menerima inovasi yang menguntungkan.
- c. Karakteristik psikologi dari petani akan mempengaruhi difusi inovasi yang diakibatkan oleh kesiapan mental petani yang fleksibel dalam menerima inovasi.

D. Faktor Situasional

- a. Pendapatan usahatani yang tergolong tinggi akan memberikan kemudahan petani dalam menyediakan modal untuk mengadopsi sebuah inovasi.
- b. Ukuran usahatani yang cukup besar akan membutuhkan inovasi baru dalam pengelolaannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang tinggi pula.
- c. Status kepemilikan tanah, dalam hal ini para pemilik tanah dapat menentukan keputusan untuk mengadopsi inovasi sesuai dengan keinginannya, sedangkan penyewa sering harus mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah sebelum mencoba atau menggunakan inovasi yang akan ia praktekkan.

- d. Prestise masyarakat yang semakin baik diharapkan dapat terus mendifusikan inovasi.
- e. Sumber inovasi yang semakin banyak akan menyebabkan proses difusi inovasi akan semakin baik pula.
- f. Jenis inovasi yang tergolong sederhana biasanya akan mudah dicerna oleh petani dan akan segera diadopsi, dibanding dengan inovasi yang kompleks yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa diterima oleh petani.

Menurut Anward *dalam* Soekartawi (1988), mengemukakan bahwa cepat tidaknya proses adopsi inovasi akhirnya juga tergantung dari faktor intern dari adopter itu sendiri. Latar belakang sosial, ekonomi yang mempengaruhi cepat atau tidaknya proses adopsi inovasi seseorang antara lain: pendidikan, keberanian mengambil resiko, pola hubungan, sikap terhadap perubahan, motivasi.

Kaitannya dengan faktor sosial ekonomi tersebut beberapa ahli berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka mereka relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi (Anward *dalam* Soekartawi, 1988). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mosher (1987), yang menyatakan bahwa pendidikan dasar petani sangat mempengaruhi cara berfikirnya dan melalui pendidikan. Seseorang dapat dikembangkan ketrampilan baru dan akan dapat memberikan efisiensi yang menguntungkan. Status sosial adalah kedudukan sosial individu dalam suatu kelompok atau bisa juga diartikan sebagai suatu tingkat sosial dari suatu inovasi kelompok dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya (Cohen 1987).

Luas lahan garapan adalah luasnya lahan yang diusahakan atau digarap secara aktif oleh petani dalam kurun waktu satu tahun terakhir baik lahan milik sendiri, sewa maupun bagi hasil. Luas lahan garapan mempengaruhi jumlah tanaman yang dihasilkan sehingga hasil usahatani akan lebih banyak (Soekartawi, 1988). Luas lahan garapan menentukan bagaimana petani menyikapi suatu inovasi, dimana petani dengan lahan garapan yang luas akan lebih besar peluangnya untuk mau menerima suatu inovasi dan begitu pula sebaliknya (Rogers, 1971). Status lahan garapan adalah status kepemilikan lahan yang digarap petani secara intensif. Hal ini meliputi status milik, sewa dan bagi hasil. Status lahan garapan dapat mempengaruhi pendapatan petani (Soekartawi, 1988). Umumnya petani yang lahannya berstatus milik sendiri mereka cenderung lebih cepat dalam menerima suatu inovasi berbeda dengan petani yang memiliki lahan sewa dan bagi hasil mereka cenderung lambat dalam menerima inovasi.

Menurut Anward *dalam* Soekartawi (1988), mengemukakan bahwa motivasi memang penting. Untuk menumbuhkan motivasi berkarya memang seringkali tidak mudah, khususnya bagi petani-petani kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki oleh petani tersebut, apakah itu keterbatasan sumberdaya lahan, pengetahuan, ketrampilan. Menurut Slamet *dalam* Soedarmanto (2003), mengemukakan bahwa semakin giatnya penyuluh mempromosikan inovasi yang disuluhkannya, maka akan semakin mempercepat adopsi inovasi yang bersangkutan.

Secara teoritis oleh Rogers (1983), bahwa proses pengambilan keputusan untuk mengadopsi suatu ide baru dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi,

variabel individu dan ciri komunikasi. Variabel sosial ekonomi meliputi pendidikan, luas lahan, orientasi pada usaha komersial, sikap positif terhadap motivasi. Variabel individu terdiri dari empati, tingkat rasional, keinginan untuk berubah, keberanian mengambil resiko, motif berprestasi, wawasan aspirasi pada pendidikan dan pekerjaan. Ciri komunikasi meliputi partisipasi sosial, relasi, hubungan dengan agen pembaharu, hubungan dengan orang luar, adanya jangkauan terhadap media masa, pengetahuan terhadap inovasi, kemampuan mempengaruhi orang lain dan keluwesan sistem hubungan.



III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Konsep

Perkebunan merupakan sub sektor pertanian yang mempunyai peranan penting sebagai pendukung ekonomi nasional. Salah satu komoditas perkebunan yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah tebu. Belakangan ini yang produktivitas tanaman tebu semakin menurun, sehingga produksi gula nasional juga turut menurun. Akibat dari penurunan ini maka pemerintah Indonesia harus mengimpor guna memenuhi kebutuhan gula masyarakat.

Berusaha tani tebu berarti tersedianya tebu secara teratur dengan kualitas yang memadai sangat tergantung dari tersedianya faktor produksi, yaitu lahan, bibit, pupuk, pestisida, modal, bantuan hidup, tenaga kerja dan teknologi. Petani Indonesia pada umumnya merupakan petani kecil sehingga tidak semua faktor produksi dapat dipenuhi sendiri. Dalam sistem tebu rakyat kedudukan petani tebu tergolong lemah terutama dalam penyediaan faktor produksi dan penjualan hasil produksi.

Bagi pabrik gula sendiri, permasalahan yang paling mendasar adalah terbatasnya lahan produksi dan rendahnya produksi. Sehingga untuk mencapai masa giling optimal, maka pabrik gula memerlukan ketersediaan bahan baku secara teratur dengan kualitas dan jumlah yang cukup. Sebagian bahan baku yang dibutuhkan tersebut bersumber dari tebu rakyat.

Kemitraan merupakan kerjasama usaha antara dua pihak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Kemitraan ini merupakan strategi yang



tepat untuk meningkatkan produktivitas tebu. Tetapi dikalangan petani memiliki kendala-kendala dalam kerja sama ini. Kendala-kendala yang dihadapi oleh petani tersebut antara lain :

(1) Ketrampilan baik dalam desain produk maupun teknik produksi yang relatif rendah. (2) Kemajuan manajemen relatif masih rendah (3) Pemasaran hasil produksi (4) Penyediaan hasil produksi (4) Penyediaan bahan baku (5) Kurangnya modal. (6) Produktivitas masih rendah.

Kerjasama yang sinergis antara petani tebu dengan pabrik gula dan dengan dukungan pemerintah, akan memberikan peranan penting bagi kelangsungan industri gula nasional. Dengan adanya sistem kemitraan diharapkan dapat memberikan peluang bagi petani tebu untuk memperoleh bantuan kredit dengan bunga lunak dan bantuan saprodi. Disamping itu, petani juga mendapatkan bimbingan teknis dari pabrik gula dalam pelaksanaan budidaya tanaman tebu.

Tebu Rakyat Kemitraan (TRK) merupakan antara petani tebu dengan pabrik gula dimana petani tebu mendapatkan bantuan berupa kredit untuk modal usahanya melalui bank-bank yang telah ditentukan dan penyalurannya dilakukan oleh koperasi/KUD wilayah setempat. Petani tebu tergabung dalam koperasi yang bekerjasama dengan pabrik gula, dimana pabrik gula tergabung dalam peranan untuk mencarikan kredit kolektif, menyediakan bibit unggul, menyediakan saprodi, menertibkan panen tebu dan semua hal tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan koperasi/KUD

Dari kemitraan yang terjadi antar pihak petani dengan pihak PG dimaksudkan agar kebutuhan dari masing-masing pihak dapat terpenuhi, sehingga

mereka selalu merasa diuntungkan. Hal ini akan mempengaruhi keberhasilan tujuan yang akan dicapai dalam program TRK ini.

Program TRK ini meliputi antara lain penyuluhan, pemberian kredit, pengaturan harga tebu, pemasaran, penggilingan. Diharapkan dari kerjasama ini adalah seluruh hasil dari panen tebu tersebut diserahkan pada pihak pabrik. Setelah program tersebut dirasakan oleh masyarakat petani terutama petani tebu maka muncullah suatu respon terhadap program TRK tersebut. Sebagian petani merasa tertarik dengan program tersebut karena untuk pemasaran hasil tebunya sudah dipastikan tetapi sebagian petani juga ada yang lebih tertarik untuk tidak mengikutinya dan lebih menyukai ke pedagang liar. Ketertarikan petani itulah yang menyebabkan muncul partisipasi aktif dari mereka yang terikat kerjasama dengan pabrik gula.

Dalam penelitian ini partisipasi petani tebu yang dimaksud adalah keterlibatan mereka dalam seluruh kegiatan yang ada dalam program TRK yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dibidang perencanaan akan diteliti seberapa jauh petani tebu ikut serta dalam merencanakan program. Dibidang pelaksanaan akan diteliti seberapa jauh mereka melaksanakan program yang telah direncanakan sedangkan dibidang pengevaluasian akan diteliti seberapa jauh keikutsertaan mereka dalam mengevaluasi seluruh kegiatan program. Dalam hal ini petani harus merasa diuntungkan maka mereka akan lebih aktif untuk mengikuti TRK.

Sebagai petani yang aktif dan ikut serta dalam pembangunan ini berarti petani menerima suatu inovasi yang baru. Penerimaan petani terhadap keputusan

inovasi berhubungan positif dengan tingkat partisipasi mereka, semakin banyak mereka berpartisipasi semakin besar penerimaan terhadap inovasi tersebut.

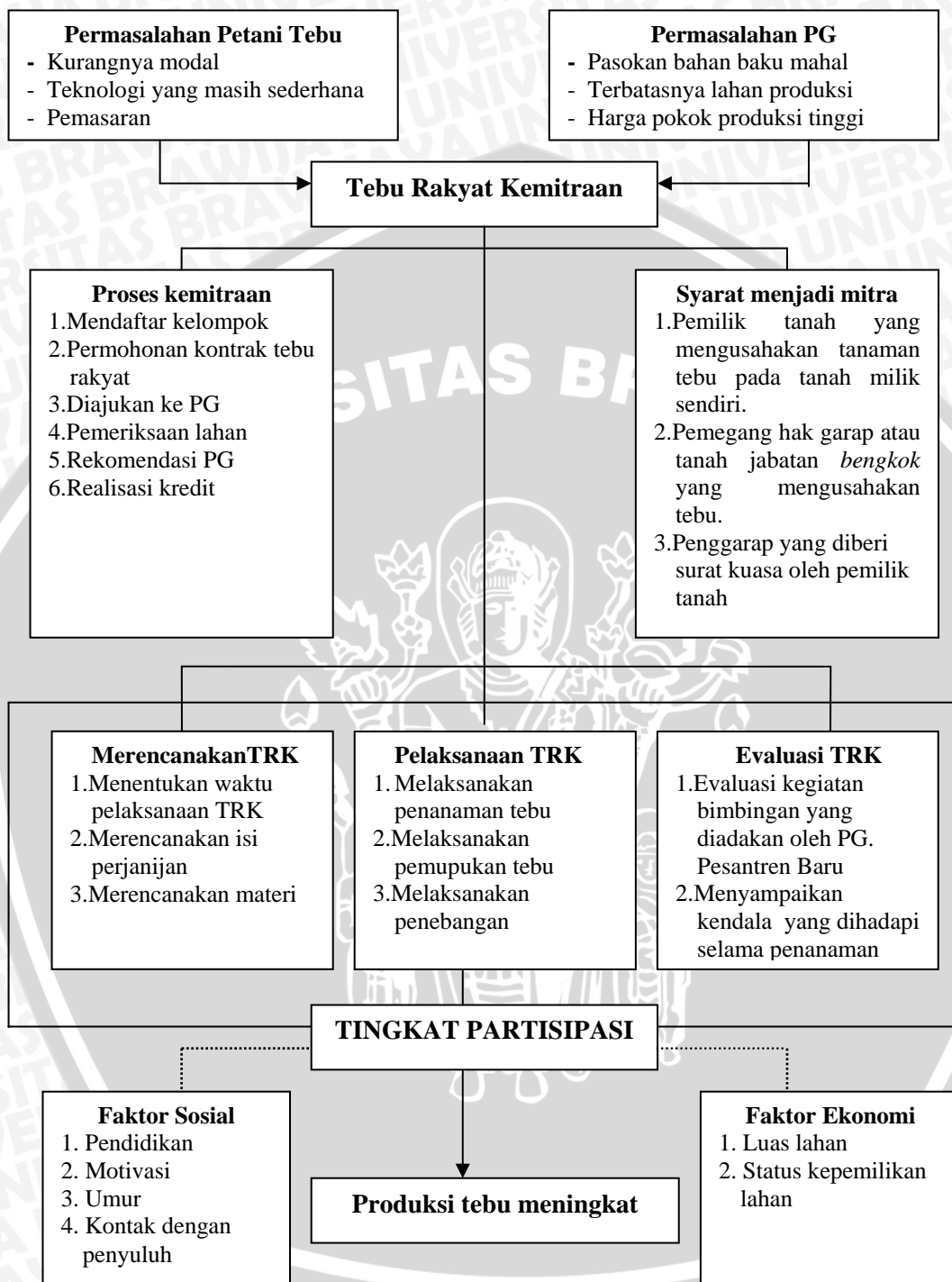
Hal yang dapat menghambat keberhasilan program TRK ini adalah partisipasi petani tinggi atau rendahnya partisipasi dari petani dipengaruhi oleh beberapa faktor dari petani itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan, umur, luas lahan, status kepemilikan lahan, motivasi petani dan kontak dengan penyuluh.

Tingkat pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan formal yang merupakan sarana belajar dimana selanjutnya diharapkan akan menanamkan rasa tanggung jawab yang dapat menimbulkan partisipasi petani dalam suatu program. Petani yang berpendidikan tinggi akan relatif lebih dinamis dan responsif terhadap suatu inovasi dibandingkan dengan petani yang berpendidikan lebih rendah. Luas lahan menentukan bagaimana petani menyikapi suatu inovasi, di mana petani dengan lahan garapan yang lebih luas akan lebih dimungkinkan mau menerima inovasi. Bagi petani yang mempunyai lahan luas biasanya memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik pula. Oleh sebab itu, petani akan lebih mudah dalam hal penyediaan modal untuk menerapkan teknologi baru yang telah diberikan termasuk dalam hal menerima suatu inovasi. Status kepemilikan lahan akan mempengaruhi petani untuk menerapkan suatu teknologi baru, apabila lahan yang digarap adalah milik petani sendiri, maka petani dimungkinkan akan lebih berani mencoba suatu hal yang baru diketahuinya, berbeda bila dibandingkan dengan petani dengan lahan sewa yang tentu akan lebih memikirkan resiko kegagalan

yang mungkin terjadi atau membutuhkan persetujuan dari pemilik lahan sebelum mencoba atau menggunakan inovasi yang akan ia praktekkan.

Motivasi petani adalah keinginan atau harapan yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan atau mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Faktor motivasi dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menggerakkan petani untuk mengikuti program baru yang diberikan oleh pemerintah. Kontak dengan penyuluh adalah intensitas pertemuan petani dengan penyuluh, sehingga petani mengetahui program baru yang diberikan oleh pemerintah. Semakin sering melakukan kontak dengan penyuluh maka akan semakin cepat mengadopsi inovasi baru, dengan adanya inovasi tersebut dapat menambah pengetahuan petani yang dapat berdampak positif bagi petani.

Dengan munculnya partisipasi aktif dari petani diharapkan timbul pula suatu perkembangan yang meningkat dalam memproduksi tanaman tebu sehingga pendapatan petani meningkat begitu pula dengan produk gula yang dapat memenuhi target kebutuhan gula penduduk Indonesia.



Keterangan

..... : Faktor yang mempengaruhi

—————> : Hubungan

————— : Menyatakan Proses

Gambar 4 : Partisipasi petani dalam program TRK dan faktor-faktor yang mempengaruhinya



3.2. Batasan Masalah

1. Petani yang diteliti adalah petani tebu yang tergabung dalam Kelompok Tani Usaha Jaya Di Desa Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri
2. Mendiskripsikan proses kemitraan di Kelompok Tani Usaha Jaya Di Desa Burengan Kota Kediri
3. Mendiskripsikan partisipasi petani dalam program Tebu Rakyat Kemitraan (TRK) dengan PG Pesantren Baru
4. Menganalisis hubungan antara partisipasi petani dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi program TRK

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Definisi Operasional :

1. Program TRK adalah suatu program dimana melibatkan petani tebu untuk bekerjasama dalam memproduksi gula pada pabrik gula. Kerjasama tersebut termasuk dalam kemitraan antara PG dengan petani tebu.
2. Proses kemitraan adalah bagaimana prosedur atau cara seorang petani tebu menjadi peserta kemitraan di PG. Pesantren Baru.
3. Pola kemitraan adalah bentuk ataupun jenis kemitraan yang berkembang di Indonesia yang diikuti oleh petani.
4. Syarat petani tebu menjadi peserta kemitraan adalah sebagai berikut :
 - a) Pemilik tanah yang mengusahakan tanaman tebu pada tanah milik sendiri.
 - b) Pemegang hak garap atau tanah jabatan *bengkok* yang mengusahakan tebu.
 - c) Penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik tanah

5. Partisipasi petani dalam program TRK adalah peran serta atau keikutsertaan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan program yang meliputi :
 - a) Tahap perencanaan meliputi perencanaan dalam kebutuhan petani dan merencanakan semua isi perjanjian.
 - b) Tahap pelaksanaan meliputi penanaman, pemupukan, penebangan dan pegangkutan, penyuluhan.
 - c) Tahap evaluasi meliputi pendataan hasil yang telah dicapai setelah dilakukan penebangan, kendala-kendala apa yang terjadi selama penanaman sampai penebangan yang disampaikan pada saat penyuluhan.
6. Faktor sosial ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi petani dalam menerima program TRK yang berasal dari petani, yang meliputi :
 - a. Tingkat pendidikan ialah tingkat pendidikan formal petani yang telah ditempuhnya.
 - b. Umur petani yaitu batasan umur yang digunakan adalah sejak petani lahir sampai saat penelitian ini dilakukan
 - c. Luas lahan adalah lahan yang digarap atau diusahakan secara efektif oleh petani dalam program TRK dalam satuan hektar.
 - d. Status kepemilikan lahan adalah status yang dimiliki oleh petani atas tanah garapannya baik lahan milik sendiri, sewa maupun bagi hasil.
 - e. Motivasi petani adalah keinginan atau harapan yang ingin dicapai oleh petani dalam mengikuti program TRK.
 - f. Kontak dengan agen pembaharu/penyuluhan adalah intensitas petani melakukan diskusi atau konsultasi dengan penyuluh dalam satu periode

tanam. Kontak dengan penyuluh dalam penelitian ini adalah seberapa sering petani melakukan interaksi baik konsultasi ataupun diskusi mengenai program TRK atau kegiatan pertanian yang lain dalam satu periode tanam.

3.3.2 Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas/independent variabel (X) yaitu faktor sosial ekonomi yang meliputi pendidikan, umur, luas lahan, status kepemilikan lahan, motivasi dan kontak dengan penyuluh. Serta variabel terikat/dependent (Y) yaitu partisipasi petani dalam program TRK.

Secara rinci untuk indikator dari masing-masing variabel tersebut disajikan pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Variabel Faktor-Faktor Sosial Ekonomi (X)

No	Indikator	Skor
1.	Tingkat pendidikan formal yang ditempuh terakhir petani	
	a. Tamat SLTA/ sederajat	3
	b. Tamat SLTP/ sederajat	2
	c. Tamat SD/ sederajat	1
2.	Umur	
	a. 38-48	3
	b. 48-55	2
	c. 55-64	1
3.	Luas lahan petani yang digunakan dalam kegiatan usahatani	
	a. Luas (> 4,2 ha)	3
	b. Sedang (1,2- 4,2 ha)	2
	c. Sempit (< 1,2 ha)	1
4.	Motivasi petani dalam mengikuti program TRK	
	a. Meningkatkan produksi dan pendapatan	3
	b. Meningkatkan produksi atau pendapatan saja	2
	c. Ikut-ikutan	1
5.	Status kepemilikan lahan petani yang digunakan dalam kegiatan usahatani	

a. Milik sendiri	3
b. Sewa dan Milik sendiri	2
c. Sewa	1
6. Frekuensi petani dalam melakukan kontak dengan penyuluh selama satu musim	
a. Intensif (>3 kali pertemuan/musim)	3
b. Kurang intensif (1-3 kali pertemuan/musim)	2
c. Tidak pernah	1
Skor maksimal	18
Skor minimal	6

Pengukuran variabel terikat (dependent) berupa pengukuran partisipasi petani dalam program TRK dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2 Indikator dan Skor Partisipasi Petani Tebu

No	Indikator	Skor
I	Merencanakan Kegiatan TRK	
	1. Partisipasi dalam menentukan waktu pelaksanaan TRK	
	a) Berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak PG Pesantren Baru dengan pihak petani tebu	3
	b) Berdasarkan kesepakatan petani	2
	c) Berdasarkan kesepakatan pihak PG. Pesantren Baru	1
	2. Partisipasi petani dalam merencanakan isi perjanjian sistem kontrak antar pihak petani, KUD dan pihak PG Pesantren Baru (perolehan bibit, dan besarnya kredit pupuk, besarnya kredit biaya garap, pembagian hasil)	
	a) Berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak PG dengan pihak petani tebu	3
	b) Berdasarkan kesepakatan petani	2
	c) Berdasarkan kesepakatan pihak PG Pesantren Baru	1
	3. Partisipasi dalam merencanakan materi yang akan disuluhkan pada petani yang terikat kontrak	
	a) Berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak PG Pesantren Baru dengan pihak petani tebu	3
	b) Berdasarkan kesepakatan petani	2
	c) Berdasarkan kesepakatan pihak PG Pesantren Baru	1
	4. Partisipasi dalam menentukan siapa yang melakukan tebang angkut	
	a) Berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak PG Pesantren Baru dengan pihak petani tebu	3
	b) Berdasarkan kesepakatan petani	2
	c) Berdasarkan kesepakatan pihak PG Pesantren Baru	1
	Skor maksimal	12
	Skor minimal	4

II Pelaksanaan Kegiatan Teknis

1. Ikut melaksanakan penanaman tebu	
a) Kegiatan dilakukan oleh petani dengan pengawasan PG Pesantren Baru	3
b) Kegiatan dilakukan oleh petani dan buruh tani	2
c) Kegiatan dilakukan oleh pihak lain	1
2. Ikut serta dalam melaksanakan pemupukan tebu	
a) Kegiatan dilakukan oleh petani dengan pengawasan PG Pesantren Baru	3
b) Kegiatan dilakukan oleh petani dan buruh tani	2
c) Kegiatan dilakukan oleh pihak lain	1
3. Ikut serta dalam melaksanakan penebangan dan pengangkutan tebu	
a) Kegiatan dilakukan oleh petani dengan pengawasan	3
b) Kegiatan dilakukan oleh petani dan buruh tani	2
c) Kegiatan dilakukan oleh pihak lain	1
4. Ikut serta dalam setiap kegiatan bimbingan teknis tentang tanaman tebu yang dilakukan oleh PG	
a) Sering (mengikuti bimbingan yang diberikan setiap hari)	3
b) Kadang-kadang (mengikuti sebagian)	2
c) Tidak pernah	1
Skor maksimal	12
Skor minimal	4

III. Evaluasi Kegiatan

1. Evaluasi petani dalam mengikuti kegiatan bimbingan yang diadakan oleh PG Pesantren Baru	
a) Mengikuti sepenuhnya	3
b) Mengikuti sebagian saja	2
c) Tidak pernah	1
2. Menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi	
a) Sering > 4kali / musim	3
b) Kadang-kadang 2-4 kali/ musim	2
c) Tidak pernah	1
3. Mengikuti isi perjanjian dalam kemitraan TRK	
a) Mengikuti sepenuhnya	3
b) Mengikuti sebagian	2
c) Tidak pernah	1
Skor maksimal	9
Skor minimal	3



IV. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) yaitu untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 1995).

4.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sensus. Metode sensus merupakan penelitian dimana data yang digunakan diambil dari seluruh anggota populasi (Hidayat, 1989). Unit analisa dalam penelitian ini adalah semua petani tebu yang tergabung dalam Kelompok Tani Usaha Jaya di Desa Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

4.3 Tempat dan waktu penelitian

4.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Pemilihan lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan petani di Kelurahan Burengan, Kecamatan, Pesantren, Kota Kediri merupakan anggota kelompok tani yang ikut dalam program TRK sehingga dapat diketahui faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi partisipasi dalam mengikuti kemitraan TRK.

4.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama dua bulan yaitu dimulai pada bulan April sampai bulan Mei 2008.

4.4 Metode Penentuan Responden

Penentuan kelompok tani secara sengaja (*purposive*) yaitu Kelompok Tani Usaha Jaya dimana kelompok tani Usaha Jaya merupakan kelompok tani yang aktif dan berfungsi yang ada di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yaitu seluruh anggota kelompok tani Usaha Jaya yang berjumlah 22 orang petani sebagai responden.

4.5 Metode Pengumpulan Data

4.5.1 Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Pengambilan data ini dilakukan dengan cara :

1. Wawancara terstruktur (dengan menggunakan kuisisioner)

Metode wawancara terstruktur adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner yaitu yang berbentuk daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis untuk memperoleh jawaban dari sampel berupa data yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini mengenai faktor sosial ekonomi dan partisipasi dalam program TRK .Kuisisioner ini akan diberikan kepada petani untuk diisi, peneliti akan mendampingi petani dalam pengisian kuisisioner ini,

dimana apabila ada pertanyaan yang kurang dimengerti oleh petani dapat langsung dijelaskan oleh peneliti.

2. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam ini dalam bentuk diskusi terfokus dengan mengangkat topik-topik tertentu yang berhubungan dengan tujuan penelitian yaitu tentang faktor sosial ekonomi dan partisipasi dalam program TRK. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang ada di lapang dengan menggunakan alat pertanyaan yang telah disusun yang dilakukan dengan bertatap muka dengan petani langsung.

3. Observasi (*Observation*)

Yaitu memperoleh data primer dengan jalan melihat, mendengar dan merasakan realita yang ada pada lingkungan petani dan kelompok tani tebu. Observasi meliputi keikutsertaan peneliti pada kegiatan kerja di lahan, kegiatan kelompok tani, acara pertemuan kelompok tani, dan kegiatan kelembagaan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang faktual dan objektif tentang kehidupan yang ada di lokasi penelitian dan agar dapat memberi penilaian secara tepat keberadaan data yang diperoleh di lapang.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari beberapa dokumen, baik yang tertulis, yang diperoleh dari Kantor kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

4.6 Metode Analisis Data

1) Untuk mendiskripsikan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di daerah penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif dan skala likert. Langkah-langkah penentuan skala likert sebagai berikut :

a. Menentukan Kelas (K)

Kelas yang ditetapkan adalah 3 kelas ($k=3$), yaitu : a) tinggi; b) sedang ;
c) rendah

b. Menentukan Kisaran (R)

Kisaran adalah selisih nilai pengamatan (skor) tertinggi dan nilai pengamatan (skor) terendah kisaran didapatkan dari persamaan berikut :

$$R = X_t - X_r \dots\dots\dots(1)$$

Dengan R = Kisaran

X_t = Nilai pengamatan tertinggi

X_r = Nilai pengamatan terendah

Kisaran untuk variabel partisipasi dalam perencanaan

$$R = X_t - X_r$$

$$= 12 - 4$$

$$= 8$$

Kisaran untuk variabel partisipasi dalam pelaksanaan

$$R = X_t - X_r$$

$$= 12 - 4$$

$$= 8$$

Kisaran untuk variabel partisipasi dalam evaluasi

$$R = X_t - X_r$$

$$= 9 - 3$$

$$= 6$$

c. Menentukan Selang Kelas (I)

Selang dalam kelas dilambangkan dengan I, ditentukan oleh rumus :

$$I = \frac{R}{K} \dots\dots\dots (2)$$

Dengan : I = Selang kelas

K = Skor tertinggi-skor terendah

Selang kelas untuk variabel partisipasi

$$I = R / K$$

$$= 8 / 3$$

$$= 2,6 \text{ atau } 3$$

Sehingga, dapat diketahui kisaran dari masing-masing kategori variabel partisipasi dalam perencanaan

Kategori rendah = 4 – 7 atau 30 % - 53 %

Kategori sedang = 7,1 – 10,1 atau 54% - 76 %

Kategori tinggi = 10,2 – 13,2 atau 77% - 100%

Selang kelas untuk variabel partisipasi dalam pelaksanaan

$$I = R / K$$

$$= 8 / 3$$

$$= 2,6 \text{ atau } 3$$

Sehingga, dapat diketahui kisaran dari masing-masing kategori variabel pelaksanaan :

Kategori rendah = 4 – 7 atau 30 % - 53 %

Kategori sedang = 7,1 – 10,1 atau 54% - 76 %

Kategori tinggi = 10,2 – 13,2 atau 77% - 100%

Selang kelas untuk variabel partisipasi dalam perencanaan :

$$I = R / K$$

$$= 6 / 3 = 2$$

Sehingga, dapat diketahui kisaran dari masing-masing kategori variabel partisipasi dalam evaluasi :

Kategori rendah = 3 – 5 atau 32 % - 54 %

Kategori sedang = 5,1 – 7,1 atau 55% - 77 %

Kategori tinggi = 7,2 – 9,2 atau 78% - 100%

- 2) Untuk menganalisis hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan partisipasi petani digunakan analisis tabel silang (*Cross Table Analysis*) dengan metode skoring dengan bantuan skala likert, sebagai berikut :

faktor sosial ekonomi	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah				
Sedang				
Tinggi				

Dalam penentuan strata digunakan luas lahan yang dimiliki oleh petani tebu. Strata dalam penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu strata I (luas), strata II (sedang) dan strata III (sempit).

- a. Strata I (luas) $= > \bar{X} + \frac{1}{2}\sigma$
- b. Strata II (sedang) $= (\bar{X} - \frac{1}{2}\sigma) \text{ s.d. } (\bar{X} + \frac{1}{2}\sigma)$
- c. Strata III (sempit) $= < \bar{X} - \frac{1}{2}\sigma$

Keterangan :

\bar{X} = rata-rata luas lahan petani

σ = Standar deviasi

Dari rumus diatas didapat hasil perhitungan pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Strata sampel pada kemitraan TRK

Golongan	Jumlah Populasi
Strata I (> 4,2 ha)	3
Strata II (1,2- 4,2)	16
Strata III (< 1,2 ha)	3
Total	22



V. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

5.1 Keadaan Geografis

Kelurahan burengan merupakan salah satu dari 15 Kelurahan di Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Jumlah penduduk di Kelurahan Burengan adalah 5605 jiwa. Topografi Kelurahan Burengan berupa dataran rendah. Luas Kelurahan Burengan mencakup + 103,454 Ha. Ketinggian 500 m diatas permukaan air laut. Suhu rata-rata berkisar 25 C. Kelurahan Burengan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Kelurahan Banjaran dan Kelurahan Doko
2. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Tinalan dan Kelurahan Bangsal
3. Sebelah Barat dengan Kelurahan Banjaran dan Kelurahan Singonegaran
4. Sebelah Timur dengan Kelurahan Bangsal dan Kelurahan Gogorante

Secara administratif, Kelurahan Burengan Terletak pada jarak :

1. 2 Km dari Ibu Kota Kecamatan
2. 4 Km dari Ibu Kota Kabupaten.

Letak geografis dan administratif diatas memungkinkan petani Kelurahan Burengan untuk melakukan komunikasi lebih mudah dengan petugas penyuluh atau pihak-pihak terkait, terutama yang berhubungan dengan adanya inovasi baru yang sedang dikembangkan.

5.2 Keadaan Penduduk

5.2.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur

Penggolongan penduduk menurut umur sangat penting dalam pembangunan karena melalui penggolongan ini dapat diketahui jumlah kelompok umur produktif yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Untuk mengetahui keadaan penduduk berdasarkan umur di Kelurahan Burengan dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini

Tabel 4. Penduduk Berdasarkan Umur di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri

No	Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	0 - 10	382	9
2	11 - 20	520	12
3	21 - 25	453	10
4	26 - 30	502	11
5	31 - 35	461	10
6	36 - 40	567	13
7	41 - 45	514	12
8	46 - 50	549	13
9	> 51	417	10
Jumlah		4365	100

Sumber : Data Monografi Kelurahan, 2008

Dari tabel diatas dapat diketahui komposisi penduduk menurut umur di Kelurahan Burengan yang paling banyak adalah penduduk usia produktif yaitu umur 21-40 tahun sebanyak 44 %, hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Desa Burengan mempunyai kualitas yang baik dalam berusahatani maupun kegiatan lainnya dan lebih mudah dalam menerima teknologi baru.

5.2.2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sampai tahun 2008 di Kelurahan Burengan sejumlah 4365 orang dengan 1.952 kepala keluarga. Secara statistik keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 5 dibawah berikut ini :

Tabel 5. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	2279	52,21
2	Perempuan	2086	47,79
	Jumlah	4365	100,00

Sumber : Data Monografi Kelurahan, 2008

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Burengan didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 2279 orang atau 52,21 % dibandingkan dengan penduduk perempuan yang berjumlah 2086 orang atau 47,79 %. Jumlah penduduk yang cukup besar di Kelurahan Burengan sangat perlu ditingkatkan peran sertanya secara optimal, karena komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini agar dapat berdaya guna dan berhasil dalam perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang , namun peran serta tersebut harus didukung oleh daya kreatifitas serta motivasi dan keinginan yang tinggi dari penduduk itu sendiri.

5.2.3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Untuk menciptakan kondisi masyarakat yang berkualitas tidak lepas dengan dunia pendidikan. Sebab pendidikan yang layak bisa mewarnai gaya berpikir seseorang dari emosional menjadi rasional dan dalam suasana yang rasional barulah seseorang dapat menerima dengan baik konsep-konsep yang diberikan kepadanya.

Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Kelurahan Burengan tergolong sedang karena rata-rata penduduk sudah mengenyam pendidikan dasar. Dengan adanya kondisi masyarakat seperti ini maka masyarakat mudah menerima inovasi- inovasi dalam rangka mencapai sektor pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui tentang tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Burengan dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Taman kanak-kanak	102	1,90
2	SD/ MI	2.127	39,70
3	SLTP/ MTS	1.956	36,51
4	SLTA/ MA	946	17,66
5	Akademi / D1 –D111	18	0,34
6	Sarjana (S1 – S3)	3	0,06
7	Lulusan Pendidikan Khusus		
	a. Pendidikan Keagamaan	134	2,50
	b. Kursus Ketrampilan	72	1,34
	Jumlah	5.358	100,00

Sumber : Data Monografi Kelurahan, 2008

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Burengan yang paling tinggi adalah tergolong pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat sebesar 2.127 jiwa (39,70 %).Selanjutnya Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 1.956 jiwa (1.956). Pada urutan ketiga adalah tingkat pendidikan Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 946 jiwa (17,66%). Selain itu, masyarakat Kelurahan Burengan juga sudah banyak yang melaksanakan pendidikan sampai pada tingkat Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan sebagian kecil juga telah melaksanakan

pendidikan ditingkat Strata 1 dan Strata 2. Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Burengan menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli dengan pendidikan untuk memperbaiki kualitas hidup.

5.2.4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Perkembangan teknologi baru dibidang pertanian, seperti pupuk, bibit unggul, insektisida, dan lain-lain telah memperluas kesempatan kerja kepada masyarakat, tetapi belum juga mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Hal ini dikarenakan adanya persaingan ketat dalam upaya memperoleh kesempatan kerja tersebut. Maka dari itu, setiap orang berusaha mencari suatu pekerjaan pada hakekatnya adalah untuk memperoleh kelayakan hidup di dalam keluarganya.

Penduduk di Kelurahan Burengan memiliki berbagai macam pekerjaan atau mata pencapaian yang digunakan sebagai sumber pendapatan..Adapun keadaan penduduk berdasarkan mata pencapaian dapat dilihat di tabel 7

Tabel 7. Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri

No	Mata Pencapaian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Karyawan		
	a. Pegawai Negeri Sipil	126	5,63
	b. TNI/Polri	25	1,12
	c. Swasta	527	23,54
2	Wiraswasta	1.137	50,78
3	Pertanian		
	a. Petani	152	6,79
	b. Buruh Tani	36	1,61
4	Pertukangan	98	4
5	Jasa	14	0
6	Pemulung	5	0
7	Pensiunan	119	5
	Jumlah	2.239	100,00

Sumber : Data Monografi Kelurahan, 2008

Penduduk diwilayah Kecamatan Pesantren mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam. Sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian yang bergerak dalam bidang pertanian baik sebagai petani maupun buruh tani yaitu sebanyak 188 jiwa, dimana jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani adalah 152 jiwa atau sekitar 6,79 % dan jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh tani adalah 36 jiwa atau sekitar 1,61 %.

Sedangkan untuk penduduk yang mempunyai mata pencaharian diluar sektor pertanian adalah mereka yang bekerja sebagai wiraswasta yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 1.137 jiwa (50,78), pegawai negeri sebanyak 126 jiwa (5,63%), Pensiunan sebanyak 119 jiwa (5%), TNI/Polri sebanyak 25 jiwa (1,12%), Swasta sebanyak 527 jiwa (23,54%), dan sisanya adalah bergerak dibidang tukang batu/kayu, jasa, dan pemulung.

5.3 Keadaan Pertanian

5.3.1 Distribusi Lahan Pertanian

Penggunaan lahan pertanian di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren dibedakan atas tanah sawah, pekarangan dan tegalan. Distribusi penggunaan lahan pertanian di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren dapat dilihat pada tabel 8 berikut

Tabel 8. Distribusi Penggunaan Lahan Pertanian Di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota. Kediri

No	Distribusi Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sawah	19,05	32,64
2	Pekarangan	11,36	19,46
3	Tegalan	27,95	47,90
	Jumlah	58,36	100,00

Sumber : Data Monografi Kelurahan, 2008

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa lahan di Kelurahan Burengan menurut penggunaannya yang terluas adalah tegalan dengan luas 27,95 Ha (27,95%), yang kedua adalah sawah dengan luas 19,05 Ha (32,64%).Pekarangan merupakan lahan yang penggunaannya sangat kecil, yaitu seluas 11,36 Ha (19,46%). Luas lahan yang dipergunakan untuk tegalan maupun sawah cukup luas memungkinkan sebagian besar penduduknya melakukan usahatani terutama tebu dan jenis tanaman pangan lainnya. Sedangkan untuk pekarangan sangat kecil karena mereka tinggal di dekat pusat kota dimana lahan perkotaan semakin menyempit untuk perluasan jalan sehingga kemungkinan untuk memiliki pekarangan yang luas sangatlah kecil.

5.3.2. Jenis Komoditi dan Produksi Tanaman Pertanian

Lahan pertanian yang ada di Kelurahan Burengan sebagian besar digunakan untuk kepentingan pertanian guna mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Penggunaan lahan pertanian paling besar untuk jenis komoditi pertanian yang dihasilkan di Kelurahan Burengan sebagian besar adalah komoditi tebu. Hasil produksi tanaman terbesar juga komoditi tebu. Untuk komoditas tanaman lain yang diusahakan oleh petani meliputi padi dan jagung. Jenis komoditi dan produksi tanaman pertanian Di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Jenis Komoditi dan Produksi Tanaman Pertanian di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri

No	Jenis Komoditi	Luas (Ha)	Produksi (Ton/Ha)	Keterangan
1	Tebu	23	70	Batang
2	Padi	14	5	Gabah
3	Jagung	9	3	Pipilan

Sumber : Data Monografi Kelurahan, 2008

Dari tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa luas tanam tertinggi tanaman perkebunan adalah komoditi tebu seluas 23 Ha dengan tingkat produktifitas 70 ton/Ha. Untuk tanaman tebu cukup luas karena untuk pengelolaan budidaya tanaman tebu lebih mudah dibanding tanaman padi dan jagung dan hasilnya lebih tinggi dibandingkan tanaman lainnya. Kemudian tanaman padi namun cukup luas yaitu 14 Ha dengan tingkat produktifitas 5 ton/Ha. Pada tanaman jagung luas lahan 9 Ha dengan produktifitas 3 ton/Ha.

5.4 Kelembagaan Pendukung Usaha Pertanian

5.4.1 Kelembagan Sosial

Keberadaan kelembagaan sosial terkait dengan tersedianya wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya dan berinteraksi dengan masyarakat lain yang mempunyai latar belakang dan kepentingan yang sama. Kegiatan kelembagaan sosial dalam usahatani pertanian di Desa Burengan Kecamatan Pesantren adalah Kelompok Tani. Kelompok Tani merupakan perkumpulan para anggota tani yang usahatannya berkaitan dengan pertanian, seluruh kegiatan petani mulai dari penanaman hingga panen dan penjualan dikoordinasi melalui Kelompok Tani. Pembentukan Kelompok Tani ini bertujuan untuk peningkatan usaha dalam kelompok baik usahatannya maupun pendapatan yang diperoleh.

5.4.2 Kelembagaan Ekonomi

Keadaan kelembagaan ekonomi di Desa Burengan yang berkaitan dengan usahatani salah satunya adalah KUD atau Koperasi Tani. Lembaga ini menyediakan kredit bagi petani terutama petani-petani kecil dan juga berfungsi sebagai penyalur hasil pertanian, selain itu juga terdapat industri pertanian yang berfungsi sebagai penyedia alat-alat pertanian untuk membantu pengolahan lahan pertanian yang dikelola oleh petani. Salah satu koperasi yang terdapat di Desa Burengan adalah Koperasi Mitra Sejahtera, koperasi ini merupakan koperasi yang dipercaya oleh PG Pesantren Baru dalam penyaluran Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat (KKPTR) kepada petani.

Kelurahan Burengan merupakan wilayah Kecamatan Pesantren yang paling dekat wilayahnya dengan pusat pemerintahan kota. Sehingga secara tidak langsung juga memberikan pengaruh terhadap mata pencaharian utama masyarakat yang tidak lagi mengandalkan sektor pertanian. Namun sudah bergeser pada pedagang atau wiraswasta, dimana jumlah penduduk menurut mata pencaharian tersebut mencapai 1,137 orang.

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Deskripsi Faktor Sosial Ekonomi di Daerah Penelitian

Faktor sosial ekonomi merupakan keadaan yang mempengaruhi petani responden dalam melakukan usahatani yang meliputi faktor sosial dan faktor ekonomi. Faktor sosial ekonomi ini berasal dari kesadaran dan kemampuan dari petani itu sendiri. Dalam penelitian ini mendeskripsikan beberapa faktor sosial ekonomi dari petani sampel, yang akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut :

6.1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat umur

Tingkat umur mempengaruhi kemampuan fisik dalam mengelola usahatani maupun pekerjaan lainnya, dimana semakin tinggi umur petani maka kemampuan bekerjanya semakin menurun. Sedangkan dalam hal pengalaman makin bertambah umur petani maka makin menjadikan mereka lebih matang dalam pengalamannya. (Soekartawi,1988.)

Tabel 10 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur Di Desa Burengan Tahun 2008

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	38-48	6	27,27
2	48-55	10	45,45
3	55-64	6	27,27
Total		22	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Usia petani tebu yang merupakan responden dalam penelitian ini berkisar antara 38-64. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang paling banyak berumur 48-55 tahun yaitu sebanyak 10 orang atau sekitar 45,45 %.

Petani responden yang berumur 38-48 sama dengan petani responden yang berumur 55-64 yaitu hanya 6 orang atau sekitar 27,27%.

Hal ini sesuai dengan pendapat Wiriadmadja (1996) menyatakan bahwa semakin tua umur seseorang yang tidak diikuti dengan pengalaman dan pengetahuan, maka diri seseorang tersebut akan berperilaku negatif, karena kehati-hatiannya terhadap miskin dan resiko yang mungkin akan diterimanya, sehingga sulit untuk menerima suatu inovasi baru dan cenderung lambat untuk mengadopsi inovasi.

6.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya pikir masyarakat atau petani, sehingga petani yang berpendidikan tinggi akan cepat menerima atau menyerap inovasi maupun informasi-informasi baru yang datang dari penyuluh maupun dari sumber lain. Pendidikan juga pada umumnya mempengaruhi cara-cara berfikir petani. Petani yang berpendidikan tinggi akan relatif lebih dinamis dan responsif terhadap suatu inovasi dibandingkan dengan petani yang berpendidikan lebih rendah.

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 11. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Burengan Tahun 2008

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	SLTA/Sederajat	11	50,00
2	SLTP/Sederajat	5	22,73
3	SD/Sederajat	6	27,27
	Total	22	100,00

Sumber : Data Primer, 2008

Dari tabel 11 dapat diketahui pendidikan formal yang dimiliki oleh sebagian besar responden adalah mengenyam pendidikan tamatan SLTA/ sederajat yaitu berjumlah 11 orang dengan persentase sebesar 50%, sedangkan untuk tamatan SLTP sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 22,73% dan untuk tamatan SD sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 27,27 %.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani tergolong tingkat pendidikan tinggi, dimana tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam kegiatan program TRK. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kualitas pola berpikirnya, dengan demikian tindakan maupun segala keputusan yang diambil akan semakin terarah.

6.1.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Luas Lahan

Luas lahan yang diusahakan petani merupakan luas lahan yang diusahakan oleh petani baik itu lahan milik sendiri, sewa dan bagi hasil. Luas lahan garapan menentukan bagaimana petani menyikapi suatu inovasi, dimana petani dengan lahan garapan yang lebih luas akan lebih memungkinkan mau menerima inovasi yang diberikan.

Besarnya luas lahan petani berhubungan dengan partisipasi petani dalam menerima ataupun menolak inovasi baru. Bagi petani yang mempunyai lahan luas, biasanya memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, oleh sebab itu petani akan lebih mudah dalam hal penyediaan modal untuk pengembangan usahataniya termasuk dalam hal menerima suatu inovasi. Sebaliknya bila seseorang memiliki lahan sempit maka dia akan lebih berfikir panjang untuk

menerima suatu inovasi. Besarnya luas lahan petani sampel dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

Tabel 12. Deskripsi Responden Berdasarkan Luas Lahan Di Desa Burengan tahun 2008.

No	Luas Lahan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Luas (> 4,2 ha)	3	13,63
2	Sedang (1,2 – 4,2 ha)	16	72,72
3	Sempit (< 1,2 ha)	3	13,63
Total		30	100,00

Sumber : Analisis data primer, 2008

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar petani responden memiliki lahan dengan luas antara 1,2-4,2 ha sebanyak 16 orang atau sekitar 72,72 %. Petani responden dengan luas lahan <1,2 dan > 4,2 ha memiliki jumlah responden yang sama yaitu sebanyak 3 orang atau sekitar 13,63 %. Walaupun luas lahan petani tergolong sedang namun motivasi mereka untuk mengikuti program sangatlah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas luas lahan yang dimiliki petani maka keinginan untuk mengadopsi suatu inovasi juga semakin besar, kondisi ini akan mempengaruhi partisipasi petani dalam penerimaan program TRK. Luas lahan garapan petani sangat berpengaruh terhadap penggunaan teknologi baru. Pada umumnya petani yang memiliki lahan yang luas cenderung lebih cepat merespon ataupun menerima teknologi baru, bila dibandingkan dengan petani yang berlahan sempit. Keterangan diatas sesuai dengan teori Rogers dan Shoemaker (1971) yang menyebutkan bahwa skala usaha berhubungan terhadap kecepatan adopsi inovasi.

6.1.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Motivasi untuk mengikuti program TRK

Petani akan lebih termotivasi dalam melaksanakan program jika mereka mendapatkan dan merasakan manfaat dari program tersebut. Rasa motivasi yang dimiliki oleh para petani tebu di daerah penelitian dapat dilihat dari jumlah keikutsertaan mereka dalam program TRK. Karena dapat terlihat bahwa jika mereka mendapatkan manfaatnya maka mereka akan lebih termotivasi, sehingga mereka akan mengikuti program TRK dari tahun ketahun. Selain itu petani merasa lebih memperoleh keuntungan dalam hal pemasaran yang sudah pasti, memperoleh pinjaman pupuk, biaya garap dan jika dibandingkan dengan menjual tebu kepedagang masih lebih menguntungkan mengikuti program perbandingan harga jual tebu.

Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik berdasarkan motivasi disajikan pada tabel 13 berikut ini

Tabel 13. Deskripsi Responden dilihat dari Motivasi petani di Desa Burengan Tahun 2008

No	Motivasi Petani	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Meningkatkan produksi atau pendapatan	11	50,00
2	Meningkatkan produksi dan pendapatan saja	8	36,36
3	Ikut-ikutan	3	13,64
	Total	22	100,00

Sumber : Analisis data primer, 2008

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa motivasi petani dalam mengikuti program TRK sebagian besar adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan dengan jumlah 11 jiwa atau persentase 50% dari total petani sampel. Sedangkan yang memiliki motivasi meningkatkan produksi atau pendapatan saja sebesar 8 jiwa atau 36,36 % . Sedangkan petani yang hanya ikut-ikutan berjumlah

3 jiwa atau sebesar 13,64 %. Hal ini berarti bahwa dengan ikut berpartisipasi dalam program TRK tersebut akan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan tanaman tebu yang mereka tanam, sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari petani dan keluarganya. Selain itu petani juga akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang didapatnya selama mengikuti program tersebut. Sehingga petani mengetahui budidaya tanaman tebu dengan benar dan setelah program selesai petani akan tetap menerapkan teknologi yang dianjurkan oleh penyuluh.

6.1.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Status Kepemilikan lahan

Status kepemilikan lahan adalah status lahan yang digarap petani dalam usahatannya baik itu lahan milik sendiri, sewa maupun bagi hasil. Status kepemilikan lahan akan dapat mempengaruhi petani untuk mengadopsi suatu inovasi yang ada yang diberikan, apabila lahan yang digarap adalah milik petani sendiri, maka petani akan lebih berani mencoba suatu hal yang baru diketahuinya.

Sebaliknya, jika petani dengan lahan sewa tentu akan lebih memikirkan resiko kegagalan yang mungkin terjadi karena kegagalan tersebut tidak menambah pendapatannya sedangkan dia tetap harus membayar sewa lahan. Petani dengan status kepemilikan lahan dengan bagi hasil membutuhkan persetujuan dari pemilik lahan sebelum mencoba atau menggunakan inovasi yang akan ia praktekkan. Data status kepemilikan lahan petani sampel dapat dilihat pada tabel 14 berikut :

Tabel 14. Deskripsi Responden dilihat dari Status Kepemilikan Lahan di Desa Burengan Tahun 2008

No	Status Kepemilikan Lahan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Milik sendiri	15	68,18
2	Sewa & milik sendiri	4	18,18
3	Sewa	3	13,63
Total		22	100,00

Sumber : Analisis data primer, 2008

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa status kepemilikan lahan terbanyak bagi petani sampel adalah milik sendiri yaitu sebanyak 15 orang atau 68,18 %, sedangkan petani yang status lahannya sewa dan milik sendiri adalah sebanyak 4 orang atau sebanyak 18,18 %, sedangkan petani yang status lahannya sewa saja hanya sebanyak 3 orang atau sebesar 13,63 %, sedangkan untuk status lahan yang bagi hasil atau sakap, tidak ada dalam petani sampel.

Dalam kegiatan berusaha tani status kepemilikan lahan petani sangat berpengaruh terhadap pengelolaan usahatannya, dalam hal ini dapat diartikan mengadopsi suatu inovasi baru, karena lahan milik sendiri sehingga tidak terlalu banyak pertimbangan. Berbeda dengan petani penyewa maupun bagi hasil, untuk mengadopsi sesuatu mempertimbangkan banyak hal, selain tanah yang harus dibayar sewanya juga tanggung jawab terhadap pemilik tanah terutama untuk petani bagi hasil.

6.1.6 Deskripsi Kontak dengan Penyuluh

Kontak dengan penyuluh adalah intensitas pertemuan antara petani dengan penyuluh selama satu musim tanam pelaksanaan program TRK. Dengan seringnya petani melakukan kontak dengan penyuluh maka petani akan cepat menerima inovasi baru, sehingga petani dapat langsung memberitahu pada petani yang lain

dan menerapkan inovasi tersebut. Seringnya melakukan kontak dengan penyuluh dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini :

Tabel 15. Deskripsi Responden dilihat dari Kontak dengan Penyuluh di Desa Burengan Tahun 2008

No	Kontak Dengan Penyuluh	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Intensif (>3 kali pertemuan/musim)	12	54,54
2	Kurang intensif (1-3 kali pertemuan/musim)	10	45,45
3	Tidak pernah	0	0,00
Total		22	100,00

Sumber : Analisis data primer, 2008

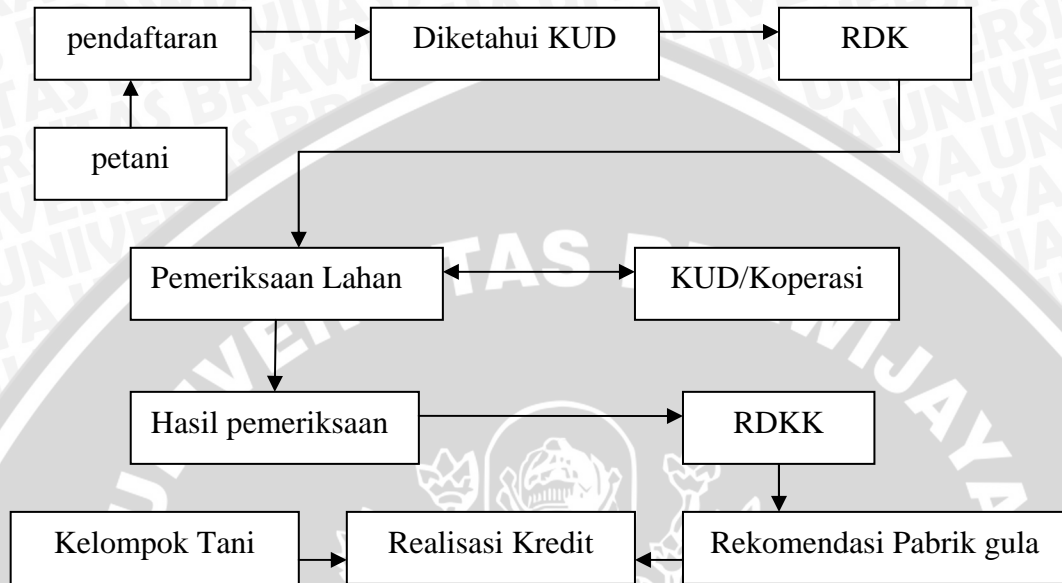
Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa, jumlah petani sampel yang secara intensif melakukan kontak dengan penyuluh sebesar 12 jiwa atau 54,54 % dari total petani sampel. Sedangkan jumlah petani sampel yang kurang intensif melakukan kontak dengan penyuluh sebesar 10 jiwa atau 45,45%. Hal ini berarti bahwa, petani lebih intensif melakukan kontak dengan penyuluh dalam satu kali musim tanam. Dengan seringnya mereka melakukan kontak dengan penyuluh dalam bentuk kegiatan pertemuan kelompok, rapat, pelatihan dan sekolah lapang maka mereka akan dengan cepat menerima inovasi baru dari penyuluh. Selain itu mereka juga dapat mengutarakan kendala-kendala yang dihadapi di lapang dan penyuluh memberikan solusi untuk mengatasi kendala tersebut sehingga kendala tersebut dapat segera teratasi. Menurut Soekartawi (1988), yaitu semakin giat penyuluh pertanian melaksanakan promosi tentang adopsi inovasi, maka semakin cepat pula adopsi inovasi yang dilakukan oleh masyarakat tani.

6.2 Proses Kemitraan Di PG. Pesantren Baru

Proses kemitraan TRK adalah mekanisme tentang bagaimana pelaksanaan didalam menjalin kerjasama antara petani tebu dengan PG. Pesantren Baru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan terdaftar sebagai petani tebu yang terikat kontrak dengan PG maka petani tersebut memperoleh pinjaman kredit biaya garap dan kredit pupuk jika mereka memang mengajukan kredit tersebut pada PG yang penyalurannya melalui KUD. Adapun mekanisme pengajuan kredit kepada pihak PG antara lain :

1. Ketua kelompok membuat daftar nominatif yang ditandatangani ketua dan KUD kemudian diajukan ke pihak PG disertai Rencana Definitif Kelompok (RDK).
2. Kemudian PG melakukan pemeriksaan terhadap lahan dan hasil dari pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara dan daftar hasil pemeriksaan areal yang ditandatangani oleh ketua kelompok, petugas lapang PG dan dari pihak KUD yang kemudian dibuatkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
3. RDKK yang telah dibuat dicek kembali oleh KUD dan kemudian ditandatangani oleh petani, ketua kelompok, Kepala Desa dan KUD.
4. Kemudian PG mengajukan kredit ke Bank, apabila menyetujui maka dilakukan transfer dari Bank ke PG.
5. Untuk mengajukan permohonan realisasi kredit ke PG KUD mengajukan jaminan yang berupa sertifikat tanah atau akte jual beli kepada PG.

6. Dan yang terakhir adalah pencairan kredit yang disalurkan oleh KUD dimana KUD disini sebagai jembatan antara pihak PG dengan petani.



Gambar 5 : Alur Sistem Pendaftaran Areal TRK

Sebagian besar petani 50% memperoleh informasi tentang kemitraan dengan PG. Pesantren Baru dari ketua kelompok tani Usaha Jaya Bapak Dani. Hal ini dikarenakan petani tidak berhubungan langsung dengan pabrik gula ataupun KUD tetapi petani lebih sering menjalin relasi hubungan dengan ketua kelompok. Dalam hal ini ketua kelompok tanilah yang berperan menghubungkan petani dengan pabrik gula ataupun KUD. Berikut kutipan pernyataan responden bapak Asan

” Yo... ngene nak, kula kelompokkan iki amergo Pak Dani Pak Dani menehi berita menowo lek-e melu kelompokan mengko entuk kredit, trus akhire kula dilebetaken Pak Dani dados anggota.”

(Ya...begini nak, saya mengetahui adanya kelompok ini ya karena Pak Dani memberi informasi seandainya ikut kelompok ini akan mendapatkan kredit, akhirnya saya dimasukkan menjadi anggota kelompok oleh Pak Dani).

Kutipan data juga didukung pernyataan ketua kelompok, berikut pernyataan bapak

Dani :

"Saya menjadi ketua kelompok itu sejak tahun 1983, pada saat itu saya belum mempunyai anggota. Dulu saya mencari anggota dengan datang ke rumah petani. Jadi tidak mereka yang datang ke saya untuk di daftar, tetapi saya datang dari rumah-ke rumah sekaligus memberi tahu adanya kelompok ini."

Hasil survei tersebut semakin menguatkan bahwa ketua kelompok sangat berperan dalam memberikan informasi mengenai kemitraan dengan PG. Pesantren Baru, dibandingkan PG dan KUD sendiri yang hanya berperan sebesar 30%.

Pada umumnya petani sudah cukup lama menjalin mitra dengan PG. Pesantren Baru. Sebagian besar petani memulai sejak tahun 1980-an. Menurut ketua kelompok yang menjabat sampai sekarang kebanyakan petani sudah tergabung dalam kelompok setelah tahun 1983. Sejak berdirinya kelompok tani sampai sekarang anggotanya tidak selalu sama baik jumlah ataupun orangnya. Kadang petani yang sudah menjadi anggota keluar, tetapi pada periode berikutnya masuk lagi. Anggota kelompok tani terbanyak sekitar tahun 1990-an yaitu hampir mencapai 50 orang. Berikut pernyataan responden bapak Nursalim

"Sejak kelompok tani ini berdiri yang anggotanya tidak selalu tetap Kadang, ada petani yang sudah menjadi anggota tetapi keluar untuk beberapa kali periode giling, kemudian masuk lagi. Hal ini terjadi kemungkinan karena ada permasalahan dari diri petani tersebut. Saya mempunyai anggota terbanyak itu kalo tidak salah sekitar tahun 1990-an hampir mencapai 50"

Selanjutnya apabila dilihat dari pengelolaan tenaga kerja dalam sistem tebu rakyat, kelompok tani Usaha Jaya termasuk kelompok tani dengan pola dengan pola kooperatif, yaitu petani mengusahakan lahannya dengan atau tanpa tenaga buruh. Dalam hal pemilik lahan mempunyai peran sebagai penggarap dan sekaligus mengatur usahatani sendiri.

Sebagian besar responden menyatakan kalau motivasi mereka mengikuti kemitraan karena memperoleh pinjaman meskipun hanya pinjaman pupuk saja. Tetapi sebagian petani ada juga yang menyatakan kalau motivasinya mengikuti kemitraan dengan PG Pesantren Baru adalah ingin meningkatkan hasil panen tebu.

Berikut ini adalah kutipan dari salah seorang responden : Bapak Ponirin

”Ngene lho nduk, lek melu kelompok-e Pak Dani iku ga usah repot-repot mikir mes. Misale aku ora dhuwe duwit dienggo mupuk ora usah pusing soale wis diutangi mes.”

(Begini lho nak, seandainya ikut dalam kelompok Pak Dani, tidak perlu susah-susah memikirkan pupuk, misalnya saya tidak punya uang untuk memupuk tidak perlu pusing karena sudah diberi pinjaman pupuk)

Yang menarik dalam penelitian ini adalah, meskipun petani banyak yang mengikuti kemitraan tetapi sebagian besar dari mereka 80% tidak mengetahui persyaratan menjadi peserta kemitraan yang mereka ikuti seperti yang ungkapkan oleh salah satu responden berikut ini Bapak Suparwoto

”Lek soal syarat-syarat Bapak ora mudeng . Pak Dani iku sing ngandhani lek dheweke ono kelompokan petani tebu. Aku trus didaftar karo Pak Dani dadi yo mboten mudeng syarat-syarat kuwi mau. Pokoke kula niku sampun percoyo kaliyan Pak Dani.”

(Kalau mengenai syarat-syarat Bapak tidak mengetahui tidak paham Pak Dani itu yang memberi informasi kalau beliau mempunyai kelompok tani tebu, kemudian saya di daftar oleh Pak Dani jadi tidak mengetahui syarat-syarat itu tadi. Pokoknya saya ini sudah percaya pada Pak Dani)

Kutipan pernyataan diatas berarti bahwa meskipun sebagian besar petani tidak mengetahui syarat-syarat kemitraan tetapi mereka mengikutinya berdasarkan kepercayaan kepada pemberi informasi ketua kelompok tani. Secara umum proses pelaksanaan petani tebu menjadi peserta kemitraan dengan PG. Pesantren Baru.

Menurut Prasetyani (2004) untuk menjadi peserta kemitraan TRK, setiap petani harus mengajukan Daftar Nominatif dan Biaya Kebun TRK yang dilakukan secara kolektif dan dikoordinir oleh ketua kelompok. Setelah ditanda tangani oleh semua petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan diketahui ketua kelompok dan KUD, maka Daftar Nominatif dan Biaya Kebun TRK tersebut. Setelah memenuhi syarat maka Daftar Nominatif dan Biaya Kebun diajukan ke pihak bank penyalur kredit sesuai dengan wilayah KUD atas nama petani kepihak pabrik gula, maka pengolahan keuangan ditampung pabrik gula sebagai penjamin kredit dari Kredit Ketahanan Pangan-Tebu Rakyat (KKP-TR) tersebut.

Proses kemitraan antara petani tebu dengan PG Pesantren Baru di Desa Burengan Kecamatan Pesantren berawal dari beberapa petani dipanggil ke Kantor Kepala Desa oleh Pabrik gula dan KUD. Dalam pertemuan tersebut diuraikan berbagai permasalahan tentang tebu dan gula, baik yang dialami oleh pihak petani maupun pabrik gula. Dipihak petani itu sendiri permasalahan yang paling mendasar adalah permodalan uang, bibit, pupuk, sedangkan pada pabrik gula adalah terbatasnya bahan baku berupa tebu karena terbatasnya bahan baku berupa

tebu karena terbatasnya lahan. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak gula menawarkan suatu kerjasama dengan petani tebu di Desa Burengan. Kerjasama ini dikenal dengan Tebu Rakyat Kemitraan (TRK), dimana petani akan memperoleh kredit dari pabrik gula. Beberapa petani yang diundang ditunjuk dan diangkat dalam pertemuan tersebut ditunjuk dan diangkat menjadi ketua kelompok. Nama kelompok tani disesuaikan dengan nama ketua kelompoknya. Karena syarat menjadi peserta kemitraan adalah tergabung dalam suatu kelompok tani, maka setiap ketua kelompok berusaha mencari anggota dengan cara mendatangi petani satu persatu. Syarat yang lain, yaitu setelah kelompok tani terbentuk harus mempunyai lahan minimal 20 Ha. apabila lahan tersebut kurang dari 20 Ha, maka diadakan penggabungan beberapa kelompok tani. Ketika pertama kali kemitraan dibentuk ketua kelompok sangat berperan dalam perekrutan anggota.

Beberapa tahapan yang harus dilaksanakan petani untuk mendapatkan kredit dari Tebu Rakyat Kemitraan yaitu pertama petani didaftar oleh kelompok. Berdasarkan daftar tersebut ketua kelompok membuat RDK (Rencana Defenitif) yang diketahui oleh KUD kemudian diajukan ke PG Pesantren Baru. Setelah menerima RDK dari kelompok pihak PG Pesantren Baru melaksanakan pemeriksaan areal yang diwakili SKW Sinder Kerja Wilayah dan petugas lapang serta disaksikan oleh pihak KUD dan ketua kelompok tani yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan lahan dibuatkan RDKK Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok oleh pabrik gula. Setelah disetujui oleh PG Pesantren Baru maka

diajukan rekomendasi dan sebagai tindak lanjut adalah realisasi kredit yang dilaksanakan oleh KUD.

6.3. Deskripsi Partisipasi Petani dalam Program TRK

Partisipasi petani tebu dalam program TRK adalah keikutsertaan petani dalam mengikuti seluruh kegiatan program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Partisipasi yang diharapkan dalam program TRK adalah partisipasi yang berjalan 2 arah agar seluruh kegiatan berjalan lancar yang artinya partisipasi tersebut berasal dari petani tebu dan dari pihak pabrik.

Tabel 16. Persentase Partisipasi Petani Dalam Program TRK

No	Indikator	Skor maks	Skor dicapai	Persentase (%)	Kategori
1	Perencanaan Program TRK	12	9,91	82,58	Tinggi
2	Pelaksanaan Program TRK	12	9,91	82,58	Tinggi
3	Evaluasi Program TRK	9	7,28	80,88	Tinggi
	Jumlah	33	27,14	82,24	Tinggi

Sumber : Analisis data primer, 2008

Rendah : 30%-53%

Sedang : 54%-76%

Tinggi : 77 %-100%

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat partisipasi petani tebu tergolong tinggi dengan skor rata-rata sebesar 27,14 yaitu sebesar 82,24% Hal ini berarti bahwa, partisipasi petani tinggi dipengaruhi oleh keinginan petani untuk mengikuti program TRK yang muncul dari diri mereka sendiri. Selain itu mereka juga merencanakan sendiri setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam melakukan usahataniya. Petani melaksanakan program TRK sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh penyuluh. Serta petani juga ikut menikmati hasil yang didapatnya dengan meningkatnya produksi dan pendapatan petani.

Secara keseluruhan Partisipasi petani dalam kategori tinggi hal ini dikarenakan petani terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan dilapang mulai dari waktu perencanaan hingga evaluasi, karena apabila petani tidak terlibat langsung dilapang dalam proses kemitraan maka petani akan mengalami kesulitan didalam melakukan kemitraan dengan PG Pesantren Baru. Dengan mengikuti seluruh kegiatan dilapang selain petani mendapatkan kemudahan dalam proses kemitraan petani juga mendapatkan inovasi baru serta informasi dari para petani lain yang nantinya informasi tersebut dapat bermanfaat untuk petani tersebut.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai uraian masing-masing indikator partisipasi petani terhadap program TRK dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini

6.3.1 Partisipasi Petani Dalam Perencanaan Program TRK

Partisipasi petani tebu dalam hal perencanaan dapat di lihat dari beberapa indikator antara lain dalam penentuan waktu pelaksanaan TRK, yang meliputi waktu tanam dan waktu pemupukan, indikator yang kedua adalah pembuatan RDK dan RDKK, penentuan isi perjanjian, penentuan materi penyuluhan, merencanakan untuk menentukan siapa yang melakukan tebang angkut. untuk mengetahui gambaran seberapa besar partisipasi petani melalui penghitungan skoring dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 17. Indikator Perencanaan Petani Dalam Program TRK

No	Indikator	Skor maks	Skor yang dicapai	Persentase (%)	Kategori
1	Ikut menentukan waktu pelaksanaan TRK	3	2,4	80,3	Tinggi
2	Ikut merencanakan isi perjanjian sistem kontrak.	3	2,5	83,4	Tinggi
3	Ikut merencanakan materi TRK	3	2,6	86,7	Tinggi
4	Ikut merencanakan siapa yang melakukan tebang angkut	3	2,4	80,4	Tinggi
Jumlah		12	9,9	82,6	Tinggi

Sumber : Analisis data primer, 2008

Keterangan :

Kategori partisipasi petani dalam perencanaan program TRK :

Rendah : 30%-53%

Sedang : 54%-76%

Tinggi : 77 %-100%

Dalam seluruh kegiatan perencanaan secara umum partisipasi petani tebu menunjukkan skor 9.9 yaitu sebesar 82.6 % dimana skor tersebut termasuk dalam kategori tinggi.

Dalam menentukan waktu pelaksanaan TRK yang meliputi meliputi penentuan waktu tanam, waktu pemupukan petani terlibat aktif dalam perencanaannya. Hal itu dikarenakan untuk waktu penanamannya disesuaikan dengan keadaan cuaca pada saat itu di daerah masing-masing. Dalam pembuatan RDK dan RDKK petani terlibat aktif dalam merencanakan RDK karena yang mengetahui seberapa besar kebutuhan petani dalam mengelola tebu adalah petani itu sendiri, sedangkan hal itu disesuaikan dengan pembuatan RDKK nya yang melalui kesepakatan pabrik karena dalam hal ini yang mengetahui kemampuan meminjamkan kredit pada petani adalah pihak pabrik selain itu pabrik juga yang

mengetahui kebutuhan tebu dengan kapasitas penggilingan yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan luas lahan yang terdapat pada petani TRK.

Untuk penentuan isi perjanjian dalam program TRK yang meliputi jumlah biaya garap, jumlah pupuk yang akan cair, jumlah bibit sepenuhnya dilakukan oleh pihak pabrik, hal ini dikarenakan pabrik mempunyai kuasa untuk menentukan pengeluaran kebutuhan yang disesuaikan dengan anggaran yang dipinjam pabrik ke pihak Bank, sedangkan petani hanya mengajukan jumlah yang dibutuhkan sesuai luas lahan yang diajukan pada waktu pengajuan kontrak ke PG pada awal pendaftaran kontrak baru.

Dalam penyuluhan semua materi yang akan disampaikan pada petani tebu semuanya direncanakan oleh pihak PG hal itu disesuaikan dengan segala kebutuhan dan keinginan dari pabrik untuk jenis tebu dan kualitas tanaman tebu yang diharapkan.

Sedangkan untuk indikator perencanaan penebangan dan pengangkutan sepenuhnya diserahkan oleh petani sendiri dimana ini langsung dikoordinir oleh ketua dan biayanya akan dipotong dari hasil yang akan diperoleh dari akhir program..

6.3.2 Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program TRK

Partisipasi petani tebu dalam hal pelaksanaan program TRK dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain peran serta petani dalam menanam tebu, peran serta petani dalam pemupukan tanaman tebu, peran serta petani tebu terhadap penebangan dan pengangkutan pada saat panen, dan yang terakhir adalah peran

serta petani terhadap kegiatan penyuluhan tentang tanaman tebu yang diadakan oleh PG.

Tabel 18. Indikator Pelaksanaan Petani dalam Program TRK

No	Indikator	Skor maks	Skor yang dicapai	Persentase (%)	Kategori
1	Melaksanakan penanaman tebu	3	2,5	83	Tinggi
2	Melaksanakan pemupukan	3	2,4	83,4	Tinggi
3	Melaksanakan penebangan dan pengangkutan tebu	3	2,5	85	Tinggi
4	Mengikuti setiap kegiatan bimbingan teknis	3	2,4	81,7	Tinggi
Jumlah		12	9,8	82,2	Tinggi

Sumber : Analisis data primer, 2008

Keterangan :

Kategori partisipasi petani dalam pelaksanaan program TRK

Rendah : 30%-53%

Sedang : 54%-76%

Tinggi : 77%-100%

Dari indikator tersebut dapat diketahui nilai-nilai pelaksanaan program TRK secara umum termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata 9,8 yaitu sebesar 82,2 %. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaan program TRK secara keseluruhan dilaksanakan oleh petani mulai dari penanaman, pemupukan, penebangan dan pengangkutan.

Partisipasi petani dalam pelaksanaan penanaman tebu semuanya dilaksanakan oleh petani dan tanpa ada pengawasan langsung dari pihak pabrik hanya 4 orang petani yang pernah dilakukan pengawasan oleh PG dari sejumlah petani tebu yang diambil sampel. Hal itu disebabkan karena banyaknya jumlah petani yang melakukan penanaman secara bersamaan sedangkan petugas lapang dari PG sendiri jumlahnya sangat terbatas, selain itu pada saat pengawasan oleh PG

petani tidak berada di tempat. Usaha yang dilakukan oleh PG untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan dimana mereka memberikan penyuluhan cara penanaman yang baik sehingga tidak dilakukan pengawasan secara langsung.

Begitu juga dengan pemupukan melalui penyuluhan PG meminta agar petani menggunakan pupuk ZA, TSP, dan Kcl tapi sering juga petani menggunakan sebagian dari pupuk tersebut menggantinya dengan pupuk biasa karena mereka menganggap dengan menggunakan pupuk yang dianjurkan pihak PG itu akan memperbesar biaya garap sedangkan petani itu sendiri sangat kekurangan dalam biaya garapnya.

Pelaksanaan program yang lainnya adalah dalam hal penebangan dan pengangkutan pada saat panen tebu tiba. Penebangan dan pengangkutan tersebut dilakukan sendiri oleh petani dengan menyewa penebang dan menyewa alat transportasi untuk pengangkutannya. Sedangkan untuk ongkos penebang dan pengangkutannya semuanya dipotong dari hasil penggilingan tebu di akhir pembagian hasil.

6.3.3. Partisipasi Petani Dalam Evaluasi Program TRK

Partisipasi petani tebu dalam evaluasi dapat dilihat dari berbagai macam indikator antara lain kehadiran petani dalam mengikuti penyuluhan, pertemuan dalam kelompok pada saat persiapan panen pada saat penggilingan, indikator yang lainnya adalah penyampaian kendala-kendala yang dihadapi petani pada saat mengikuti program TRK, dan yang terakhir adalah melihat keikutsertaan petani dalam mematuhi isi perjanjian yang telah dibuat

Tabel 19. Indikator Evaluasi Petani Dalam Program TRK

No	Indikator	Skor maks	Skor yang dicapai	Persentase (%)	Kategori
1	Evaluasi kegiatan bimbingan yang diadakan oleh PG. Pesantren Baru	3	2,6	87	Tinggi
2	Penyampaian kendala-kendala yang dihadapi petani pada saat mengikuti program TRK	3	2,3	78,7	Tinggi
3	Pertemuan dalam kelompok pada saat persiapan panen pada saat penggilingan	3	2,1	77	Sedang
Jumlah		9	7,2	80,8	Tinggi

Sumber : Analisis data primer, 2008

Keterangan :

Kategori partisipasi petani dalam evaluasi program TRK

Rendah : 32%-54%

Sedang : 55%-77%

Tinggi : 78%-100%

Dari ketiga indikator pengukuran tingkat partisipasi petani tebu dalam hal evaluasi program TRK dapat diketahui partisipasinya, secara umum termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai rata 7,2 yaitu sebesar 80,8%. Hal ini disebabkan karena pada umumnya petani jarang dilibatkan dalam evaluasi sedangkan evaluasi tersebut hanya mengenai hasil-hasil yang telah dicapai bukan tentang mekanisme kerja program agar berjalan lebih baik atau cara penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi. Tapi petani tebu sangat aktif dalam penyampaian kendala-kendala yang dihadapi selama program TRK dari sampel petani yang diambil terdapat 12 petani yang sering menyampaikan kendala-kendala lebih dari 4 kali sedangkan yang lain sudah menyampaikannya lebih dari 2 kali. Kendala-kendala yang dihadapi petani tebu sebagian besar disampaikan pada forum

penyuluhan maupun forum pertemuan kelompok tani. Untuk kendala yang sering disampaikan pada umumnya bukan masalah penanaman tebu atau budidayanya tapi tentang pencairan biaya garap yang sering terlambat bahkan tidak cair, pupuk yang datangnya terlalu lambat, begitu juga tentang datangnya Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA) pada saat sudah siap dipanen dan datangnya selalu terlambat. Pihak PG mempunyai kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut terutama untuk datangnya SPTA yang disesuaikan dengan jadwal penggilingan dan kapasitas mesin pabrik untuk menggiling.

Pertemuan dalam kelompok pada saat persiapan panen pada saat penggilingan tergolong sedang dikarenakan para petani sudah merasa mengerti jadi menurut mereka pertemuan tersebut tidak terlalu penting. Sedangkan untuk persiapan giling petani hanya perlu mempersiapkan bahan baku tebu dan penebang tebu, untuk masalah mesin penggiling tanggung jawab sepenuhnya oleh PG. Pesantren Baru.

Untuk perjanjian dalam program TRK ini menyangkut tentang besarnya jumlah pupuk yang akan dicairkan / dikeluarkan oleh PG, besarnya biaya garap yang akan dikreditkan dan semua jumlahnya ditetapkan oleh PG sedangkan petani hanya bisa mengajukan besarnya kebutuhan yang kemudian pihak pabrik yang menetapkan. Seluruh petani yang dijadikan sampel dalam penelitian ini semuanya melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat karena mereka hanya berada dalam pihak yang tidak berwenang.

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi petani dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

terhadap program TRK termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan anggota telah mengetahui manfaat dari mengikuti program TRK tersebut sehingga dalam setiap pelaksanaan program TRK kesadaran anggota untuk berpartisipasi cukup tinggi.

6.4. Hubungan Faktor sosial ekonomi dengan Partisipasi dalam Program TRK

Faktor sosial ekonomi adalah suatu kondisi/keadaan petani mengenai keadaan sosial maupun ekonomi yang dapat mendukung kegiatan usahatani yang berasal dari lingkungan mereka sendiri. Keadaan sosial ekonomi ini berasal dari kesadaran dan kemampuan petani, sehingga keadaan sosial ekonomi masing-masing petani sangat beragam.

Partisipasi petani adalah peran serta atau keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil bagian dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebagai upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan serta meningkatkan penerapan teknologi dan mengenalkan teknologi baru bagi petani, sehingga petani akan terus menerapkan teknologi tersebut.

Hubungan antara faktor-faktor sosial ekonomi yang meliputi umur, tingkat pendidikan, luas lahan, motivasi, status kepemilikan lahan dan kontak dengan penyuluh pada kelompok tani Usaha Jaya di Kelurahan Burengan Kecamatan pesantren Kota Kediri dengan partisipasi petani dalam program TRK diukur dengan menggunakan metode tabel silang. Dalam penelitian ini variabel faktor-faktor sosial ekonomi (X) dihubungkan dengan partisipasi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Lebih lanjut hubungan antara faktor sosial

ekonomi dengan partisipasi responden dalam program TRK dapat dijelaskan pada tabel 20 berikut ini :

Tabel 20. Hubungan Hubungan Faktor sosial ekonomi dengan Partisipasi dalam Program TRK, di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Faktor-faktor Sosial Ekonomi	Keterangan
1. Tingkat pendidikan	Terdapat hubungan
2. Umur	Terdapat hubungan
3. Luas lahan	Terdapat hubungan
4. Motivasi	Tidak ada hubungan
5. Status kepemilikan lahan	Terdapat hubungan
6. Kontak dengan penyuluh	Terdapat hubungan

Sumber : Analisis Data Primer ,2008

Hasil penelitian yang terlihat pada tabel 20 Analisis Cross Table lihat pada lampiran 5 menunjukkan dari ke 6 indikator faktor sosial ekonomi hanya ada 1 indikator yang tidak memiliki hubungan dengan partisipasi petani dalam program TRK.

6.4.1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dan penyebaran inovasi. Pendidikan yang diterima dari pendidikan formal yang pernah mereka miliki merupakan sarana belajar untuk menambah pengetahuan. Dengan pendidikan ini diharapkan akan mempengaruhi ketajaman pola pikir petani dalam memperoleh pengetahuan baru, mudah mengikuti perkembangan jaman, dan cepat menerima suatu inovasi baru.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam proses melaksanakan satu program terutama dalam hal partisipasinya. Sehingga pendidikan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi petani dalam suatu pelaksanaan program. Karena pendidikan dapat digunakan sebagai

sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan merupakan sarana belajar selanjutnya yang kemudian dari pengetahuan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk partisipasi suatu program (Sastropoetro, 1988). Hubungan antara pendidikan dengan Partisipasi dalam Program TRK dapat dilihat pada tabel 21 dibawah ini :

Tabel 21. Hubungan antara Tingkat pendidikan dengan Partisipasi dalam Program TRK, di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Variabel (%)	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah (27,27%)	0	0	100	100
Sedang (22,72%)	0	40	60	100
Tinggi (50%)	0	18,18	81,81	100

Sumber : Analisis Data Primer ,2008

Berdasarkan keadaan dilapang dengan data yang disajikan terlihat bahwa terdapat suatu hubungan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi petani dalam program TRK. Keadaan ini ditunjukkan dengan tingginya partisipasi petani dalam program TRK di daerah penelitian. Dengan keterbatasan sumberdaya dan keinginan yang kuat, membuat petani responden untuk maju dan memperbaiki produktivitas usahatani tebu serta kesejahteraan petani responden itu sendiri. Petani dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi tentu saja memiliki partisipasi yang lebih tinggi daripada petani yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekartawi (1988) yang menyatakan bahwa mereka yang memiliki pendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam melakukan

adopsi inovasi, begitu pula sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah agak sulit untuk melakukan adopsi inovasi.

6.4.2. Umur

Kemajuan teknologi pertanian dinegara kita saat ini sedang banyak perkembangan oleh karena itu semua petani tidak mau kalah untuk memperoleh pengetahuan sebanyak mungkin, hal itu dilakukan untuk kemajuan dari petani itu sendiri dan perkembangan usahatani mereka sendiri. Baik yang berumur tua maupun yang muda mereka aktif untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

Semakin tua umur seseorang yang tidak ikuti dengan pengalaman dan pengetahuan, maka diri seseorang tersebut akan berperilaku negatif, karena kehati-hatiannya terhadap miskin dan akan menenrима suatu inovasi baru dan cenderung lambat untuk mengadopsi inovasi tersebut. Hubungan antara antara Umur dengan Partisipasi dalam Program TRK dapat dilihat pada tabel 22 berikut

Tabel 22. Hubungan antara Umur dengan Partisipasi dalam Program TRK, dikelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Variabel (%)	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah (27,27%)	0	33,33	66,66	100
Sedang (45,45%)	0	10	90	100
Tinggi (27,27%)	0	16,66	83,33	100

Sumber : Analisis Data Primer : 2008

Dari hasil penelitian didapatkan data petani responden pada kelompok tani Usaha Jaya ada kecenderungan hubungan antara umur dengan partisipasi petani dalam program TRK. Dengan keadaan yang ada dilapang berarti sesuai dengan pendapat Soekartawi (1988) yang menyatakan bahwa umur petani merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan proses adopsi inovasi. Makin muda petani biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu apa yang belum mereka ketahui, sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk lebih cepat melakukan adopsi inovasi walaupun sebenarnya mereka masih belum berpengalaman dalam soal adopsi inovasi tersebut.

6.4.3 Luas lahan

Luas lahan garapan adalah luas tanah yang digarap atau diusahakan oleh petani, baik itu milik sendiri, sewa, maupun bagi hasil. Luas lahan garapan menentukan petani berpartisipasi dalam program TRK, dimana petani dengan lahan garapan luas akan lebih memungkinkan menerima inovasi program TRK yang diperkenalkan pada kelompok tani untuk diterapkan di lahan garapannya. Menurut teori Rogers dan Shoemakers (1971) yang menyebutkan bahwa skala usaha mempunyai hubungan dengan kecepatan adopsi inovasi. Hubungan antara luas lahan dengan partisipasi dalam program TRK dapat dilihat pada tabel 23 dibawah ini :

Tabel 23. Hubungan antara luas lahan dengan Partisipasi dalam Program TRK, di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Variabel (%)	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah (31,81%)	0	14,28	85,71	100
Sedang (40,90%)	0	11,1	88,88	100
Tinggi (27,27%)	0	33,33	66,66	100

Sumber : Analisis Data Pirmir : 2008

Dari hasil penelitian didapatkan data petani responden pada kelompok tani Usaha Jaya sebesar 60 % memiliki luas lahan lebih dari 2 Ha. Sedangkan

partisipasi petani dalam program TRK termasuk dalam kategori tinggi, dimana keadaan ini menunjukkan bahwa luas lahan yang dimiliki oleh petani responden memiliki hubungan dengan partisipasi dalam program TRK. Besarnya luas lahan yang dimiliki oleh petani mempengaruhi dalam merespon program TRK yang bertujuan untuk membantu meningkatkan produktivitas usahataniannya, sehingga petani responden merasakan manfaat dari program TRK.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soekartawi (1988) yang menyatakan bahwa luas lahan petani sangat berpengaruh terhadap penggunaan teknologi baru. Pada umumnya petani yang memiliki lahan yang luas cenderung lebih cepat untuk mengadopsi teknologi baru dibandingkan dengan petani yang berlahan sempit

6.3.4. Motivasi

Motivasi dan keinginan petani merupakan hal dasar yang melatarbelakangi tujuan mereka mengikuti program TRK ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan tujuan mereka untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sebagai seorang manusia. Hubungan antara antara motivasi dengan Partisipasi dalam Program TRK dapat dilihat pada tabel 24 berikut ini :

Tabel 24. Hubungan antara motivasi dengan Partisipasi dalam Program TRK, di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Variabel (%)	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah (36,36%)	0	25	75	100
Sedang (50%)	0	9,09	90,9	100
Tinggi (13,63%)	0	33,33	66,66	100

Sumber : Analisis Data Primer : 2008

Dari hasil penelitian didapatkan data petani responden pada kelompok tani Usaha Jaya tidak ada kecenderungan hubungan antara motivasi dengan partisipasi petani dalam program TRK. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani sampel yang mengadopsi program TRK mempunyai motivasi yang hampir sama yaitu hanya untuk meningkatkan pendapatan usahatani, sehingga tidak sesuai dengan Mardikanto (1993) yang seharusnya banyak motivasi yang beragam dan berbeda-beda antara petani yang satu dengan petani yang lain.

6.3.5. Status Kepemilikan lahan

Pada dasarnya status kepemilikan lahan dalam kegiatan usahatani dapat dibedakan menjadi milik, sewa, bagi hasil. Dengan status sebagai pemilik lahan tentunya petani dapat lebih menerima atau mengadopsi program TRK daripada petani penyewa. Ini karena petani penyewa akan berpikir agar lahan yang disewanya dapat memberi keuntungan bagi dirinya disamping biaya yang sudah dikeluarkan. Hubungan antara status kepemilikan lahan dengan Partisipasi dalam Program TRK dapat dilihat pada tabel 25 berikut ini :

Tabel 25. Hubungan antara status kepemilikan lahan dengan Partisipasi dalam Program TRK, di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Variabel (%)	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah (13,63%)	0	33,33	66,66	100
Sedang (31,81%)	0	14,28	85,71	100
Tinggi (54,54%)	0	33,33	83,33	100

Sumber : Analisis Data Primer : 2008

Dari hasil penelitian didapatkan data petani responden pada kelompok tani Usaha Jaya ada kecenderungan hubungan antara status kepemilikan lahan dengan partisipasi petani dalam program TRK. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar petani sampel yaitu sebesar 68 % mempunyai status sebagai pemilik lahan, sedangkan 18,18 % petani dengan status penyewa dan milik sendiri dan 13,63 % sebagai penyewa. Dengan status sebagai pemilik lahan maka petani akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap usahatannya dan dalam proses pengambilan resiko akan semakin berani.

Hal ini sesuai dengan pendapat Wiriatmadja (1986) yang menyatakan bahwa dalam kegiatan berusahatani status kepemilikan lahan petani sangat berpengaruh terhadap pengelolaan usahatannya, dalam hal ini dapat diartikan bahwa petani pemilik memiliki daya penerapan yang lebih cepat dalam mengadopsi suatu inovasi baru, karena lahan milik sendiri sehingga tidak terlalu banyak pertimbangan. Berbeda dengan petani penyewa maupun bagi hasil atau sakap, untuk mengadopsi sesuatu perlu mempertimbangkan banyak hal, selain tanah yang harus dibayar sewanya juga tanggung jawab terhadap pemilik tanah terutama untuk petani bagi hasil/sakap.

6.3.6 Kontak dengan penyuluh

Hubungan dengan penyuluh diukur berdasarkan kehadiran petani responden dalam setiap pertemuan dalam satu kali musim tanam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan hubungan antara partisipasi petani dalam program TRK dengan kontak dengan penyuluh. Rogers dan Shoemaker (1971), menyatakan bahwa semakin tinggi hubungan antara petani

dan penyuluh maka semakin cepat tingkat adopsi inovasi. Sebagian besar petani responden cukup aktif dalam menghadiri pertemuan atau kegiatan penyuluhan sehingga petani responden dapat dengan mudah mengadopsi suatu inovasi yaitu program TRK. Hubungan antara antara kontak dengan penyuluh dengan Partisipasi dalam Program TRK dapat dilihat pada tabel 26 berikut ini :

Tabel 26. Hubungan antara kontak dengan penyuluh dengan Partisipasi dalam Program TRK, di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Variabel (%)	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah (13,63%)	0	33,33	66,66	100
Sedang (77,27%)	0	11,76	88,23	100
Tinggi (90%)	0	50	50	100

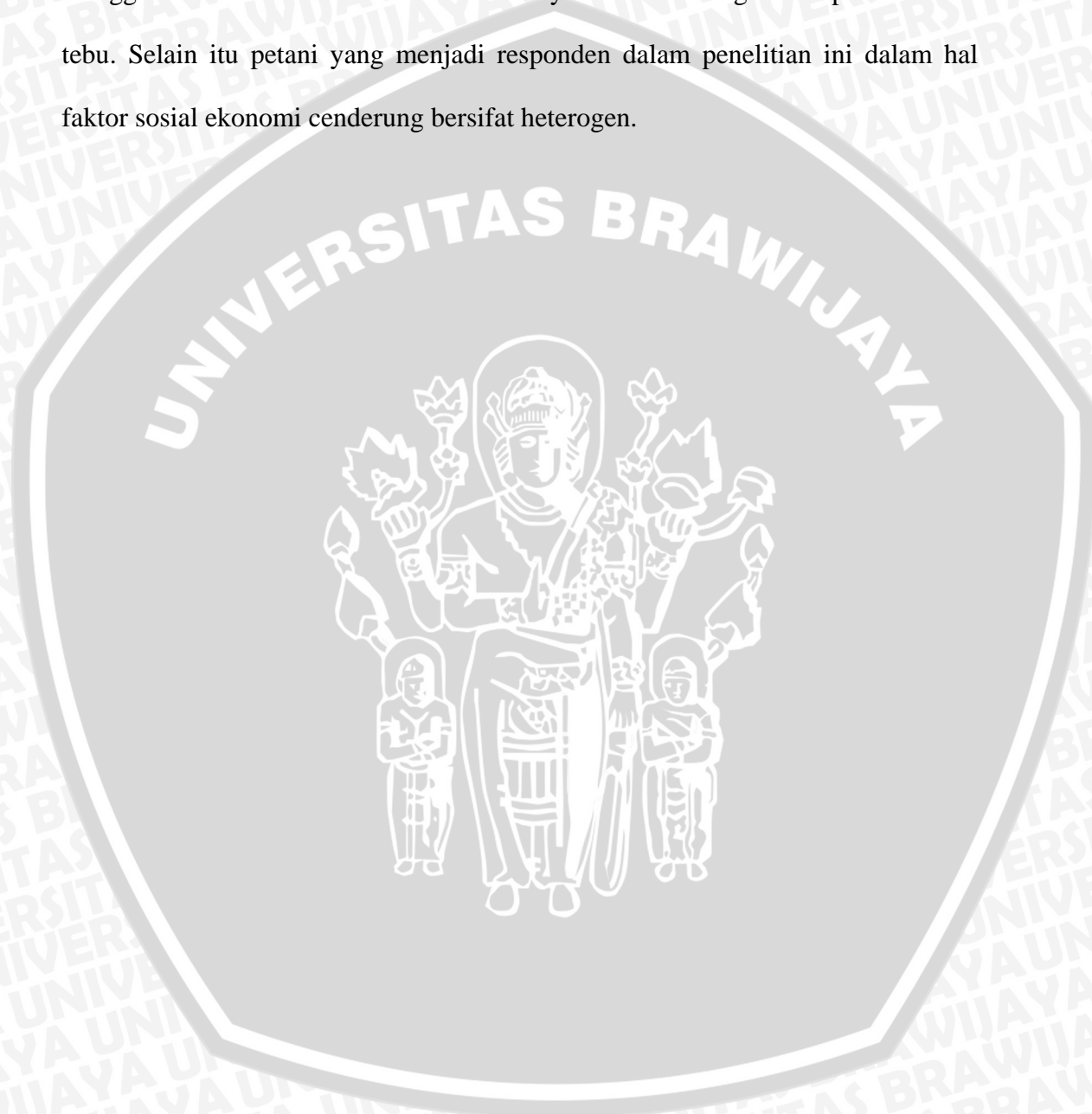
Sumber : Analisis Data Primer : 2008

Dari tabel 26 diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kontak penyuluh dengan partisipasi petani responden dalam program TRK. Hal ini dikarenakan petani responden sangat termotivasi menjadi anggota kelompok tani dan menghadiri pertemuan kelompok meskipun tidak semua petani responden aktif dalam kegiatan penyuluhan. Tetapi petani responden merasakan manfaat kegiatan penyuluhan dalam membantu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.

Dari keseluruhan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara faktor sosial ekonomi (tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan dan kontak dengan penyuluh) dengan partisipasi responden dalam program TRK. Hal ini dikarenakan bahwa program TRK merupakan

program yang dinilai sangat baik dan menguntungkan bagi petani responden.

Dengan adanya program TRK, petani responden mampu memanfaatkan dan menggunakan sesuai kebutuhan usahatannya dalam meningkatkan produktivitas tebu. Selain itu petani yang menjadi responden dalam penelitian ini dalam hal faktor sosial ekonomi cenderung bersifat heterogen.



VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Prosedur proses kemitraan Tebu Rakyat Kemitraan di PG. Pesantren Baru yaitu : (1) Mendaftar petani, (2) Permohonan kontrak tebu rakyat diketahui KUD, (3) Diajukan ke PG, (4) Pemeriksaan lahan, (5) Rekomendasi PG dan (6) Realisasi kredit.
2. Partisipasi petani dalam program TRK di Kelompok Tani Usaha Jaya Desa Burengan Kecamatan Pesantren meliputi merencanakan kegiatan TRK, pelaksanaan kegiatan teknis dan evaluasi kegiatan. Berdasarkan hasil yang ada diketahui bahwa partisipasi petani dalam program TRK tergolong tinggi yang mana hal ini menunjukkan bahwa petani di daerah penelitian sepenuhnya aktif dalam mengikuti kegiatan program TRK.
3. Terdapat hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan partisipasi petani dalam program TRK diartikan bahwa responden dapat menerima program-program dari pemerintah selama hal tersebut menguntungkan petani.

7.2 Saran

1. Perlu adanya pengawasan terhadap proses kegiatan kemitraan oleh PG. Pesantren Baru agar proses yang dijalankan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Partisipasi petani yang tinggi dalam menerima suatu program harus tetap dipertahankan, dalam hal ini yaitu selalu melibatkan petani karena dengan keikutsertaan petani dalam program ini disetiap kegiatan petani dengan mudah menjalankan partisipasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Selain itu peranan penyuluh terus ditingkatkan sehingga pengetahuan petani terus berkembang dengan baik dalam menerima suatu teknologi baru.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan partisipasi petani terhadap program TRK, dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda, sehingga dapat dirumuskannya kebijakan pemerintah yang lebih baik dalam bidang pertanian terutama terkait dengan program TRK.



DAFTAR PUSTAKA

- Asnah, Siti.2003. **Analisa Pola Kemitraan Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Dalam Bagi Hasil Gula di PG Kebon Agung Malang**. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
- Ban Van Den, A. W, dan H. S. Hawkins. 1999. **Penyuluhan Pertanian**. Kanisius. Yogyakarta.
- Cohen. Bruce J.1983. **Sosiologi Suatu Pengantar** .Bina Aksara: Jakarta.
- Damayantie, Shinta.2005. **Partisipasi Petani Dalam Program Tebu Rakyat Kemitraan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya**. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
- Prayogo, Cahyo Hadi. 2008. **Peran Serta Sebagai Penyuluh Lapang Pada Penerapan Hasta Usahatani Tebu Dalam Peningkatan Pendapatan Usahatani Melalui Program Tebu Rakyat Kemitraan (TRK)**. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
- Hagul, Peter. 1992. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat**. CV. Rajawali. Jakarta.
- Hafsah, M.1999. **Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi**. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Lustiadi, Yadi. 2001. **Analisis Model Partisipasi Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan di Era Globalisasi**. Riset. Jurnal Riset Ilmu Sosial, Teknik, Ekonomi dan Hukum. Volume2. No.1. 15. Universitas Bandar Lampung. Lampung.
- Mardikanto, Totok. 1994. **Penyuluhan Pembangunan Pertanian**. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Margono, Slamet. 1980. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan**. Seminar Pengembangan Pedesaan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Nasution, Z. 2004. **Perubahan Sosial Proses Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Kegiatan Pembangunan Di Era Otonomi Desa**. Publica : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume I No. 3. Hal 131-203
- Ndraha, T. 1990. **Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas**. Rineka Cipta. Jakarta.

- Pajri. 2001. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Anggota Terhadap Aktivitas Koperasi yang Berimplikasi Pada Perkembangan Koperasi di Indonesia sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat.** Karya Ilmiah. Fakultas Ekonomi. Universitas Lampung. Bandarlampung.
- Prasetyani, Dian. 2004. **Perbandingan Pendapatan Usaha Tebu Rakyat Kemitraan dan Tebu Rakyat Mandiri.** Jurusan Sosial Ekonomi Unibraw. Malang.
- Rogers, Everett M. With F. Floyd Shoemaker. 1971. **Communication of Innovations.** The Free Press. A Division of Macmillan Publ. Co. New York.
- Soedarmanto. 1992. **Dasar-dasar Pengelolaan dan Penyuluhan Pertanian.** Unibraw. Malang
- Sastropoetro, S. 1988. **Partisipasi, Komunikasi, Persuasif, dan Disiplin Pembangunan.** Alumni. Bandung.
- Siegel, Sidney. 1997. **Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu- Ilmu Sosial.** PT Gramedia. Jakarta.
- Singarimbun, M dan Effendi, S. 1995. **Metode Penelitian Survei.** LP3ES. Jakarta.
- Soekartawi. 2005. **Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian.** UI-Press. Jakarta.
- Syamsi, Ibnu. 1987. **Pokok-pokok Kebijakan Perencanaan Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan.** CV. Rajawali. Jakarta.
- Wiriadmadja, Soekandar.1986. **Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian.**CV. Yasaguna: Jakarta

Lampiran 1. Luas Lahan Petani Peserta Kemitraan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Luas lahan
1	Asan	L	44	2,5
2	Imam	L	49	1,02
3	Mudjiono	L	55	2
4	Ruwajdi	L	60	6,5
5	Dani	L	54	2,5
6	Djuwarno	L	38	1,5
7	Roni	L	64	3,5
8	Nursalim	L	53	2,5
9	Ponirin	L	59	4,35
10	Nadi	L	47	1,03
11	Ropik	L	57	2,95
12	Tomo	L	51	4,03
13	Suwito	L	50	4
14	Samud	L	52	2,05
15	Suparwoto	L	49	2
16	Ponijan	L	54	1,92
17	Bambang	L	48	1
18	Kasnadi	L	43	5,25
19	Mukadi	L	58	2
20	Maksun	L	45	2,5
21	Sumiran	L	60	3,5
22	Jamrozi	L	45	2

Total Luas Lahan Petani Tebu = 60,6

1. Perhitungan Rata-rata (\bar{x}) Luas Lahan Petani

Rata-rata (\bar{X}) luas lahan petani = Total Luas Lahan Petani / Jumlah Petani

$$= \frac{60,6}{22} = 2,75$$

2. Perhitungan Varian (S^2) dari populasi

- a. Standar Deviasi (σ) =

$$\sqrt{\frac{\sum X^2 - (\sum X)^2/n}{n-1}} = \sqrt{\frac{1921686 - (60,6)^2/22}{22-1}} = 3,01$$

- b. Varian (S^2) = $(\sigma)^2 = (3,01)^2 = 9,07$

Karena $\bar{X} < S^2$ sehingga populasi dikategorikan heterogen.

3. Jumlah Sampel Minimal (n)

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Strata I (Luas)} &= \bar{X} + \frac{1}{2} \sigma \\
 &= 2,75 + \frac{1}{2} 3,01 \\
 &= 4,26
 \end{aligned}$$

No	Nama Petani	Luas Lahan (X)	(X ²)
1	Ruwadji	6,25	42,25
2	Ponirin	4,25	18,9
3	Kasnadi	5,25	27,56
Total		16,10	88,71

$$\text{Rata-rata} = \bar{X} = \frac{16,1}{3} = 5,37$$

$$\text{Standar Deviasi } \sigma = \sqrt{\frac{\sum X^2 - (\sum X)^2/n}{n-1}} = \sqrt{\frac{88 - 71 - (16,1)^2/3}{3-1}} = 1,07$$

$$\text{Varian (S)}^2 = (1,07)^2$$

$$S^2 = 1,15$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Strata II (Sedang)} &= \bar{X} - \frac{1}{2} \sigma \quad \text{ / } \quad \bar{X} + \frac{1}{2} \sigma \\
 &= (2,75 - \frac{1}{2} 3,01) \quad \text{ / } \quad (2,75 + \frac{1}{2} 3,01) \\
 &= 1,245 \quad \text{ / } \quad 4,26
 \end{aligned}$$

No	Nama Petani	Luas lahan (X)	(X ²)
1	Asan	2,50	6,25
2	Mudjiono	1,02	4,00
3	Dani	2,50	6,25
4	Djuwarno	1,50	2,25
5	Roni	3,50	12,25
6	Nursalim	2,50	6,25
7	Ropik	2,95	8,70
8	Tomo	4,03	16,24
9	Suwito	4,00	16,00
10	Samud	2,05	4,20
11	Suparwoto	2,00	4,00
12	Ponijan	1,92	3,67
13	Mukadi	2,00	4,00
14	Maksun	2,50	6,25
15	Sumiran	3,50	12,25
16	Jamrozi	2,00	4,00
Total		41,45	116,56

$$\text{Rata-rata } (\bar{X}) = \frac{41,45}{16} = 2,6$$

$$\text{Standar Deviasi } (\sigma) = \sqrt{\frac{116,5659 - (41,45)^2 / 16}{16 - 1}} = 0,78$$

$$\text{Varian } (S^2) = (0,78)^2$$

$$S^2 = 0,61$$

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Strata III (Sempit)} &= \bar{X} - \frac{1}{2} \sigma \\
 &= 2,75 - \frac{1}{2} 3,01 \\
 &= < 1,245
 \end{aligned}$$

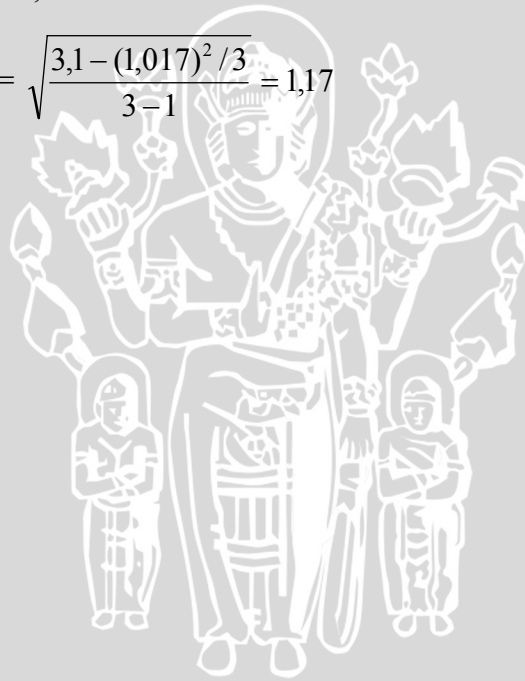
No	Nama Petani	Luas Lahan (X)	(X ²)
1	Imam	1,02	1,04
2	Nadi	1,03	1,06
3	Bambang	1,00	1,00
	Total	3,05	3,10

$$\text{Rata-rata } (\bar{X}) = \frac{3,5}{3} = 1,17$$

$$\text{Standar Deviasi } (\sigma) = \sqrt{\frac{3,1 - (1,017)^2 / 3}{3 - 1}} = 1,17$$

$$\text{Varian } (S^2) = (1,17)^2$$

$$S^2 = 1,378$$



Lampiran 2. Skor Faktor-faktor sosial ekonomi

No	Nama	Faktor sosial ekonomi						Total
		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	
1	Asan	3	1	2	3	3	2	14
2	Imam	1	3	1	2	3	2	12
3	Mudjiono	1	2	2	2	1	2	10
4	Ruwajdi	3	1	2	2	2	2	12
5	Dani	1	2	3	2	3	2	13
6	Djuwarno	3	2	2	3	3	2	15
7	Roni	1	3	1	2	3	2	12
8	Nursalim	2	2	2	1	2	2	11
9	Ponirin	3	3	3	1	2	3	15
10	Nadi	2	2	2	2	3	2	13
11	Ropik	3	1	2	2	3	2	13
12	Tomo	3	3	3	1	3	2	15
13	Suwito	2	1	1	2	3	1	10
14	Samud	1	1	3	1	3	2	11
15	Suparwoto	3	2	2	1	2	1	11
16	Ponijan	2	3	3	2	1	2	13
17	Bambang	3	2	1	1	2	2	11
18	Kasnadi	3	2	3	2	3	2	15
19	Mukadi	3	1	1	2	3	3	13
20	Maksun	2	2	1	1	2	2	10
21	Sumiran	3	2	2	1	1	2	11
22	Jamrozi	1	3	1	3	2	1	11
Total		49	44	43	39	53	43	271
rata-rata		2,23	2	1,95	1,77	2,4	1,95	12,3
skor max		3	3	3	3	3	3	18
persentase		74,3	66,67	65	59	80	65	55,90

Sumber Analisis Data Primer, 2008

Keterangan :

X₁ = PendidikanX₂ = UmurX₃ = Luas LahanX₄ = Status kepemilikan LahanX₅ = MotivasiX₆ = Kontak Dengan Penyuluh



Lampiran 4. Skor Dari Variabel Partisipasi Petani dalam program TRK

No	Y1	Y2	Y3	Y
1	10	10	7	27
2	9	10	8	27
3	10	9	7	26
4	10	11	8	29
5	12	9	7	28
6	10	11	7	28
7	10	9	8	27
8	8	10	6	24
9	11	9	8	28
10	10	10	6	26
11	10	12	7	29
12	10	10	9	29
13	8	9	7	24
14	10	9	7	26
15	8	9	8	25
16	9	9	7	25
17	10	10	8	28
18	11	10	7	28
19	11	11	9	31
20	11	11	6	28
21	10	10	6	26
22	10	11	7	28
Total	218	218	160	597

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

Keterangan : Y1 = Variabel partisipasi petani dalam pelaksanaan program TRK

Y2 = Variabel partisipasi petani dalam pelaksanaan program TRK

Y3 = Variabel partisipasi petani dalam evaluasi program TRK

Lampiran 5.

Analisis Hubungan faktor-faktor sosial ekonomi dengan partisipasi dalam program TRK

1. Variabel X_1 terhadap Y (tingkat pendidikan terhadap partisipasi).

Jumlah responden (n) = 22

X_1 Rendah = 2 responden

X_2 Sedang = 5 responden

X_3 Tinggi = 11 responden

Jumlah = 22 responden

Jumlah responden (n) = 22

X_1 Rendah = 0 responden

X_2 Sedang = 4 responden

X_3 Tinggi = 18 responden

Jumlah = 22 responden

X_1	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	0	0	6	6
Sedang	0	2	3	5
Tinggi	0	2	9	11
Jumlah	0	4	18	22

Persentase (%)				
X_1	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	0	0	100	100
Sedang	0	40	60	100
Tinggi	0	18,18	81,81	100

2. Variabel X_2 terhadap Y (umur terhadap partisipasi).

Jumlah responden (n) = 22

X_1 Rendah = 6 responden
 X_2 Sedang = 10 responden
 X_3 Tinggi = 6 responden
 Jumlah = 22 responden

Jumlah responden (n) = 22

X_1 Rendah = 0 responden
 X_2 Sedang = 4 responden
 X_3 Tinggi = 18 responden
 Jumlah = 22 responden

X_2	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	0	2	4	6
Sedang	0	1	9	10
Tinggi	0	1	5	6
Jumlah	0	4	18	22

X_2	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	0	33,33	66,66	100
Sedang	0	10	90	100
Tinggi	0	16,66	83,33	100

3. Variabel X_3 terhadap Y (luas lahan terhadap partisipasi).

Jumlah responden (n) = 22

X_1 Rendah = 7 responden
 X_2 Sedang = 9 responden
 X_3 Tinggi = 6 responden
 Jumlah = 22 responden

Jumlah responden (n) = 22

X_1 Rendah = 0 responden
 X_2 Sedang = 4 responden
 X_3 Tinggi = 18 responden
 Jumlah = 22 responden

X_3	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	0	1	6	7
Sedang	0	1	8	9
Tinggi	0	2	4	6
Jumlah	0	4	18	22

X_3	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	0	14,28	85,71	100
Sedang	0	11,11	88,88	100
Tinggi	0	33,33	66,66	100



4. Variabel X_4 terhadap Y (motivasi terhadap partisipasi).

Jumlah responden (n) = 22

X_1 Rendah = 8 responden
 X_2 Sedang = 11 responden
 X_3 Tinggi = 3 responden
 Jumlah = 22 responden

Jumlah responden (n) = 22

X_1 Rendah = 0 responden
 X_2 Sedang = 4 responden
 X_3 Tinggi = 18 responden
 Jumlah = 22 responden

X_4	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	0	2	6	8
Sedang	0	1	10	11
Tinggi	0	1	2	3
Jumlah	0	4	18	22

X_4	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	0	25	75	100
Sedang	0	9,09	90,9	100
Tinggi	0	33,33	66,66	100

5. Variabel X_5 terhadap Y (status kepemilikan lahan terhadap partisipasi).

Jumlah responden (n) = 22

X_1 Rendah = 3 responden
 X_2 Sedang = 7 responden
 X_3 Tinggi = 12 responden
 Jumlah = 22 responden

Jumlah responden (n) = 22

X_1 Rendah = 0 responden
 X_2 Sedang = 4 responden
 X_3 Tinggi = 18 responden
 Jumlah = 22 responden

X_5	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	0	1	2	3
Sedang	0	1	6	7
Tinggi	0	2	10	12
Jumlah	0	4	18	22

X_5	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	0	33,33	66,66	100
Sedang	0	14,28	85,71	100
Tinggi	0	16,66	83,33	100

6. Variabel X_6 terhadap Y (kontak dengan penyuluh terhadap partisipasi).

Jumlah responden (n) = 22

X_1 Rendah = 3 responden
 X_2 Sedang = 17 responden
 X_3 Tinggi = 2 responden
 Jumlah = 22 responden

Jumlah responden (n) = 22

X_1 Rendah = 0 responden
 X_2 Sedang = 4 responden
 X_3 Tinggi = 18 responden
 Jumlah = 22 responden

X_6	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	0	1	2	3
Sedang	0	2	15	17
Tinggi	0	1	1	2
Jumlah	0	4	18	22

X_6	Partisipasi			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	0	33,33	66,66	100
Sedang	0	11,76	88,23	100
Tinggi	0	50	50	100

Hubungan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi petani dalam program TRK

No	X	Y	Rank X1	Rank Y	di	di ²
1	3	27	17,0	10,0	7,0	49,0
2	1	27	3,5	10,0	-6,5	42,2
3	1	26	3,5	6,5	-3,0	9,0
4	3	29	17,0	20,0	-3,0	9,0
5	1	28	3,5	15,0	-11,5	132,2
6	3	28	17,0	15,0	2,0	4,0
7	1	27	3,5	10,0	-6,5	42,2
8	2	24	9,0	1,5	7,5	56,2
9	3	28	17,0	15,0	2,0	4,0
10	2	26	9,0	6,5	2,5	6,2
11	3	29	17,0	20,0	-3,0	9,0
12	3	29	17,0	20,0	-3,0	9,0
13	2	24	9,0	1,5	7,5	56,2
14	1	26	3,5	6,5	-3,0	9,0
15	3	25	17,0	3,5	13,5	182,2
16	2	25	9,0	3,5	5,5	30,2
17	3	28	17,0	15,0	2,0	4,0
18	3	28	17,0	15,0	2,0	4,0
19	3	31	17,0	22,0	-5,0	25,0
20	2	28	9,0	15,0	-6,0	36,0
21	3	26	17,0	6,5	10,5	110,2
22	1	28	3,5	15,0	-11,5	132,2
Total			253	253		961,5

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\begin{aligned} \sum Tx &= \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{5^3 - 5}{12} + \frac{11^3 - 11}{12} \\ &= 17,5 + 10 + 110 = \mathbf{137,5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum Ty &= \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^2 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{1^3 - 1}{12} \\ &= 0,5 + 0,5 + 5 + 2 + 28 + 2 + 0 \end{aligned}$$



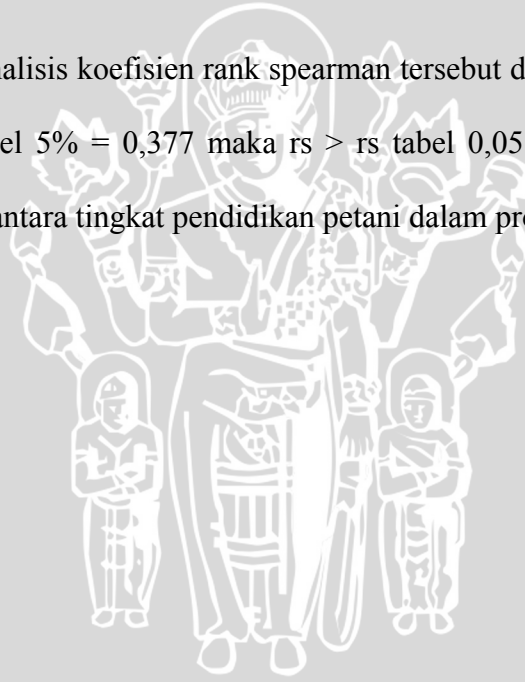
$$= 38$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x = \frac{22^3 - 22}{12} - 137,5 = 748$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_y = \frac{22^3 - 22}{12} - 38 = 847,5$$

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} = \frac{748 + 847,5 - 961,5}{2\sqrt{748 \cdot 847,5}} = 0,40$$

Berdasarkan analisis koefisien rank spearman tersebut diperoleh r_s sebesar 0,40 sedangkan r_s tabel 5% = 0,377 maka $r_s > r_s$ tabel 0,05 sehingga terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pendidikan petani dalam program TRK.



Lampiran 6. Hubungan antara umur dengan partisipasi petani dalam program TRK

No	X	Y	Rank X2	Rank Y	di	di ²
1	1	27	3,5	10,0	-6,5	42,2
2	3	27	19,5	10,0	9,5	90,2
3	2	26	11,5	6,5	5,0	25,0
4	1	29	3,5	20,0	-16,5	272,2
5	2	28	11,5	15,0	-3,5	12,2
6	2	28	11,5	15,0	-3,5	12,2
7	3	27	19,5	10,0	9,5	90,2
8	2	24	11,5	1,5	10	100,0
9	3	28	19,5	15,0	4,5	20,2
10	2	26	11,5	6,5	5,0	25,2
11	1	29	3,5	20,0	-16,5	272,2
12	3	29	19,5	20,0	-0,5	0,2
13	1	24	3,5	1,5	2,0	4,0
14	1	26	3,5	6,5	-3,0	9,0
15	2	25	11,5	3,5	-8,0	64,0
16	3	25	19,5	3,5	16	256,0
17	2	28	11,5	15,0	-3,5	12,2
18	2	28	11,5	15,0	-3,5	12,2
19	1	31	3,5	22,0	-18,5	342,2
20	2	28	11,5	15,0	-3,5	12,2
21	2	26	11,5	6,5	5,0	25,0
22	3	28	19,5	15,0	4,5	20,2
Total			253	253		1719,5

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum Tx = \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{10^3 - 10}{12} + \frac{6^3 - 6}{12}$$

$$= 17,5 + 82,5 + 17,5 = \mathbf{117,5}$$

$$\sum Ty = \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^2 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{1^3 - 1}{12}$$

$$= 0,5 + 0,5 + 5 + 2 + 28 + 2 + 0$$

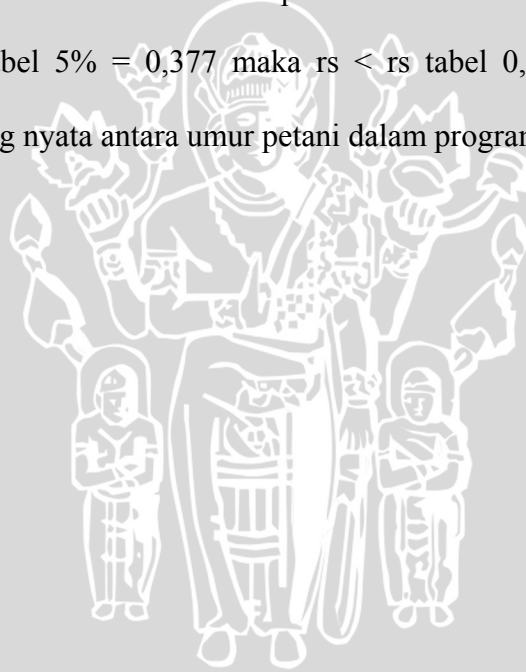
$$= \mathbf{38}$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x = \frac{22^3 - 22}{12} - 117,5 = 768$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_y = \frac{22^3 - 22}{12} - 38 = 847,5$$

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} = \frac{768 + 847,5 - 1719,5}{2\sqrt{768 \cdot 847,5}} = -0,06$$

Berdasarkan analisis koefisien rank spearman tersebut diperoleh r_s sebesar -0,06 sedangkan r_s tabel 5% = 0,377 maka $r_s < r_s$ tabel 0,05 sehingga tidak terdapat hubungan yang nyata antara umur petani dalam program TRK.



Lampiran 7. Hubungan antara luas lahan dengan partisipasi petani dalam program TRK

No	X	Y	Rank X3	Rank Y	di	di ²
1	2	27	12,0	10,0	11,0	121,0
2	1	27	4,0	10,0	-6,0	36,0
3	2	26	12,0	6,5	5,5	30,2
4	2	29	12,0	20,0	-8,0	64,0
5	3	28	19,5	15,0	4,5	20,2
6	2	28	12,0	15,0	-3,0	9,0
7	1	27	4,0	10,0	-6,0	36,0
8	2	24	12,0	1,5	10,5	110,2
9	3	28	19,5	15,0	4,5	20,2
10	2	26	12,0	6,5	5,5	30,2
11	2	29	12,0	20,0	-8,0	64,0
12	3	29	19,5	20,0	-0,5	0,2
13	1	24	4,0	1,5	2,5	6,2
14	3	26	19,5	6,5	13,0	169,0
15	2	25	12,0	3,5	8,5	72,2
16	3	25	19,5	3,5	16,0	256,0
17	1	28	4,00	15,0	-11,0	121,0
18	3	28	19,5	15,0	4,5	20,2
19	1	31	4,0	22,0	-18,0	324,0
20	1	28	4,0	15,0	-11,0	121,0
21	2	26	12,0	6,5	5,5	30,2
22	1	28	4,0	15,0	-11,0	121,0
Total			253	253		1782,5

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum Tx = \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{9^3 - 9}{12} + \frac{6^3 - 6}{12}$$

$$= 28 + 60 + 17,5 = 105,5$$

$$\sum Ty = \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^2 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{1^3 - 1}{12}$$

$$= 0,5 + 0,5 + 5 + 2 + 28 + 2 + 0$$

$$= 38$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x = \frac{22^3 - 22}{12} - 105,5 = 780$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_y = \frac{22^3 - 22}{12} - 38 = 847,5$$

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} = \frac{780 + 847,5 - 1782,5}{2\sqrt{780 \cdot 847,5}} = -0,09$$

Berdasarkan analisis koefisien rank spearman tersebut diperoleh r_s sebesar -0,09 sedangkan r_s tabel 5% = 0.377 maka $r_s < r_s$ tabel 0,05 sehingga tidak terdapat hubungan yang nyata antara luas lahan dalam program TRK.



Lampiran 8. Hubungan antara motivasi dengan partisipasi petani dalam program TRK

No	X	Y	Rank X4	Rank Y	di	di ²
1	3	27	21,0	10,0	11,0	121,0
2	2	27	14,0	10,0	4,0	16,0
3	2	26	14,0	6,5	7,5	56,2
4	2	29	14,0	20,0	-6,0	36,0
5	2	28	14,0	15,0	-1,0	1,0
6	3	28	21,0	15,0	6,0	36,0
7	2	27	14,0	10,0	4,0	16,0
8	1	24	4,5	1,5	3,0	9,0
9	1	28	4,5	15,0	-10,5	110,2
10	2	26	14,0	6,5	7,5	56,2
11	2	29	14,0	20,0	-6,0	36,0
12	1	29	4,5	20,0	-15,5	240,2
13	2	24	14,0	1,5	12,5	156,2
14	1	26	4,5	6,5	-2,0	4,0
15	1	25	4,5	3,5	1,0	1,0
16	2	25	14,0	3,5	10,5	110,2
17	1	28	4,5	15,0	-10,5	110,2
18	2	28	14,0	15,0	-1,0	1,0
19	2	31	14,0	22,0	-8,0	64,0
20	1	28	4,5	15,0	-10,5	110,2
21	1	26	4,5	6,5	-2,0	4,2
22	3	28	21,0	15,0	6,0	36,0
Total			253	253		133,1

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum Tx = \frac{8^3 - 8}{12} + \frac{11^3 - 11}{12} + \frac{3^3 - 3}{12}$$

$$= 42 + 110 + 2 = 154$$

$$\sum Ty = \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^2 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{1^3 - 1}{12}$$

$$= 0,5 + 0,5 + 5 + 2 + 28 + 2 + 0$$

$$= 38$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x = \frac{22^3 - 22}{12} - 154 = \mathbf{731,5}$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_y = \frac{22^3 - 22}{12} - 38 = \mathbf{847,5}$$

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} = \frac{731,5 + 847,5 - 1331}{2\sqrt{731,5 \cdot 847,5}} = \mathbf{0,16}$$

Berdasarkan analisis koefisien rank spearman tersebut diperoleh r_s sebesar 0,16 sedangkan r_s tabel 5% = 0,377 maka $r_s < r_s$ tabel 0,05 sehingga tidak terdapat hubungan yang nyata antara motivasi dalam program TRK



Lampiran 9 Hubungan antara status kepemilikan lahan dengan partisipasi petani dalam program TRK

No	X	Y	Rank X5	Rank Y	di	di ²
1	3	27	16,5	10,0	6,5	42,25
2	3	27	16,5	10,0	6,5	42,25
3	1	26	2,0	6,5	-4,5	20,25
4	2	29	7,0	20,0	-13,0	169,0
5	3	28	16,5	15,0	1,5	2,25
6	3	28	16,5	15,0	1,5	2,25
7	3	27	16,5	10,0	6,5	42,25
8	2	24	7,0	1,5	5,5	30,25
9	2	28	7,0	15,0	-8,0	64,0
10	3	26	16,5	6,5	10,0	100,0
11	3	29	16,5	20,0	-3,5	12,25
12	3	29	16,5	20,0	-3,5	12,25
13	3	24	16,5	1,5	15,0	225,0
14	3	26	16,5	6,5	10,0	100,0
15	2	25	7,0	3,5	3,5	12,25
16	1	25	2,0	3,5	-1,5	2,25
17	2	28	7,0	15,0	8,0	64,0
18	3	28	6,5	15,0	-8,5	72,25
19	3	31	6,5	22,0	-15,5	240,25
20	2	28	7,0	15,0	8,0	64,0
21	1	26	2,0	6,5	4,5	20,25
22	2	28	7,0	15,0	8,0	64,0
Total			253	253		1404

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum Tx = \frac{12^3 - 12}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{3^3 - 3}{12}$$

$$= 143 + 28 + 2 = 173$$

$$\sum Ty = \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^2 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{1^3 - 1}{12}$$

$$= 0,5 + 0,5 + 5 + 2 + 28 + 2 + 0$$

$$= 38$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x = \frac{22^3 - 22}{12} - 173 = \mathbf{712,5}$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_y = \frac{22^3 - 22}{12} - 38 = \mathbf{847,5}$$

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} = \frac{712,5 + 847,5 - 1404}{2\sqrt{712,5 \cdot 847,5}} = \mathbf{3,44}$$

Berdasarkan analisis koefisien rank spearman tersebut diperoleh r_s sebesar 3,44 sedangkan r_s tabel 5% = 0,377 maka $r_s > r_s$ tabel 0,05 sehingga terdapat hubungan yang nyata antara status kepemilikan lahan dalam program TRK



Lampiran 10. Hubungan antara kontak dengan penyuluh dengan partisipasi petani dalam program TRK

No	X	Y	Rank X	Rank Y	di	di ²
1	2	27	14,0	10,0	4,0	16,0
2	2	27	14,0	10,0	4,0	16,0
3	2	26	14,0	6,5	7,5	56,2
4	2	29	14,0	20,0	-6,0	36,0
5	2	28	14,0	15,0	-1,0	1,0
6	2	28	14,0	15,0	-1,0	1,0
7	2	27	14,0	10,0	4,0	16,0
8	2	24	14,0	1,5	12,5	156,2
9	3	28	1,5	15,0	-13,5	182,2
10	2	26	14,0	6,5	7,5	56,2
11	2	29	14,0	20,0	-6,0	36,0
12	2	29	14,0	20,0	-6,0	36,0
13	1	24	4,0	1,5	2,5	6,2
14	2	26	14,0	6,5	7,5	56,2
15	1	25	4,0	3,5	0,5	0,2
16	2	25	14,0	3,5	10,5	110,2
17	2	28	14,0	15,0	-1,0	1,0
18	2	28	14,0	15,0	-1,0	1,0
19	3	31	1,5	22,0	-20,5	420,2
20	2	28	14,0	15,0	-1,0	1,0
21	2	26	14,0	6,5	7,5	56,2
22	1	28	4,0	15,0	-11,0	121,0
Total			253	253		1382,5

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum Tx = \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{14^3 - 14}{12}$$

$$= 0,5 + 2 + 227,5 = 230$$

$$\sum Ty = \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^2 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{1^3 - 1}{12}$$

$$= 0,5 + 0,5 + 5 + 2 + 28 + 2 + 0$$

$$= 38$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x = \frac{22^3 - 22}{12} - 230 = \mathbf{655,5}$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_y = \frac{22^3 - 22}{12} - 38 = \mathbf{847,5}$$

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} = \frac{655,5 + 847,5 - 1382,5}{2\sqrt{655,5 \cdot 847,5}} = \mathbf{0,80}$$

Berdasarkan analisis koefisien rank spearman tersebut diperoleh r_s sebesar 0,80 sedangkan r_s tabel 5% = 0,377 maka $r_s > r_s$ tabel 0,05 sehingga terdapat hubungan yang nyata antara kontak dengan penyuluh dalam program TRK



Lampiran 11 Hubungan antara faktor sosial ekonomi (X) dengan partisipasi petani (Y) dalam program TRK

No	X	Y	Rank X	Rank Y	di	di ²
1	14	27	18,0	10,0	8,0	64,0
2	12	27	11,0	10,0	1,0	1,0
3	10	26	2,0	6,5	-4,5	20,2
4	12	29	11,0	20,0	-9,0	81,0
5	13	28	15,0	15,0	0,0	0,0
6	15	28	20,5	15,0	5,5	30,2
7	12	27	11,0	10,0	1,0	1,0
8	11	24	6,5	1,5	5,0	25,0
9	15	28	20,5	15,0	5,5	30,2
10	13	26	15,0	6,5	8,5	72,2
11	13	29	15,0	20,0	-5,0	25,0
12	15	29	20,5	20,0	0,5	0,2
13	10	24	2,0	1,5	0,5	0,2
14	11	26	6,5	6,5	0,0	0,0
15	11	25	6,5	3,5	3,0	9,0
16	13	25	15,0	3,5	11,5	132,2
17	11	28	6,5	15,0	-8,5	72,2
18	15	28	20,5	15,0	5,5	30,2
19	13	31	15,0	22,0	-7,0	49,0
20	10	28	2,0	15,0	-13,0	169,0
21	11	26	6,5	6,5	0,0	0,0
22	11	28	6,5	15,0	-8,5	72,2
Total			253	253		884,5

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum Tx = \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{5^3 - 5}{12} + \frac{1^3 - 1}{12} + \frac{4^3 - 4}{12}$$

$$= 2 + 17,5 + 2 + 10 + 0 + 5 = 36,5$$

$$\sum Ty = \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{1^3 - 1}{12}$$

$$= 0,5 + 0,5 + 5 + 2 + 28 + 2 + 0$$

$$= 38$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x = \frac{22^3 - 22}{12} - 36,5 = 822$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_y = \frac{22^3 - 22}{12} - 38 = 847,5$$

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} = \frac{822 + 847,5 - 884,5}{2\sqrt{822 \cdot 847,5}} = 0,47$$

Berdasarkan analisis koefisien rank spearman tersebut diperoleh r_s sebesar 0,47 sedangkan r_s tabel 5% = 0,377 maka $r_s > r_s$ tabel 0,05 sehingga terdapat hubungan yang nyata antara faktor sosial ekonomi dengan partisipasi petani dalam program TRK.



Lampiran 12. Kuisisioner

**PARTISIPASI PETANI DALAM PROGRAM TEBU RAKYAT
KEMITRAAN (TRK) DAN FAKTOR-FAKTOR SOSIAL EKONOMI
YANG MEMPENGARUHINYA
(Kasus di Kelompok Tani Usaha Jaya Desa Burengan Kecamatan Pesantren
Kota Kediri)**

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : _____
2. Jenis Kelamin : _____
3. Pekerjaan : _____
4. Alamat : _____
5. Jumlah anggota keluarga
(suami+istri+anak) : _____
6. Tanggal wawancara : _____

II. FAKTOR SOSIAL EKONOMI

1. Apakah pendidikan terakhir dari bapak/ibu?
 - a) Tamat SLTA/ sederajat
 - b) Tamat SLTP/ sederajat
 - c) Tamat SD/ sederajat
2. Berapa umur bapak pada saat ini?
 - a) >45 tahun
 - b) 30- 45 tahun
 - c) <30 tahun
3. Berapakah luas lahan yang bapak/ibu gunakan untuk melaksanakan program TRK?
 - a) > 3,5 ha
 - b) 2,0-3,5 ha
 - c) < 2,0 ha
2. Apakah status bapak/ibu terhadap lahan yang digunakan untuk melaksanakan program TRK?
 - a) Milik sendiri
 - b) Sewa
 - c) Bagi hasil
5. Berapa kali bapak mengikuti program TRK ?
 - a) > 19 kali
 - b) 10 - 19 kali
 - c) < 9 kali
6. Berapa kali bapak/ibu mengikuti penyuluhan dalam satu musim tanam?
 - a) Sering (> 5 kali/musim)
 - b) Jarang (1-5 kali/musim)
 - c) Tidak pernah

III. PARTISIPASI PETANI DALAM PROGRAM TRK

A. Perencanaan Kegiatan

1. Apakah bapak ikut andil dalam merencanakan waktu pelaksanaan kegiatan TRK ?
 - a) Berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak PG dengan petani
 - b) Berdasarkan kesepakatan petani
 - c) Berdasarkan kesepakatan pihak PG
2. Apakah bapak ikut dalam merencanakan isi perjanjian kontrak antara pihak petani KUD dan pihak PG Pesantren Baru (Perolehan bibit, perolehan dan besarnya kredit pupuk, besarnya kredit biaya garap, pembagian hasil)
 - a) Ikut berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak PG dengan petani tebu
 - b) Ikut berdasarkan kesepakatan pihak petani
 - c) Tidak ikut andil
3. Dalam merencanakan materi yang akan disuluhkan pada petani apakah bapak ikut merencanakannya ?
 - a) Ikut berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak PG dengan petani tebu
 - b) Ikut berdasarkan kesepakatan pihak petani
 - c) Tidak ikut andil
4. Apakah bapak ikut berpartisipasi dalam menentukan siapa yang melakukan tebang angkut ?
 - a) Ikut berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak PG dengan petani tebu
 - b) Ikut berdasarkan kesepakatan pihak petani
 - c) Tidak ikut andil

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Apakah bapak melaksanakan penanaman tebu sendiri ?
 - a) Melaksanakan dan dilakukan sendiri
 - b) Melaksanakan dan dilakukan orang lain
 - c) Tidak melakukan sama sekali
2. Apakah bapak melaksanakan pemupukan tanaman tebu sendiri ?
 - a) Melaksanakan dan dilakukan sendiri
 - b) Melaksanakan dan dilakukan orang lain
 - c) Tidak melakukan sama sekali
3. Apakah bapak ikut serta dalam melaksanakan penebangan dan pengangkutan tebu ?
 - a) Melaksanakan dan dilakukan sendiri
 - b) Melaksanakan dan dilakukan orang lain
 - c) Tidak melakukan sama sekali

4. Apakah bapak ikut serta dalam setiap kegiatan bimbingan teknis tentang tanaman tebu yang dilakukan oleh PG. Pesantren Baru ?
 - a) Sering (mengikuti setiap bimbingan yang diberikan setiap hari)
 - b) Kadang-kadang (mengikuti sebagian)
 - c) Tidak pernah

C. Evaluasi Kegiatan

1. Apakah bapak ikut mengevaluasi petani dalam mengikuti kegiatan bimbingan yang diadakan oleh PG Pesantren Baru ?
 - a) Mengikuti
 - b) Mengikuti sebagian
 - c) Tidak pernah
2. Apakah bapak pernah menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun non teknis ?
 - a) Pernah
 - b) Kadang-kadang
 - c) Tidak pernah
3. Apakah bapak mengikuti isi perjanjian dalam kemitraan TRK?
 - a) Mengikuti sepenuhnya
 - b) Mengikuti sebagian
 - c) Tidak pernah







Lahan Setelah Dibajak



Lahan Sian Ditanami



Tebu Setelah 3 Bulan



Tebu Sebelum Dipupuk



Tebu Setelah Dipupuk



Anggota Kelompok Tani di Lahan



Penyuluhan oleh Petugas PTRI



Lokasi Penelitian